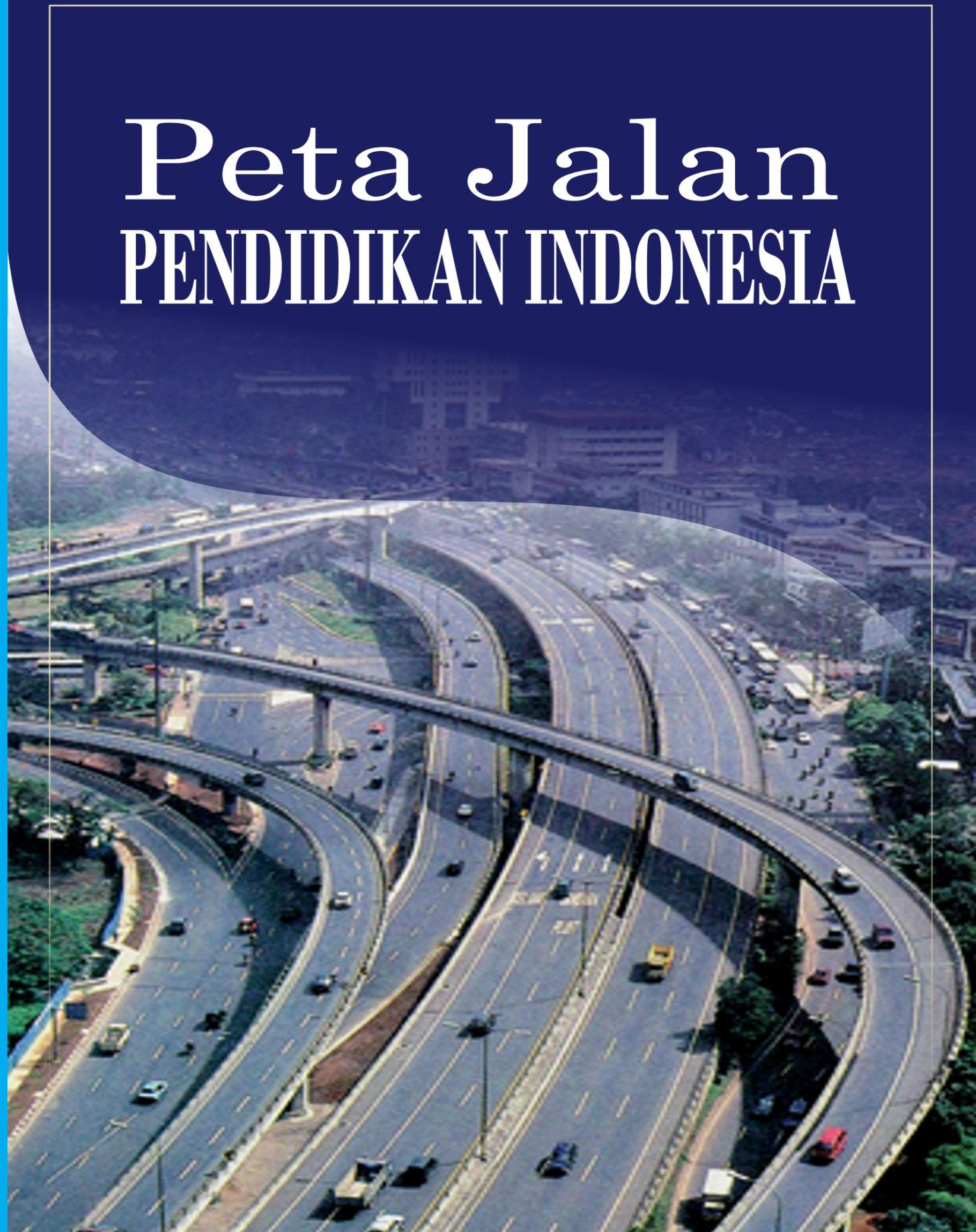


Peta Jalan PENDIDIKAN INDONESIA

Peta Jalan PENDIDIKAN INDONESIA TIM UNY



TIM UNY

Peta Jalan PENDIDIKAN INDONESIA

Tim Penulis:

Prof. Dr. Sugiyono

Dr. Aman, M.Pd.

Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.

Sutopo, MT.

Apri Nuryanto, MT.

TIM UNY

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, penulisan buku Peta Jalan Pendidikan Indonesia ini dapat kerjakan dan sampai saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. Penulisan buku didasari pada pemikiran pentingnya referensi yang terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia tentang penyelenggaraan pendidikan kita pada Masa Perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Masa Depan. Pendidikan sebagai investasi peradaban bagi bangsa Indonesia yang ingin maju dan sejahtera, serta menjadi pemenang dalam persaingan global, memerlukan petunjuk dan arah sehingga pembangunan pendidikan Indonesia memiliki benang merah yang berkesinambungan dari masa-masa yang mengarah pada cita-cita kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Disadari sepenuhnya penulisan buku ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan baik dari segi isi maupun bahasa, karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Tim Penulis. Saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini nanti dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sebagai salah satu sumbangan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. SELAYANG PANDANG PENDIDIKAN INDONESIA	1
B. PENGERTIAN PENDIDIKAN.....	4
C. DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN	8
D. ALIRAN-ALIRAN DALAM PENDIDIKAN	16
BAB II PENDIDIKAN JAMAN PERGERAKAN: MASA KOLONIAL BELANDA.....	20
A. LANDASAN FILSAFAT	20
B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN	21
C. SISTEM PENDIDIKAN.....	24
D. PESERTA DIDIK.....	33
E. Kurikulum Pendidikan.....	39
F. Tenaga Pendidik	42
G. Model Pembelajaran	46
H. Sistem Penilaian	47
I. Kompetensi Lulusan	47
BAB III PENDIDIKAN INDONESIA MENJELANG MASA KEMERDEKAAN:PENDIDIKAN MASA PENJAJAHAN JEPANG.....	50
A. LANDASAN FILSAFAT	50
B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN	53
C. SISTEM PENDIDIKAN.....	57
D. MODEL PEMBELAJARAN.....	61
E. PESERTA DIDIK.....	62
F. KURIKULUM PENDIDIKAN.....	64

	G. TENAGA PENDIDIK.....	69
	H. KOMPETENSI LULUSAN	72
BAB IV	PENDIDIKAN JAMAN ORDE LAMA: DARI KOLONIALISTIK SAMPAI NASIONALISTIK	76
	A. LANDASAN FILSAFAT	76
	B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	77
	C. SISTEM PENDIDIKAN.....	82
	D. PESERTA DIDIK.....	92
	E. KURIKULUM PENDIDIKAN.....	94
	F. TENAGA PENDIDIK.....	102
	G. MODEL PEMBELAJARAN.....	104
	H. SISTEM PENILAIAN.....	105
	I. KOMPETENSI LULUSAN	106
BAB V	PENDIDIKAN JAMAN ORDE BARU : PENGUATAN DEMOKRASI PANCASILA.....	108
	A. LANDASAN FILSAFAT	108
	B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	110
	C. SISTEM PENDIDIKAN.....	116
	D. PESERTA DIDIK.....	118
	E. KURIKULUM PENDIDIKAN.....	121
BAB VI	PENDIDIKAN INDONESIA MASA DEPAN	128
	A. KURIKULUM.....	131
	B. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN.....	131
	C. PENDIDIK	132
	D. PESERTA DIDIK.....	133
	E. KOMPETENSI LULUSAN	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. SELAYANG PANDANG PENDIDIKAN INDONESIA

Pendidikan pada hakikatnya adalah untuk membangun peradaban bangsa melalui membangun manusia seutuhnya. Pendidikan merupakan hak setiap orang untuk meningkatkan harkat dan martabatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyelenggaraan pendidikan, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik yang berasal dari internal maupun eksternal sebuah sistem pendidikan. Faktor-faktor di luar sistem pendidikan yang seimbang antara kepentingan pemerintah dan rakyat.

Sejarah suatu bangsa dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dienyam oleh rakyatnya. Maju atau tidaknya suatu bangsa juga dapat dilihat dari maju atau tidaknya pendidikan suatu bangsa. Begitu pula dengan Indonesia yang memiliki sejarah perkembangan pendidikan dari masa klasik hingga masa sekarang yang terus selalu berkembang. Sesuai dengan perkembangan zaman, pendidikan juga selalu berkembang secara dinamis. Namun, tidak ada bangsa yang berkembang secara dinamis tanpa adanya proses, pergerakan, dan perkembangan pendidikannya.

Indonesia dalam perjalanan sejarahnya juga bergerak dengan proses, pergerakan, dan perkembangan pendidikannya. Yang kita ketahui sendiri bahwa tokoh-tokoh pemimpin bangsa Indonesia juga merupakan lulusan lembaga pendidikan. Apabila kita lihat perkembangan Indonesia, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah kebutuhan mendasar suatu bangsa, begitu pula bangsa Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pada masa penjajahan, tanpa disadari oleh pihak penjajah sistem pendidikan yang diberikan dapat menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Pemuda-pemuda pribumi yang mendapatkan pendidikan dari penjajah justru berbalik menyusun kekuatan untuk memerdekakan bangsanya. Dan setelah merdeka, sistem pendidikan penjajah ada yang ditinggalkan dan ada yang masih dipertahankan.

Selama perjalanan sejarah bangsa Indonesia, aspek pendidikan merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Munculnya Sriwijaya dan Majapahit sebagai kerajaan nusantara pada masanya dengan berbagai karya agung yang masih dapat kita temukan hingga saat ini hingga merdekanya bangsa ini tidak lepas dari pengaruh pendidikan pada masa itu. Pendidikan di Indonesia banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari yang semula hanya diperuntukkan untuk kalangan agamawan dan bangsawan, hingga pendidikan yang merata untuk semua kalangan. Inilah perjalanan pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu dan tokoh yang mewarnainya.

Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Budha, kebudayaan Indonesia asli pada kira-kira 1500 SM disebut kebudayaan neolitikus (neo = baru), yang sisa-sisanya banyak kita jumpai di pedalaman Kalimantan dan Sulawesi (A. Ahmadi, 1987: 10). Kebudayaan tersebut termasuk kebudayaan maritim (ada hubungan dengan laut). Kepercayaan yang dianut pada saat itu adalah Animisme dan Dinamisme (I. Djumhur, 1976:103). Masyarakat saat itu bersifat gotong-royong, akrab, dan statis, karena di dalamnya belum terdapat perbedaan-perbedaan kelas. Orang-orang tinggal bersama-sama dalam masyarakat-masyarakat kecil dan dipimpin oleh ketua adat yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Budha, ketua adat ini kelak dijadikan raja.

Dalam Koentjaraningrat (2000) dikatakan bahwa setiap suku bangsa di dunia mempunyai pengetahuan, di antaranya: tentang alam sekitarnya; tubuh manusia; sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia; ruang dan waktu; dan lain sebagainya. Dengan sistem pengetahuan yang dimiliki seperti tersebut di atas,

pada waktu itu pendidikan dalam lingkungan keluarga sudah mencukupi kebutuhan, karena masyarakat masih serba bersahaja. Yang menjadi pendidik adalah ayah dan ibu. Ayah mengajarkan pengetahuan yang dimiliki kepada anak laki-laki dan ibu terhadap anak perempuannya. Yang dianggap memiliki kecakapan istimewa saat itu adalah pandai besi dan dukun, mereka diberi gelar Empu. Pandai besi adalah seorang yang ahli dalam pengetahuan duniawi, sedangkan dukun adalah ahli dalam pengetahuan maknawiah. Para empu dapat juga disebut sebagai Guru, karena merekalah yang berperan sebagai guru.

Tujuan pendidikan pada masa itu adalah anak-anak dipersiapkan agar kelak dapat memegang kekuasaan dalam masyarakat sebagai manusia yang mempunyai kecakapan istimewa. Manusia yang dicita-citakan adalah manusia yang mempunyai semangat gotong-royong; menghormati para empu; dan taat kepada adat. Kepala adat memegang peranan segala-galanya.

Seiring masuknya pengaruh Hindu-Budha dan Islam, maka terjadi perubahan besar dalam sistem pendidikan yang berlaku saat itu. Pengaruh Hindu-Budha membawa perubahan dalam sistem sosial kemasyarakatan, dari masyarakat kesukuan berubah menjadi sistem Kerajaan. Pendidikan kemudian berubah tujuan untuk penyebaran agama dan penguatan kekuasaan raja. Posisi raja disini ditempati oleh para kepala suku yang sudah sejak lama berkuasa.

Masuknya pengaruh Islam juga merubah pola dan sistem pendidikan yang sudah lama berjalan saat itu. Pendidikan masa Hindu-Budha yang sangat eksklusif dan ditujukan bagi kalangan bangsawan untuk melegitimasi kekuasaan Raja, berubah haluan menjadi pendidikan untuk seluruh masyarakat, namun masih sama mengikuti pola padepokan yang sudah berjalan sejak masa Hindu-Budha yang kemudian berkembang menjadi sistem pesantren.

Sampai dengan masa penjajahan VOC di bumi nusantara, pendidikan masih dengan pola atau tujuan penyebaran agama. Misi penyebaran agama menjadi prioritas dalam pelaksanaan pendidikan saat itu. Pola pendidikan mulai berubah ketika memasuki awal abad ke-20, pada masa ini pendidikan mulai memiliki

tujuan lain. Pemerintah kolonial Belanda yang mulai mengembangkan industrialisasi banyak membutuhkan tenaga kerja terdidik. Sejak saat itu dimulailah sistem pendidikan yang ditujukan untuk mencetak tenaga kerja yang bisa digaji murah. Orientasi pendidikan saat itu akhirnya hanya sekedar mendapatkan status pegawai pemerintah (*ambtenaar*). Sampai dengan masa penjajahan Jepang, tujuan pendidikan tidak juga memprioritaskan pada pencerdasan masyarakat pribumi. Pendidikan pada masa ini berorientasi pada kebutuhan Jepang untuk memenangkan perang dan membentuk persatuan Asia Timur Raya, sehingga pendidikan yang diselenggarakan diprioritaskan pada pendidikan militer dan penekanan pada wajib militer.

Baru pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya mencari bentuk dan ciri khas pendidikan nasional. Sejak masa orde lama, orde baru, sampai dengan pasca reformasi saat ini pendidikan Indonesia masih berupaya menyelenggarakan sistem pendidikan terbaik bagi bangsa ini.

B. PENGERTIAN PENDIDIKAN

Pendidikan dalam pengertian UU No.20 Tahun 2003 disebutkan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Berdasarkan UU tersebut jelas terlihat bahwa tujuan pendidikan nasional tidak hanya untuk mencerdaskan anak secara intelektual semata, tapi mengembangkan kepribadian mereka secara utuh. Tantangan kehidupan global sekarang ini, justru membutuhkan anak-anak, generasi muda dan manusia yang memiliki kepribadian, kemandirian, kreativitas, dan semangat (motivasi) untuk melakukan adaptasi dan perubahan kehidupan, bukan sekedar generasi muda yang menguasai pengetahuan teknis, tetapi lemah kepribadiannya. Hal penting

bagi praktik pendidikan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern dan global tersebut adalah dibutuhkannya landasan paradigma pendidikan yang bersifat transformasional, pendidikan yang membangun perubahan pada diri anak, seluruh aspek kehidupan dirinya, perasaan, emosi, pikiran, nilai-nilai, dan kepribadiannya yang mendorong untuk perbaikan kehidupan (Sodiq A. Kuntoro, (2011:1-2).

Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan (Ngalim Purwanto, 2002:11). Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbicara masalah pendidikan meliputi cakupan yang cukup luas, bahkan dalam mendefinisikan pengertian pendidikan juga bervariasi. Ada yang mengartikan pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di lingkungan masyarakat dimana ia berada. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses sosial, di mana seseorang dihadapkan pada kondisi dan pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (contoh paling nyata sekolah) sehingga yang bersangkutan mengalami perkembangan secara optimal (*Dictionary of Education* dalam T. Sulistyono, 2003).

Dari beberapa definisi tersebut menunjukkan posisi pendidikan dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, melihat dari sudut pandang psikologis, dan yang kedua dari sudut pandang sosiologis. Banyak sudut pandang untuk dapat merumuskan pengertian pendidikan sehingga banyak juga definisi tentang pendidikan. Namun demikian, yang pasti bahwa pendidikan

adalah proses untuk membina diri seseorang dan masyarakat agar dapat *survive* dalam menjalani hidupnya.

Banyak ahli pemikir pendidikan kelas dunia seperti Pestalozzi, Montessori, bahkan tokoh pendidikan tingkat nasional seperti Ki Hadjar Dewantara dan K.H. Ahmad Dahlan yang telah membangun teori pendidikan yang progresif transformasional, di mana anak dipandang sejak lahir sudah memiliki potensi, talenta yang diletakkan sebagai kodrat alam atau oleh Tuhan bagi umat beragama.

Pestalozzi, ahli pendidikan Eropa (Swiss) abad 18 telah melontarkan pemikiran pendidikan progressif yang menekankan pada *the whole personality which had to be educated*. Dia mengatakan bahwa alam membentuk anak sebagai suatu keseluruhan yang tak terpisahkan, sebagai suatu kesatuan organ vital dengan banyak aspek kapasitas: moral, mental, dan fisik. Alam menghendaki tidak ada aspek-aspek kapasitas ini yang tidak dikembangkan. Dimana alam telah mempengaruhi anak, dan juga membimbing anak, alam mengembangkan hati anak, pikiran, dan badannya (fisiknya) dalam kesatuan yang harmoni. Perkembangan satu aspek kapasitas tidak hanya tidak terpisahkan dengan perkembangan aspek lain, tetapi setiap aspek kapasitas ini dikembangkan melalui dan dengan bantuan yang lain (Sodiq A. Kuntoro, 2011:2). Pestalozzi sangat mementingkan perkembangan ketiga aspek tersebut dalam proses pendidikan.

Pandangan dasar Pestalozzi tentang pendidikan adalah, bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha pertolongan (bantuan) pada anak agar mampu menolong dirinya sendiri (Heafford, 1961). Pestalozzi mempunyai anggapan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan daya-daya jiwa yang dimiliki anak sehingga menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan negaranya. Pendidikan bukanlah upaya menimbun pengetahuan pada anak didik. Pendidikan dalam konsep ini menolak pengajaran yang berbentuk verbalistik. Oleh

karenanya, usaha pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan anak menurut keadaan sesungguhnya (kodratnya).

Pestalozzi juga berpendapat bahwa pendidikan harus mengembangkan aspek sosial sehingga anak dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan sosialnya. Pendidikan sosial ini berkembang jika pendidikan dimulai dengan pendidikan keluarga yang baik agar mampu menjadi anggota masyarakat yang berguna. Paran utama pendidikan keluarga yang sangat ditekankan adalah ibu yang dapat memberikan sendi-sendi dalam pendidikan jasmani, budi pekerti dan agama (Pestalozzi dalam Heafford, 1961).

Pandangan dasar di atas sesuai dengan filosofi yang mengarah kepada filsafat naturalisme romantic, yaitu pengetahuan anak diperoleh secara bertahap melalui interaksi dengan lingkungannya yang diarahkan oleh minat dan perkembangannya sendiri. Sesuai dengan pandangan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) bahwa anak dilahirkan membawa bakat yang baik, maka pendidikan adalah pengembangan bakat anak secara maksimal melalui pembiasaan, latihan, permainan, partisipasi dalam kehidupan, serta penyediaan kesempatan belajar selaras dengan tahap-tahap perkembangan anak.

Pendidikan dilihat dari sudut pandang problematikanya, menurut Driyarkara dalam Sudiarja (2006:271), pendidikan adalah problem eksistensi yang mendasarkan diri pada "*antropologia transcendentala*" dengan metode yang disebut "*existensilistiko-fenomenologika*", bahwa fenomena pendidikan meliputi: (1) mendidik sambil hidup bersama; (2) pendidikan yang mengatasi perbuatan; (3) pemaparan persoalan; (4) pendidikan dan eksistensi manusia. Proses mendidik terjadi dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dengan sendirinya berupa perbuatan pendidikan, sehingga ada distansi atau jarak antara pendidikan dan perbuatan dimana pendidikan itu menjelma.

Kegiatan pendidikan yang terlepas dari akar budaya, pandangan hidup, dan kesejarahan masyarakatnya akan menimbulkan keterasingan yang mematikan semangat, gairah, atau motivasi untuk membangun kemajuan budaya dan

masyarakatnya. Apalagi jika ditambah pula dengan pendidikan model *banking system*, yang menghancurkan kemerdekaan dan kreativitas anak (Paulo Freire, 1972), dimana anak sebagai tujuan pendidikan (subyek) justru diubah menjadi obyek yang menerima secara pasif pengetahuan yang diberikan.

Dalam praktik pendidikan, John Dewey menekankan konsep sosial pendidikan yang melihat, berpikir, dan melakukan sebagai satu kesatuan yang mengalir dari pengalaman yang berkesinambungan. Antara berpikir (*thinking*), dan melakukan (*doing*) tidak dapat dipisahkan. Berpikir tidak lengkap apabila tidak diuji dengan pengalaman. Berpikir dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya terjadi dalam otak, tetapi dengan melakukan sesuatu atas obyek tertentu, maka manusia berpikir (Sodiq A. Kuntoro, 2011:5). Antara teori dengan praktik, bagi John Dewey tidak dapat dipisahkan, sama seperti antara berpikir dan melakukan tidak dapat dipisahkan. Rupanya terdapat kesamaan antara konsep John Dewey dengan K.H. Ahmad Dahlan, bahwa keduanya menekankan pada pengamalan. Menurut K.H. Ahmad Dahlan, agama tidak cukup sekedar dipahami secara tekstual, melainkan harus dilakukan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk perbaikan kehidupan.

Pendidikan mengandung pengertian yang sangat kompleks. Dari berbagai teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak hanya sekedar mencerdaskan anak secara intelektualitas, tapi lebih kepada membangun secara utuh kepribadian dan karakternya. Banyak ahli yang rupanya sependapat bahwa pendidikan harus memperhatikan ketiga aspek penting, yakni moral, mental, dan fisik. Dari ketiga aspek tersebut yang dianggap paling berperan penting dalam membentuk kepribadian seseorang adalah dari aspek moralnya.

C. DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Rumusan konstitusional tersebut apabila dicermati menegaskan bahwa arah dan tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani rohani, cakap, berilmu, dan kreatif, mengembangkan kemandirian serta menjadi warga negara yang baik. Ini semua dalam rangka membangun watak bangsa yang beradab dan bermartabat.

Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut sangat ideal dan komprehensif, bahkan bisa dikatakan yang terlengkap di dunia. Rumusan tujuan pendidikan tersebut adalah untuk memberikan suasana kebatinan dan semangat serta motivasi bagi setiap komponen manusiawi yang terkait dan terus berusaha untuk mencapai cita-cita yang ideal itu. Dijelaskan pula dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1, butir 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi menurut amanat UU No. 20 Tahun 2003 ini, peserta didik harus didorong untuk aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian yang kuat, akhlak yang mulia serta ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan yang implikasinya pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Berdasarkan pengertian pendidikan sesuai rumusan

UU No. 20 Tahun 2003, maka tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Berdasarkan pengertian dan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Tokoh pendidikan nasional Indonesia, Ki Hadjar Dewantara (2008:26) telah lama menggagas tentang pendidikan nasional, yang mestinya sesuai dengan budaya bangsanya dan bertujuan untuk mencerdaskan masyarakatnya. Seperti diungkapkan dalam pidato sambutannya pada 7 Nopember 1956 saat pemberian gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada sebagai berikut:

Pendidikan nasional ialah pendidikan yang berdasarkan garis-hidup bangsanja (kultur-nasional) dan ditudjukan untuk keperluan perikehidupan (maatschappelijk), yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakjatnja, sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerdjasma dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia.

Jika ditilik dari kutipan tersebut, maka pendidikan nasional menurut Ki Hadjar Dewantara seharusnya berdasarkan kultur nasional dan bertujuan untuk mengangkat derajat negara dan bangsanya.

Tujuan pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara (1951a:59) tidak hanya penguasaan pengetahuan ketrampilan teknikal, tetapi lebih kepada anak itu sendiri yang dapat berkembang mencapai sempurnanya hidup manusia sehingga

bisa memenuhi segala bentuk keperluan hidup lahir dan batin. Buah pendidikan adalah matangnya jiwa, yang akan dapat mewujudkan hidup dan penghidupan yang tertib dan suci dan manfaat bagi orang lain.

Selanjutnya mengenai konsep pendidikan, pengertian pendidikan bagi kita masyarakat di dunia Timur, bertujuan bukan hanya mengisi yang dididik dengan ilmu pengetahuan dan mengembangkan ketrampilannya saja, tetapi juga mengembangkan aspek moral dan agamanya (Harun Nasution, 1998:290). Dari sini terlihat bahwa akar pendidikan kita sejak dulu adalah pendidikan yang berasaskan pada aspek moral dan keagamaan. Konsep ini sejalan dengan konsep manusia yang tersusun dari tubuh, akal, dan hati nurani seperti diyakini oleh orang Timur.

Konsep pendidikan seperti itu menghendaki bukan hanya pengintegrasian nilai-nilai kebudayaan nasional, tetapi juga pengintegrasian ajaran-ajaran agama ke dalam pendidikan. Dengan demikian yang dimaksud dengan nilai-nilai kebudayaan nasional adalah nilai-nilai kebudayaan nasional yang bernafaskan agama. Jika ini yang dimaksud, bukan nilai nasional yang bersifat sekular seperti di Barat, maka pengintegrasian agama ke dalam pendidikan nasional akan sejalan dan sesuai dengan sifat bangsa kita yang agamis. Menurut Harun Nasution (1998:290), keresahan timbul selama ini karena konsep-konsep Barat yang didasarkan atas filsafat yang sekular dibawa melalui pendidikan modern ke dalam masyarakat agamis di Indonesia.

Saat ini kehidupan nasional telah memasuki era global, dari kehidupan global ini akan melahirkan kebudayaan global. Dewasa ini kebudayaan global telah mulai melanda kehidupan global yang tanpa batas. Menurut Tilaar (2000:17), di satu pihak budaya global dapat membuka horizon pemikiran masyarakat, tapi tidak menutup kemungkinan masuknya unsur-unsur kebudayaan global yang negatif akan dapat meracuni kehidupan generasi muda. Oleh sebab itu semakin penting adanya suatu kesadaran akan identitas suatu bangsa. Identitas suatu bangsa merupakan tumpuan yang kuat sebagai benteng pertahanan yang

melindungi pengaruh-pengaruh negatif kebudayaan global. Tugas pendidikan nasional adalah mengembangkan identitas peserta didik agar dia bangga menjadi bangsa Indonesia yang dengan penuh percaya diri memasuki kehidupan global sebagai seorang Indonesia yang berbudaya. Pendidikan memang bukan hanya bertujuan menghasilkan manusia yang pintar dan terdidik saja, tetapi yang lebih penting ialah manusia yang terdidik dan berbudaya (*educated and civilized human being*).

Sejalan dengan pemikiran Tilaar tersebut, menurut Zamroni (2011:3), bahwa pendidikan senantiasa harus sesuai dengan kebutuhan massanya. Orientas pendidikan abad 21 salah satunya menekankan relevansi antara apa yang dipelajari peserta didik dengan kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan ini bisa bersifat kebutuhan ekonomi, sosial, maupun kebutuhan yang lain. Masyarakat di era global saat ini membutuhkan pendidikan yang mampu membekali peserta didik dengan ketahanan moral spiritual dalam menjawab tantangan zaman. Oleh karenanya dibutuhkan satu konsep pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan intelektualitas semata, tapi juga mengedepankan pendidikan nilai-nilai yang berbasis pada agama dan budayanya.

RENSTRA Kementrian Pendidikan Nasional dalam pengembangan sistem pendidikan nasional saat ini lebih menekankan pada masalah institusional yaitu manajemen dan kepemimpinan, bukan pada masalah pokok yaitu pengembangan anak Indonesia. Kepentingan dan kebutuhan anak Indonesia. Tujuan pendidikan menjadi bagaimana organisasi pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efisien sehingga memberikan *profit* yang sebesar-besarnya. Menghilangnya anak Indonesia di dalam proses pendidikan telah menjadikan anak Indonesia sebagai obyek semata-mata, bukan lagi di dalam proses humanisasi atau pemanusiaannya, tetapi anak Indonesia dijadikan alat untuk menggulirkan tujuan ekonomis, yaitu pertumbuhan, ketrampilan, dan skill yang dituntut dalam pertumbuhan ekonomi (Tilaar, 2006:14-19). Jika dicermati, hal ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita pendidikan Ki Hadjar Dewantara

tentang pendidikan nasional Indonesia. Menurut Ki Hadjar Dewantara (1977a:10-11) pendidikan nasional adalah pendidikan yang mencerdaskan tidak saja secara lahiriah, tapi juga rohaniannya, untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karenanya, siswa diposisikan sebagai subyek didik, bukan hanya sebagai obyek.

Apabila dicermati dari perjalanan sejarahnya, setidaknya ada tiga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang pernah dimiliki Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya lebih di kenal dengan nama UUSPN, dan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama UU SISDIKNAS.

Undang-Undang no 4 tahun 1950 pernah menjadi perdebatan karena dianggap belum mencerminkan harapan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Undang-Undang ini akhirnya menuai protes dari berbagai kalangan umat Islam dan akhirnya dilakukan perubahan. Inti perubahan ini karena undang-undang pendidikan agama dikesampingkan. Tidak dipungkiri pula bahwa undang-undang tahun 1950 masih diwarnai dengan undang-undang kolonialisme warisan Belanda.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 yang kurang memihak kepada pendidikan Islam, maka isu pendidikan agama ramai dibicarakan dan diperdebatkan. Akumulasi perdebatan ini memberikan pengaruh terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 sebagai Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional "jilid dua" yang disahkan pada tanggal 27 Maret 1989. Dalam undang-undang yang muncul 39 tahun kemudian dari undang-undang pertama ini, pendidikan keagamaan dan pendidikan agama mulai mendapat tempat yang cukup signifikan di bandingkan dengan sebelumnya. Pendidikan keagamaan diakui sebagai salah satu jalur pendidikan sekolah (UU No. 2 Tahun 1989 Pasal 11 ayat 1 dan 6, dan Pasal 15 ayat), Pendidikan agama menjadi mata

pelajaran wajib dalam setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan (UU No. 2 Tahun 1989 Pasal 39). Lebih dari itu, undang-undang ini menjadikan keimanan dan ketakwaan sebagai tujuan pendidikan nasional (UU No. 2 Tahun 1989 Pasal 4). Keimanan dan ketakwaan adalah terminologi yang sangat identik dan akrab dengan pendidikan agama dan keagamaan.

Terlihat ada kecenderungan yang kuat dalam menganut aliran neopositivisme di dalam pendidikan nasional. Aliran neopositivisme ini menurut Tilaar (2006:20) artinya hanya yang berguna, yang nyata, yang dapat memberi faedah yang tampak yang dapat dijadikan sebagai program pendidikan. Idealism menjadi tidak ada, pendidikan lebih dipengaruhi oleh paradigma ekonomi. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang meminta biaya yang mahal. Dengan sendirinya pandangan ini akan menutup pintu bagi kelompok yang tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai pendidikan yang berkualitas.

Banyaknya sekolah-sekolah *plus* yang bermunculan, jika diamatai, sejak tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi hanya dapat menerima anak-anak dari golongan keluarga kaya saja. Dengan terselubung kurikulum internasional serta mempekerjakan guru-guru *ekspatriat* serta menjanjikan kesinambungannya dengan pendidikan tinggi di luar negeri, sekolah tersebut hanya bisa dimasuki oleh anak-anak dari kalangan atas saja.

Pendidikan sebaiknya disesuaikan dengan konteks dimana pendidikan tersebut dilaksanakan. Revolusi pendidikan itu perlu, namun harus berdasar pada habitus seseorang yaitu masyarakat setempat. Revolusi pendidikan yang hanya sebagai suatu revolusi seperti yang saat ini terjadi dengan meninggalkan nilai-nilai positif pada masa lalu, akan menyebabkan *chaos* di dalam kehidupan. Seorang sosiolog dari Prancis Pierre Bourdieu (1996) menyebutkan pentingnya modal budaya dalam kehidupan masyarakat. Terbentuknya modal budaya tersebut antara lain adalah hasil pendidikan. Proses pendidikan bukan hanya sekedar transmisi budaya tetapi juga dekonstruksi dan rekonstruksi budaya.

Peranan pendidikan yang mentransformasikan nilai-nilai budaya telah ditunjukkan dalam studinya tentang suku Kabila di Afrika yang tampak pula dalam kehidupan modern di kota-kota besar Eropa.

Proses pendidikan dalam membentuk karakter bangsa tidak akan lepas dari budaya lokal yang berupa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dimana dia tinggal. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki rasa kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi, mestinya pemerintah dalam menyusun rencana pendidikan dan pengajaran (kurikulum) lebih mengutamakan pada materi yang mampu membentuk karakter anak Indonesia menjadi anak yang cinta tanah air dan bangsanya. Sehingga anak-anak mampu menghargai nilai-nilai moral dan budaya bangsanya sendiri, bukan mendewakan atau bangga dengan budaya bangsa lain, sehingga ia menirunya dan melupakan adat budaya bangsanya sendiri.

Visi pendidikan di Indonesia sebenarnya telah digagas oleh para tokoh pendidikan Indonesia dan dirumuskan secara tegas dalam tujuan pendidikan nasional dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 sebagai prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah yang cenderung menekankan pada pendidikan intelektual, sangat tidak mendukung pencapaian tujuan nasional dan menyimpang dari hakekat pendidikan. Untuk mengantisipasi hal itu, perlu ada upaya pembenahan pendidikan secara menyeluruh, terutama untuk menghadapi dunia global yang terus bergulir tanpa mengenal batas-batas kemanusiaan, pengaruh kapitalisme dan materialisme yang merasuk dalam dunia pendidikan saat ini. Menjadi suatu hal yang penting untuk mengkaji kembali konsep-konsep atau pemikiran pendidikan para tokoh pendidikan kita di masa lalu untuk menjawab tantangan masa ini dan masa yang akan datang.

D. ALIRAN-ALIRAN DALAM PENDIDIKAN

Makna pendidikan sangat luas, dan setiap orang dengan pandangan tertentu merumuskan arti pendidikan berbeda dari rumusan pendidikan yang juga dirumuskan oleh seorang ahli dengan pandangan yang berbeda pula. Begitu pun kalau secara khusus kita kuatkan dengan proses pendidikan sebagai proses pembinaan peserta didik sebagai subjek didik. Perbedaan dalam memaknai hakikat pendidikan tersebut sebenarnya dilatarbelakangi oleh dasar aliran yang berbeda dalam memandang pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini terdapat beberapa aliran klasik dalam pendidikan, yaitu:

1. Aliran Nativisme

Tokoh aliran ini adalah *Schopenhauer* (Jerman: 1788-1860). Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir; pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Potensi yang dibawa sejak lahir atau pembawaan inilah yang sepenuhnya mempengaruhi perkembangan anak, yang baik akan menjadi baik, dan yang jelek akan menjadi jelek. Menurut kaum nativisme tersebut, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan, sehingga percuma saja kita mendidik, atau dengan kata lain pendidikan tidak diperlukan. Dalam ilmu pendidikan hal ini disebut *pesimisme pedagogis*.

2. Aliran Empirisme

Tokoh dari aliran ini adalah John Locke (Inggris: 1632-1704). Pandangan aliran ini berlawanan dengan kaum nativisme, karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya, atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Menurut aliran ini, manusia dilahirkan putih bersih seperti kertas putih, tidak membawa potensi apa-apa. Perkembangan selanjutnya tergantung dari pendidikan dan atau lingkungannya. Dalam artian, bahwa manusia dapat dididik

menjadi apa saja (ke arah yang baik maupun sebaliknya), menurut kehendak lingkungan atau pendidiknya. Dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama *optimisme pedagogis*. Dalam hal ini pendidik memegang peranan yang sangat penting dengan menyediakan lingkungan pendidikan dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman (*empiri*: pengalaman).

3. Aliran Naturalisme

Tokoh aliran ini adalah JJ. Rousseau (Prancis: 1712-1778). *Nature* artinya adalah alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Hampir senada dengan aliran nativisme, maka aliran ini berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak (manusia) sejak dilahirkan adalah baik. Perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh/pendidikan itu baik, akan menjadi baik, tapi jika pengaruh itu jelek, akan jelek pula hasilnya. Seperti dikatakan oleh tokoh aliran ini JJ. Rousseau: “...semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari tangan Sang Pendipta, tetapi semua menjadi rusak di tangan manusia”. Artinya, anak hendaknya dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya, manusia atau masyarakat jangan banyak mencampurinya.

4. Aliran Konvergensi

Tokoh dari aliran ini adalah William Stern (Jerman: 1871-1939), yang berpendapat bahwa anak sejak lahir telah membawa pembawaan atau potensi-potensi, namun dalam perkembangan selanjutnya ditentukan bersama baik oleh pembawaan maupun lingkungan atau pendidikan. pembawaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak ada dukungan pendidikan dan atau lingkungan. Sebaliknya pendidikan dan atau lingkungan tidak akan berhasil baik manakala pada diri anak tidak ada pembawaan yang mendukungnya. Menurut Stern, pendidikan tergantung dari pembawaan dan lingkungan, seakan ada dua garis lurus yang menuju ke suatu titik temu (*convergen*: menuju ke suatu titik).

Aliran konvergensi pada umumnya dapat diterima secara luas, walaupun masih ada juga beberapa kritik terhadapnya.

Aliran konvergensi dikritik sebagai aliran yang cocok untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kalau bibitnya baik dan lingkungannya baik maka hasilnya pasti baik. Padahal bagi manusia hal itu belum tentu, karena masih ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu pilihan atau seleksi dari yang bersangkutan.

5. Tut Wuri Handayani

Konsep ini berasal dari Ki Hadjar Dewantara, seorang pakar pendidikan Indonesia, sekaligus pendiri Perguruan Taman Siswa. Tut Wuri Handayani berasal dari bahasa Jawa, "Tut Wuri" berarti "mengikuti dari belakang", dan "handayani" berarti "mendorong, memotivasi, atau membangkitkan semangat". Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aliran ini mengakui adanya pembawaan, bakat, maupun potensi-potensi yang ada pada anak sejak lahir. Dengan kata "tut wuri" berarti pendidik diharapkan dapat melihat, menemukan, dan memahami bakat atau potensi-potensi apa yang timbul dan terlihat pada anak didik, untuk selanjutnya dapat dikembangkan dengan memberikan motivasi atau dorongan ke arah pertumbuhan yang sewajarnya dari potensi-potensi tersebut.

Dibandingkan dengan keempat aliran pendidikan yang telah dibahas sebelumnya, tut wuri handayani lebih mirip dan dekat dengan aliran konvergensi dari William Stern, yang berpendapat bahwa perkembangan anak (manusia) ditentukan oleh bagaimana interaksi antara pembawaan atau potensi-potensi yang dimiliki anak yang bersangkutan dan lingkungan ataupun pendidikan yang mempengaruhi anak dalam perkembangannya. Dengan kata lain, sifat-sifat dan ciri-ciri anak (manusia) dalam perkembangannya ada yang lebih ditentukan oleh pembawaannya, dan ada pula yang lebih ditentukan oleh lingkungannya, tergantung kepada mana yang lebih dominan dalam interaksi antara keduanya.

Tut wuri handayani merupakan bagian dari konsep kependidikan Ki Hadjar Dewantara yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Ing ngarso sung tulodo

Ing madyo mangun karso

Tut wuri handayani

Ing ngarso sung tulodo artinya jika pendidik sedang berada didepan maka hendaklah memberikan contoh teladan yang baik terhadap anak didiknya. *Ing ngarso*: di depan, *sung*: asung = memberi, *tulodo*: contoh/teladan yang baik. *Ing madyo mangun karso* berarti jika pendidik sedang berada di “tengah-tengah” anak didiknya, hendaknya ia dapat mendorong kemauan atau kehendak mereka untuk berinisiatif dan bertindak. *Ing madyo*: di tengah; *mangun*: membangun, menimbulkan dorongan; *karso*: kehendak atau kemauan. Ditambah dengan *tut wuri handayani* yang telah diuraikan sebelumnya, maka ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh.

BAB II

PENDIDIKAN JAMAN PERGERAKAN: MASA KOLONIAL BELANDA

A. LANDASAN FILSAFAT

Pendidikan adalah anak zaman, ia dilahirkan dan dibesarkan oleh zaman, ia merupakan bangunan atas suatu zaman yang berbasis sistem ekonomi. Zaman ialah kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu masyarakat atau suatu bangsa dalam kurun ruang dan waktu tertentu. Zaman berubah dan berkembang, pendidikan ikut berubah dan berkembang. Rancang bangun pendidikan harus sesuai dengan zaman yang melahirkannya. (Darsono Prawiro Negoro, 2010: 183).

Menurut Rianti Nugroho (2008: 15-16) pendidikan modern di Indonesia dimulai sejak akhir abad ke-18, ketika penjajah Belanda mengakhiri politik tanam paksa menjadi politik etis, sebagai akibat kritik dari kelompok sosialis di negeri Belanda yang mengecam praktik tanam paksa yang menyebabkan kesengsaraan maha dahsyat di Hindia Belanda. Pendidikan “ongko loro” diperkenalkan bukan saja sebagai elaborasi terhadap desakan kaum sosialis di negeri Belanda, namun juga didasari kebutuhan pemerintah pendudukan untuk mendapatkan pegawai negeri jajaran rendah di dalam administrasi pendudukannya. Pendidikan yang digerakkan oleh penjajah belanda kemudian ditiru dan dikembangkan oleh kaum nasionalis Indonesia.

Di zaman kolonialisme, pendidikan sebagai cermin dari sistem ekonomi kolonial yang bersifat penghisapan bangsa atas bangsa. Pendidikan dirancang oleh kekuasaan politik kolonialisme yang bersifat diskriminatif. Pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu pendidikan bagi kaum kolonialis dan pendidikan bagi bangsa terjajah atau kaum pribumi.

B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Pada akhir abad ke-18 menjelang abad ke-19, perusahaan VOC mengalami kemunduran sehingga tidak dapat berfungsi sebagai lembaga yang mengatur pemerintahan dan masyarakat di daerah Hindia Timur. Pemerintahan diserahkan kepada pemerintahan Belanda yang selanjutnya mengatur masyarakat dan pemerintahan di daerah jajahannya. Bersamaan dengan itu peristiwa tersebut terjadi pulalah perubahan pandangan tentang prinsip pendidikan baik di Eropa maupun di Hindia Belanda sendiri. Akibatnya timbullah prinsip pendidikan di daerah kolonial sebagai berikut.

Pemerintah colonial berusaha tidak memihak salah satu agama tertentu.

Pendidikan diarahkan agar para tamatannya menjadi pencari kerja, terutama demi kepentingan kaum penjajah.

Sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat.

Pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elite-sosial (penjilat penjajah) Belanda.

Dasar pendidikannya adalah dasar pendidikan Barat dan berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan Barat.

Bermula dari prinsip inilah pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan diutamakan pada anak-anak bangsawan bumi putera serta tokoh-tokoh terkemuka dan pegawai kolonial yang diharapkan kelak mereka akan menjadi penyambung tangan-tangan penjajah sebagai upaya Belanda untuk memerintah secara tidak langsung kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. (Ary H. Gunawan, 1985: 11).

1. Pengaruh “Aufklärung”

Tiupang angin “Aufklärung” pada abad ke -18 dari Eropa memberikan cuaca cerah kepada pendidikan di Indonesia. Paham “Aufklärung” menjadi pelopor dari sistem pendidikan bar, yaitu pendidikan yang diselenggrakan oleh negara yang

kemudian menjelma dalam bentuk sekolah-sekolah negeri. Berbeda dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja atau penganut agama tertentu yang mengutamakan bagi warga gereja atau penganut agamanya masing-masing, maka paham baru tersebut memperkenalkan sistem pendidikan untuk masyarakat atau rakyat banyak yang membebaskan kewajiban itu kepada negara (pemerintah) (Ary H. Gunawan, 1985: 12).

Sebagai pengaruh dari "*Aufklärung*" terhadap pendidikan di Indonesia adalah diterbitkannya Keputusan Raja Belanda tertanggal 30 September 1848 no 95, yang member wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk menyediakan biaya f.25.000,- setahun bagi pendirian sekolah-sekolah bumiputera di pulau Jawa dengan tujuan untuk mendidik calon-calon pegawai negeri. (Ary H. Gunawan, 1985: 12).

Berdasarkan Keputusan Raja tanggal 28 September 1892, termuat dalam Lembaran Negara (Staatblad) nomor 125 tahun 1893, terjadi reorganisasi pada kebijakan pendidikan dasar sebagai berikut. Sekolah dasar Bumiputera dibedakan menjadi:

- a. Sekolah Dasar Kelas Satu (De Eerstse School) adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak para pemuka, tokoh terkemuka, dan orang-orang terhormat bumiputera.
- b. Sekolah Dasar Kelas Dua (De Tweede Klasse School) adalah sekolah bagi anak-anak bumiputera pada umumnya, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat biasa pada umumnya (Ary H. Gunawan, 1985: 13).

Sekolah Dasar Kelas Satu itu kemudian menjadi ELS (Europe Lagere School), untuk anak-anak orang Belanda di Indonesia dan anak bangsawan; HIS (Hollandsch Inlandsche School), untuk anak-anak tokoh bumiputera, anak-anak pegawai negeri (ambtenaar) yang bergaji sekurang-kurangnya f.75,- sebulan atau bertitle Raden (Ary H. Gunawan, 1985: 16).

Di samping kedua Sekolah Dasar Negeri elite tersebut terdapat pula sekolah elite di Tondano (1865-1872 sebagai percobaan) dan di Bandung, Magelang, dan Probolinggo (1878) yang sering disebut dengan "Sekolah Raja" (*Hoofdenschool*). Terdapat tingkatan lanjutan Sekolah Raja, yaitu MOSVIA (setingkat SMTA) atau *Middelbare Opleiding School Voor Indische Anbtenaren*. Selain itu juga didirikan sekolah kejuruan seperti Sekolah Pertukangan dan Sekolah Pendidikan Guru (*Kweekschool*).

Pemerintah Belanda juga mendirikan sekolah bagi wanita, yaitu (*Hollandsch Burgelijke School*) untuk gadis Betawi. Selain itu didirikan pula Sekolah Dokter (Ary H. Gunawan, 1985: 18).

2. Penerapan Politik Pendidikan Liberal di Hindia Belanda

Timbulnya Partai Liberal di negeri Belanda akibat "Aufklärung" pada abad ke-18 di Eropa telah mendominasi kehidupan ketatanegaraan dan politik praktis di negeri Belanda. Paham liberalism ini juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan di Hindia Belanda sejak abad ke-19.

Pada tahun 1867 dalam pemerintahan Hindia Belanda dibentuk suatu departemen tersendiri yang mengurus masalah pendidikan, agama dan kerajinan, yang disebut "Departement van Onderwijs en Eeredienst" (Departemen Pengajaran dan Kepentingan Kehormatan). Tujuannya agar penduduk bumiputra, cina, dan golongan lainnya berkesempatan memperoleh pendidikan barat, sebagai dasar juga untuk pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. (Ary H. Gunawan, 1985: 20)

3. Kebijakan Pendidikan akibat Politik Etis

Kebijakan pendidikan yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda melalui Politik Etis, yaitu sebagai berikut.

- a. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk bumiputera, untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
- b. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

C. SISTEM PENDIDIKAN

Semasa zaman kolonial, menurut catatan sejarah di Nusantara ini telah terdapat beragam sistem pendidikan, ada beberapa pendidikan pesantren tradisional (pendidikan agama) juga sistem persekolahan yang dibawa Belanda. Sampai awal abad ke-20 sistem persekolahan belum banyak diminati di kalangan penduduk pribumi. Pemerintah kolonial Belanda berusaha menata masyarakat penduduk pribumi untuk masuk dalam sistem pendidikan barat (Agus Salim, 2007: 201).

1. Pendidikan bagi Anak Belanda

Sekolah pertama bagi anak Belanda dibuka di Jakarta pada tahun 1817 yang segera diikuti oleh pembukaan sekolah di kota-kota lain di Jawa. Jumlahnya meningkat dari 7 (tahun 1820), 19 (tahun 1835), 25 (tahun 1845) dan 57 (tahun 1857). Prinsip yang dijadikan pegangan tercantum di Statuta 1818 bahwa sekolah-sekolah harus dibuka “di tiap tempat bila diperlukan oleh penduduk Belanda dan diizinkan oleh keadaan” atau secara lebih khusus, bila jumlah murid mencapai 20 di Jawa atau 15 di luar Jawa. Seorang inspektur pendidikan diangkat dan pada tahun 1830 telah terdapat sekolah di kebanyakan kota. Pada akhir abad ke-19 hampir tercapai taraf pendidikan universal bagi anak-anak Belanda di seluruh Indonesia. Anak-anak yang tak mampu dapat dibebaskan dari pembayaran uang sekolah (S. Nasution, 2008: 9).

Suatu sekolah menengah didirikan pada tahun 1860 yang membuka kesempatan bagi anak-anak Belanda untuk melanjutkan pelajarannya di

universitas di negeri Belanda, atau untuk menduduki tempat yang tinggi dalam pemerintahan. Suatu ciri yang khas dari pemerintah kolonial, yaitu fasilitas pendidikan yang bermutu tinggi senantiasa dipertahankan selama masa kolonial yang menjaga agar anak-anak Belanda selalu mendapat pendidikan yang lebih baik daripada anak Indonesia.

Europese Lagere School (ELS)

ELS pertama di dirikan pada tahun 1817 di Batavia (Jakarta). Sekolah serupa ini boleh di dirikan di tiap tempat asal jumlah muridnya mencapai 20 di Jawa dan 15 di luar Jawa. Pada tahun 1920 jumlah ELS telah meningkat menjadi 196 buah. Sejak pertengahan abad ke 19 kebanyakan orang Belanda telah menyekolahkan anaknya dan tak lama kemudian telah tercapai pendidikan universal bagi penduduk berkebangsaan Belanda. Ini hanya mungkin dengan usaha dan dukungan penuh dari pemerintah, dengan membuat ijazah ELS syarat untuk jabatan pemerintah, dan mendatangkan guru secukupnya dari negeri Belanda.

Sekolah ini yang semula dimaksud untuk anak-anak miskin mula-mula bermutu rendah karena guru yang kurang berwenang dan latar belakang murid yang kurang baik. Orang tua yang berada, yang tidak menginginkan anaknya bercampur dengan anak-anak golongan rendah lebih suka mengirim anaknya ke negeri Belanda atau sekolah swasta. Maka di rasakan perlunya sekolah khusus untuk anak-anak dari golongan tinggi dan pada tahun 1833 di dirikan Eerste Europese Lagere School (ELS pertama) yang memungut uang sekolah cukup tinggi yakni f 6,- sebulan. Mereka yang tidak sanggup harus memasuki ELS bukan pertama, ELS pertama, yang menyajikan pendidikan yang lebih tinggi mutunya, tidak menerima anak-anak Indonesia sekalipun anak ningrat tinggi.

ELS menentukan pola sekolah rendah 7 tahun, yang kemudian di ikuti HCS dan HIS, sehingga sekolah-sekolah khusus untuk pribumi seperti Volksschool dan Vervolgschool senantiasa dalam keadaan tidak lengkap dan dengan demikian tidak

memperoleh kesempatan untuk kelanjutan pelajaran ke sekolah menengah berbahasa Indonesia.

Bagi anak Indonesia sekolah yang bercorak barat tak mungkin menjadi sekolah umum bagi seluruh rakyat, karena akan menjauhkan anak dari kebudayaannya. Lagi pula mempelajari bahasa Belanda sukar dan menelan waktu banyak. Kesadaran tidak menguasai bahasa Belanda sepenuhnya senantiasa mencekam orang Indonesia dengan rasa inferioritas dalam menghadapi orang Belanda yang pada umumnya menuntut bahasa Belanda yang murni.

Kurikulum ELS yang sebagian besar di tetapkan di Neterland tak mungkin relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Namun ELS tetap di pertahankan demi kepentingan segelincir anak yang mungkin kembali ke tanah airnya.

Hogere Burgerschool (HBS)

Sejak tahun 1839 tentang perlunya sekolah menengah di Indonesia sehingga anak-anak tidak perlu lagi pergi ke Neterland. Pada tahun 1848 tokoh-tokoh di Indonesia mengadakan rapat di Batavia untuk mengajukan permohonan kepada raja Belanda agar didirikan sekolah menengah.

Tujuan sekolah ini untuk mempersiapkan siswa masuk ke universitas dan untuk jabatan yang tidak memerlukan diploma universiter.

Pada tahun 1867 didirikan HBS pertama di Jakarta, 1875 di Surabaya, 1877 di Semarang. HBS Surabaya dan Semarang yang sedianya lamanya 3 tahun menjadi 5 tahun pada tahun 1879. Pada tahun 1882 didirikan HBS 3 tahun untuk anak wanita di Jakarta.

Kurikulum HBS di Indonesia tak sedikit pun berbeda dengan yang di negeri Belanda. Kurikulum ini dirasa mantap tanpa banyak mengalami perubahan selama eksistensinya dan dapat bertahan terhadap berbagai kritik.

Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)

Tahun 1903 adalah tahun pendirian kursus MULO yang disambut baik oleh kaum Indo-Belanda dan mereka yang tidak sanggup menyekolahkan anaknya ke HBS yang dianggap mahal. MULO juga dianggap dapat memungkinkan lulusannya bekerja di kantor pemerintahan. (Sukardjo dan Ukim Komarudin, 2009: 127)

Pada tahun 1914, kursus MULO diubah menjadi sekolah MULO. Sekolah ini merupakan sekolah pertama yang tidak mengikuti pola pendidikan yang berorientasi ke Barat dan tidak mencari penyesuaian dengan Indonesia. Kalangan tertentu menginginkan MULO dikhususkan bagi anak-anak Belanda, akan tetapi diputuskan agar MULO menjadi lembaga pendidikan untuk semua.

Sekolah Pertukangan (Ambachtschool)

Sekolah kejuruan pertama di Hindia Belanda diusahakan oleh swasta, dan dibuka pada tahun 1856 di Batavia. Sekolah Kristen yang lebih bercorak sekolah dasar dengan ciri-ciri pertukangan ini bertujuan untuk membantu golongan peranakan Indo-Belanda agar dapat mencari kehidupan yang layak. Sekolah pertukangan pertama yang diusahakan oleh pemerintah dibuka pada tahun 1860 di Surabaya. Sekolah ini diperuntukkan bagi golongan Eropa.

2. Pendidikan Bagi Warga Bumi Putera

Ide-ide liberal yang diterapkan bagi anak-anak Belanda dengan menyediakan fasilitas pendidikan secukupnya, tidak dilakukan bagi anak-anak Indonesia. Karena pemerintah hanya bertanggung jawab membuat peraturan tanpa kewajiban menyediakan sekolah.

Pendidikan bagi anak Indonesia tidak diabaikan sepenuhnya. Daendels dan Van Der capellen menganjurkan pendidikan rakyat. Tetapi tidak berhasil untuk mengembangkan pendidikan, hanya 2 sekolah didirikan.

Awal abad 18, pemerintah Belanda tak menyediakan satu sekolahpun bagi anak Indonesia. Agar menghormati bumiputera serta lembaga-lembaga mereka dan alasan finansial akibat Perang Diponegoro.

Kesulitan keuangan ini menyebabkan raja Belanda menggunakan kerja paksa untuk memperoleh keuntungan maksimal. Sistem ini membuka kesempatan berbagai penyalahgunaan yang melampaui batas kemanusiaan. Tetapi kekejaman ini menimbulkan keuntungan. Yaitu memperkerjakan orang bumiputera untuk menjaga perkebunan, pemerintah sedapatnya harus memberi pendidikan. 1848, pertama kalinya diberikan sejumlah £ 25.000 untuk pendirian sekolah bagi anak bumiputera.

Saat itu, pemerintahan dipegang oleh kaum liberal yang mempunyai pendidikan yang lebih luas. Walter Robert Baron van Hoevell yang datang ke Indonesia, berbuat banyak untuk menarik perhatian rakyat Belanda pada keadaan yang menyedihkan di Indonesia. 1870 Sistem tanam Paksa dihapuskan dan digantikan Undang-undang Agraria 1870 yang memungkinkan pihak swasta menyewa tanah selama 75 tahun.

Tahun 1852, sekolah Pendidikan Guru dibuka pertama kali didirikan pula Departemen pendidikan, Agama dan Industri.

Setelah 1870, ekonomi memburuk, membuat Belanda memotong gaji guru dan timbul kecenderungan untuk menyerahkan pendidikan ke swasta untuk meringankan beban finansial. Mensubsidi sekolah dianggap lebih murah daripada memelihara sekolah pemerintah.

3. Sekolah-sekolah untuk Bumi Putera

a. Sekolah Kelas Satu

Krisis gula tahun 1885 menimbulkan kerugian. Pengeluaran dibatasi, biaya pendidikan dikurangi, sejumlah sekolah guru harus ditutup dan perluasan sekolah rendah segera dihentikan.

Groenevelt menganjurkan 2 jenis sekolah, yaitu sebagai berikut.

- 1). Sekolah Kelas Satu untuk anak golongan atas yang akan menjadi pegawai
- 2). Sekolah Kelas Dua untuk penduduk selebihnya

Kurikulum sekolah ditentukan sebagaimana peraturan dalam 1893 terdiri atas mata pelajaran membaca dan menulis dalam bahasa daerah dalam huruf daerah dan latin, membaca dan menulis dalam bahasa Melayu, berhitung, ilmu bumi Indonesia, ilmu alam, sejarah pulau tempat tinggal, menggambar dan mengukur tanah.

Sekolah kelas satu tidak popular di kalangan priyayi karena tidak memberikan bahasa Belanda dan tidak membuka kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan. ELS masih satu-satunya lembaga bagi mereka yang menginginkan sekolah lanjutan, setelah diperlunak, bertambah banyaklah peminat. Untuk meringankan beban ELS, bahasa Belanda dimasukkan di Sekolah Kelas Satu. Namun tidak seperti yang diharapkan karena adanya diskriminasi terhadap anak Indonesia.

b. Sekolah Kelas 2

Sekolah Kelas Dua tidak berkembang menjadi sekolah umum bagi seluruh rakyat. Karena diperluasnya program dan sekolah ini menjadi sama dengan sekolah Kelas Satu, pemerintah tidak dapat memikul akibat finansial dan bila terbentuk sejumlah manusia yang menjauhkan diri dari kehidupan desa dan kasar dengan menginginkan pekerjaan kantor. Tahun 1907, Gubernur Jendral Van Heutz "menemukan kembali" Sekolah Desa, yang memberikan pendidikan besar-besaran dengan biaya sekecil-kecilnya.

c. Sekolah Desa

Sekolah Desa adalah perwujudan hasrat pemerintah untuk menyebarkan pendidikan seluas mungkin dengan biaya serendah mungkin di kalangan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mejamin keberhasilannya pemerintah harus memberikan bantuan keuangan.

Sekolah desa ternyata dapat berkembang menurut ukuran yang tak kunjung tercapai oleh tipe sekolah lain selama penjajahan Belanda.

Sekolah desa menjadi usaha pendidikan terbesar yang pernah di jalankan oleh Belanda untuk memberi kesempatan kepada masyarakat banyak untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung.

Kurikulum ditentukan dan di kuasai oleh pemerintah yang menginginkan kurikulum yang sesederhana mungkin sehingga lulusannya tak mampu melakukan pekerjaan administrasi dikantor dan arena itu tidak akan meninggalkan desanya.

Maka tujuan utama sekolah ini adalah memberantas buta huruf. Tujuan ini pun tidak tercapai karena jumlah kelahiran senantiasa melebihi jumlah kelulusan. Agar dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk maka tiap tahun di perlukan penambahan sekolah sebanyak 500 – 900 buah.

Kurikulum sekolah ini ternyata tidak memadai bagi kebanyakan anak yang makin lama makin banyak memasuki Sekolah Kelas dua untuk menyambung pelajaran, sehingga akhirnya Sekolah Desa menjadi substruktur bagi Sekolah Sambilan (Sekolah standar) yang sama dengan kedua kelas terakhir Sekolah Kelas Dua.

Sekolah desa sering di kecam karena kurikulumnya yang sederhana dan mutu guru dan pendidikannya yang rendah. Namun sekolah ini juga mengandung keuntungan dalam menambah orang melek huruf dan kepala kampung atau juru tulis yang tidak dapat membaca dan menulis menjadi sesuatu yang langka. Sekolah desa membawa pendidikan formal sampai ke tiap desa kecil dan terpencil dan menjadi badan penyebar buah pikiran dan pengetahuan barat, mendorong rakyat agar menjadi lebih sadar akan pendidikan sekolah dan meletakkan dasar untuk pendidikan universal.

d. Holland Inlandse School (HIS)

Alasan prinsip bagi pendirian HIS adalah keinginan yang kian menguat di kalangan orang Indonesia untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan

Barat.Keinginan itu adalah konsekuensi yang wajar dari perubahan sosial politik di Timur Jauh.

Kurikulum HIS seperti tercantum dalam Statuta 1914 No. 764 meliputi semua mata pelajaran ELS, bahkan lebih kaya dengan adanya mata pelajaran menulis bahasa Melayu dan Arab, secara fleksibel.

Kurikulum HIS seperti halnya ELS tidak banyak mengalami perubahan. Kurikulum ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak dan masyarakat Indonesia akan tetapi berorientasi pada Nederland.

e. Algemene Middelbare School (AMS)

Pendirian MULO sebagai lanjutan segala macam sekolah rendah yang berorientasi Barat, khususnya HIS merupakan langkah yang sangat penting dalam perkembangan suatu sistem pendidikan yang lengkap di Indonesia.Langkah berikutnya dibukanya AMS.

Sekolah menengah ini merupakan super-struktur MULO yang terbagu atas bagian A yang mengutamakan Sastra dan Sejarah dan bagian B yang mengutamakan Matematika dan Fisika. Bagian A dibagi lagi menjadi A1 untuk studi Klasik Timur dan bagian A2 untuk studi Klasik Barat

f. Sekolah Raja (Hoofdenschool)

Sejalan dengan kebutuhan pemerintah kolonial untuk memperoleh tenaga terdidik dari golongan bangsawan pribumi yang akan dilibatkan dalam pekerjaan administrasi pemerintahannya, maka didirikan Sekolah Raja di Tondano pada tahun 1865 dan 1875. Sekolah itu kemudian didirikan juga di Bandung, Magelang, dan Probolinggo pada tahun 1875. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu dan Belanda. Setelah mengalami percobaan dan perubahan pada tahun 1900, Sekolah Raja diberi nama OSVIA (*Opleiding School voor Indische Ambtenaren* atau Sekolah untuk Pendidikan Pribumi). Sekolah ini kemudian

ditingkatkan menjadi sekolah menengah yang disebut MOSVIA (*Middelbaar Opleiding School voor Indische Ambtenaren*).

g. Sekolah Pendidikan Guru (Kweekschool)

Sekolah Pendidikan Guru di Hindia Belanda mula-mula diselenggarakan oleh *zending* di Ambon pada tahun 1834. Sekolah ini berlangsung sampai 30 tahun (1864) dan dapat memenuhi kebutuhan guru pribumi bagi sekolah-sekolah yang ada waktu itu. Sekolah seperti itu diselenggarakan oleh *zending* di Minahasa pada tahun 1852 dan 1855 dibuka satu lagi di Tanahwangko (Minahasa). Bahasa pengantar yang digunakan sekolah di Ambon dan Minahasa adalah bahasa Melayu.

4. Pendidikan Bagi Warga Cina

Jika memang harus disebutkan layanan pendidikan khusus untuk orang-orang Cina bisa dikatakan hanyalah satu sekolah, yakni *Hollands Chinese School* (HCS). Jika ditelusuri lebih lanjut berdirinya HCS bukan karena inisiatif pemerintah tetapi karena desakan dari pihak warga Cina yang menginginkan pendidikan yang merata dan lebih baik.

Pendirian HCS menunjukkan dengan jelas bagaimana sekolah digunakan sebagai alat politik untuk mencegah orang Cina menjadi tak loyal terhadap pemerintah Belanda. Sikap acuh tak acuh akan pendidikan anak-anak Cina tiba-tiba berubah menjadi minat yang besar akan pendidikan, mereka, di paksa oleh perubahan konstelasi politik di timur jauh. Rasa takut akan kehilangan loyalitas Cina mendorong Belanda untuk menawarkan kesempatan belajar yang paling baik yang ada, yakni HCS yang membuka kesempatan untuk memasuki MULO maupun HBS. HCS mempunyai dasar yang sama dengan ELS Bahasa Perancis biasanya di ajarkan pada sore hari seperti halnya dengan bahasa Inggris, yang sebenarnya tidak di ajarkan pada ELS, namun di ajarkan berhubung dengan kepentingan bagi perdagangan.

D. PESERTA DIDIK

1. Pendidikan Bagi Anak Belanda

a. Peserta Didik Europese Lagere School (ELS)

Semua anak orang Eropa dan mereka yang secara legal dipersamakan dengan orang Eropa berhak untuk memasuki dan menjadi peserta didik Europese Lagere School (ELS).

b. Peserta Didik Hogere Burgerschool (HBS)

HBS dimaksud bagi murid-murid Belanda dan golongan baik yang sanggup menyekolahkan anaknya ke ELS kelas satu, yang mengajarkan bahasa Perancis sebagai syarat masuk HBS disamping ujian masuk. (S. Nasution, 2008: 134).

- ***Peserta Didik Menurut Seks***

Pada mulanya HBS tidak menerima peserta didik wanita, dikarenakan banyak tentangan mengenai koedukasi. Selain itu masih terdapat anggapan bahwa penerimaan peserta didik wanita akan menimbulkan persoalan, sehingga menuai pro dan kontra. Namun pada tahun 1891 akhirnya terdapat perubahan, yaitu gadis-gadis diperbolehkan dan diterima untuk menjadi peserta didik di HBS. (S. Nasution, 2008: 134)

- ***Peserta Didik Menurut Kebangsaan***

Sewaktu Gymnasium Koning Willem III didirikan pada tahun 1860 semua siswa orang Belanda. Baru 14 tahun kemudian anak Indonesia pertama diterima (1874) dan anak Cina pertama pada tahun 1877.

Jumlah anak Indonesia di HBS pada tahun 1900 hanya 2 %. Tahun 1915 hanya 6.1 % dari 915 peserta didik. Jumlah ini meningkat dikemudian hari akan tetapi tidak kunjung mengancam dominasi anak Belanda. Faktor-faktor yang menyebabkan kecilnya jumlah itu antara lain sulitnya bagi anak Indonesia memasuki ELS *kelas satu* untuk mempelajari bahasa Perancis, tingginya uang

sekolah (f 15,-), tidak adanya hubungan antara HIS dengan HBS dan arena terbukanya kesempatan memasuki MULO (S. Nasution, 2008: 134).

c. Peserta Didik Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)

MULO awalnya sebagai lanjutan ELS selama 10 tahun pertama terutama diikuti oleh anak-anak Belanda. Akan tetapi setelah reorganisasi 1914 sekolah itu terbuka bagi lulusan ELS, HCS, maupun HIS. (S. Nasution, 2008: 125)

- ***Peserta Didik Menurut Kebangsaan***

Pada awalnya peserta didik berasal dari ELS kemudian dalam perkembangannya peserta didik dari HIS-lah yang mendominasi dan merupakan sumber utama peserta didik MULO.

Presentase peserta didik Indonesia meningkat dari 4.8 % (1912) menjadi 24 % (1914) dan hampir sama (1920). Pada tahun 1920 ini jumlah peserta didik non-Belanda melebihi jumlah peserta didik berkebangsaan Belanda dan selanjutnya anak Belanda merupakan minoritas HBS, sebaliknya senantiasa didominasi oleh anak Belanda.

- ***Peserta Didik Menurut Seks***

Karena adat istiadat belum diterimanya ide tentang wanita sebagai pegawai kantor, pertimbangan financial yang mendahulukan anak pria, perkawinan gadis pada usia muda dapat dipandang sebagai alasan maka jumlah peserta didik wanita lebih kecil dari murid pria Indonesia. Pada orang Belanda tidak ditemui keberatan-keberatan serupa itu. Bahkan di MULO anak wanita Belanda senantiasa melebihi jumlah anak pria karena mereka lebih menyukai MULO yang lebih singkat daripada HBS. Pada tahun 1920 jumlah anak wanita Belanda 57%, Indonesia 17.2% dan Cina 14.2 % disbanding dengan jumlah peserta didik pria.

Walaupun presentase murid wanita jauh lebih kecil dibandingkan dengan anak pria, kenyataan bahwa ada peserta didik wanita Indonesia di MULO telah menunjukkan perubahan sikap terhadap pendidikan wanita yang telah merintis jalan ke arah emansipasi wanita.

d. Peserta Didik Sekolah Pertukangan (Ambachtschool)

Sekolah Pertukangan mula-mula diperuntukkan bagi anak-anak Eropa, baru kemudian anak-anak pribumi diperkenankan masuk. Bagi golongan peranakan Indo-Belanda, sesudah kegagalan yang pertama di Batavia, atas prakarsa swasta dibuka lagi sekolah pertukangan di Batavia pada tahun 1886. Untuk golongan Indo-Belanda dan anak-anak serdadu Belanda telah didirikan semacam sekolah pertukangan yang dijuruskan untuk keperluan militer.

2. Pendidikan Bagi Warga Bumi Putera

a. Peserta Didik Sekolah Kelas Satu

Sekolah Kelas Satu ditujukan untuk lapisan atas pribumi, yaitu golongan bangsawan dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, perdagangan, dan perusahaan.

b. Peserta Didik Sekolah Kelas Dua

Setelah didirikannya Sekolah Desa pada tahun 1907, maka Sekolah Kelas Dua menjadi sekolah bagi golongan yang lebih tinggi. Namun karena jumlah golongan atas terlampau kecil untuk memenuhi Sekolah Kelas Dua seperti halnya dengan Sekolah Kelas Satu, maka sebagian besar dari peserta didik berasal dari golongan rendah. Sebagai akibat politik kolonial dan saingan dengan orang Cina, maka di Indonesia tidak berkembang golongan menengah yang kuat. Golongan aristokrasi di luar Jawa begitu kecilnya sehingga tidak merupakan kelompok yang tersendiri. (S. Nasution, 2008: 70)

c. Peserta Didik Sekolah Desa

Setelah pendiriannya sebagai sekolah percobaan tahun 1907, populasi Sekolah Desa meningkat dengan cepat menjadi 70.000 tahun 1910, lebih dari 300.000 tahun 1914 dengan tambahan rata-rata 40.000 peserta didik tiap tahun. Antara tahun 1914 dan 1920 penambahan jumlah peserta didik tidak

begitu besar, antara lain karena seluruh administrasi sekolah dipindahkan dari Departemen Dalam Negeri yang sangat disegani oleh rakyat kepada Departemen Pengajaran dan Agama yang tidak begitu besar otoritasnya dalam pandangan rakyat.

Seperti halnya dengan sekolah-sekolah lain proporsi peserta didik wanita rendah, yakni 63% (1914) dan 10.3% (1919). Akan tetapi tampak penambahan yang menggembirakan. Setidaknya pendidikan bagi wanita terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. (S. Nasution, 2008: 85)

d. Peserta Didik Holland Inlandse School (HIS)

Seperti Sekolah Kelas Satu, HIS dimaksud sbagi sekolah untuk golongan elite. Pada prinsipnya sekolah ini bagi golongan sosial atasan. Namun sangat sukar untuk menentukan siapa yang termasuk golongan ini. Dalam praktik sekolah ini tidak dapat mempertahankan kedudukannya sebagai sekolah elite karena anak-anak golongan atas tidak mencukupi dan lebih menyukai ELS. Walaupun secara resmi diploma HIS sama dengan ELS, dalam masyarakat ELS lebih dihargai. Karena kekurangan peserta didik golongan atas, maka anak golongan rendah memperoleh kesempatan belajar, banyak di antara mereka yang berbakat intelektual kemudian memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dari anak golongan aristokrasi. (S. Nasution, 2008: 116).

- ***Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin***

Sebagian besar peserta didik terdiri atas anak pria. Walaupun emansipasi wanita bertambah populer atas pengaruh *R.A. Kartini* pada akhir abad ke-19, gadis-gadis masih belum dapat menikmati kesempatan belajar yang sama dengan anak pria.

Akan tetapi HIS bagi kebanyakan orang Indonesia merupakan lembaga pendidikan yang mahal. Uang sekolah sama dengan ELS. Kategori pembayaran paling rendah ialah f 36,- per tahun, bagi orang tua yang

berpenghasilan f 3000,- per tahun atau kurang. Lebih dari 90% dari orang tua termasuk golongan ini. Pengobatan yang cukup berat bagi kebanyakan orang tua untuk membiayai sekolah yang cukup mahal.

Pada tahun 1916 populasi HIS seluruhnya berjumlah 20.737 di antaranta 3.338 atau 16% anak wanita, kebanyakan dari golongan atas.

- ***Peserta Didik Menurut Kebangsaan***

Menurut peraturan tidak hanya anak Indonesia akan tetapi anak Cina dapat diterima bila tidak mengakibatkan ditolaknya anak Indonesia yang mempunyai kedudukan sosial yang baik. Selanjutnya anak Cina dikenakan peraturan yang sama dengan anak Indonesia, misalnya tidak boleh lebih dari 2 tahun di kelas yang sama. Anak Belanda dapat diterima tanpa bayaran bila di tempat itu tidak ada ELS.

Jumlah peserta didik HIS bertambah dengan cepat. Pada peresmiannya tahun 1914 telah ada 18.181 peserta didik, pada tahun 1921 terdapat 38.211 atau dua kali lipat dalam tujuh tahun.

e. **Peserta Didik Algemene Middelbare School (AMS)**

Pada tahun 1919 AMS pertama dibuka dengan mayoritas peserta didik Indonesia: 22 anak Indonesia, 15 Anak Belanda, dan 5 Cina. Sejak pembukaan itu orang Indonesia senantiasa merupakan mayoritas, walaupun dalam bagian klasik Barat murid Belanda melebihi murid Indonesia.

Jumlah drop-out di AMS lebih rendah daripada sekolah lain. Dari angkatan pertama yang masuk pada tahun 1919 sebanyak 74,4% mencapai kelas tertinggi dan 71,4% berhasil lulus pada ujian akhir (S. Nasution, 2008: 139).

f. Peserta Didik Sekolah Raja (Hoofdenschool)

Peserta didik Sekolah Raja terdiri dari bangsawan pribumi yang pendidikannya difokuskan untuk mencetak pegawai-pegawai yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengisi jabatan pegawai dalam pekerjaan administrasi pemerintahan

g. Peserta Didik Sekolah Pendidikan Guru (Kweekschool)

Pendidikan guru ini mula-mula diselenggarakan di Ambon pada 1834. Sekolah ini berlangsung sampai 30 tahun (1864) dan dapat memenuhi kebutuhan guru pribumi bagi sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu. Sekolah serupa diselenggarakan oleh zending di Minahasa pada 1852 dan 1855 dibuka satu lagi di Tanahwangko (Minahasa). Pada waktu sebelumnya, Pemerintah telah menyelenggarakan kursus-kursus guru yang diberi nama Normaal Cursus yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru Sekolah Desa. Sekolah guru di Surakarta ini murid-muridnya diambil dari kalangan priyayi Jawa. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Jawa dan melayu. (S. Nasution, 2008: 46).

3. Pendidikan Bagi Warga Cina

a. Peserta Didik Hollands Chinese School (HCS)

HCS yang dibuka untuk mereka yang menginginkan pendidikan Barat kebanyakan dikunjungi oleh Cina-Indo yang lahir di Indonesia. Hal ini mudah dipahami karena mereka tidak memahami bahasa Cina dan karena itu tidak tertarik pada Sekolah Cina nasional. HCS yang didirikan atas pertimbangan politik untuk mengimbangi sekolah THHK tidak berhasil sepenuhnya karena orang Cina totok terus mengirim anak-anak mereka ke Tiongkok. (S. Nasution, 2008: 110)

Syarat masuk HCS bagi anak Cina lebih lunak. Syarat usia (maksimum 7 tahun) dan penugasan bahasa Belanda tidak diberlakukan dengan ketat. Kesempatan belajar bagi anak Cina pada tahun 1908 lebih baik daripada untuk

anak Indonesia. Jumlah sekolah meningkat dari 4 (1908) menjadi 29 (1915) dan 34 (1920) dan jumlah murid dari 821 menjadi 5.323 dan 7.785 orang. Kesempatan belajar yang lebih baik ini member kemungkinan dominasi Cina bukan hanya dalam bidang komersial melainkan juga bidang intelektual dan dibantu oleh kondisi financial yang lebih menguntungkan. Secara Proporsional mereka lebih banyak memasuki universitas daripada orang Indonesia.

E. Kurikulum Pendidikan

1. Pendidikan Untuk Bagi Anak Belanda

a. Kurikulum Europese Lagere School (ELS)

Kurikulum ELS terdiri atas mata pelajaran membaca, menulis, berhitung, bahasa Belanda, sejarah, ilmu bumi, dan mata pelajaran lain. Menurut peraturan kurikulum dapat diperluas dengan mata pelajaran yang lebih tinggi seperti ilmu alam, dasar-dasar bahasa Perancis dan Jerman, sejarah umum atau sejarah dunia, matematika, pertanian, menggambar tangan, pendidikan jasmani, pekerjaan tangan dan menjahit bagi anak wanita (S. Nasution, 2008: 92).

b. Kurikulum Hogere Burgerschool (HBS)

Kurikulum HBS di Indonesia sama dengan kurikulum yang diterapkan di negeri Belanda. Kurikulum ini dirasa mantap tanpa banyak mengalami perubahan selama eksistensinya dan dapat dipertahankan terhadap berbagai kritik. Apa yang diajarkan tampaknya universal. Bahannya dapat berubah dan harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, namun nama mata pelajaran tetap sama. (S. Nasution, 2008: 131).

c. Kurikulum Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)

Pada dasarnya MULO merupakan sekolah dasar dengan program yang diperluas. Kurikulum MULO terdiri dari 4 program bahasa: Belanda, perancis, Inggris, dan Jerman. Setengah dari waktu digunakan untuk pelajaran bahasa,

sepertiga untuk matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan seperenam untuk ilmu pengetahuan sosial. (S. Nasution, 2008: 123)

d. Kurikulum Sekolah Pertukangan (Ambachtschool)

Kurikulum yang diterapkan Sekolah Pertukangan meliputi beberapa mata pelajaran, antara lain: (1) Pelajaran menganyam, (2) Pertukangan Kayu, dan (3) Seni Ukir.

2. Pendidikan Bagi Warga Bumi Putera

a. Kurikulum Sekolah Kelas Satu

Kurikulum sekolah ini, seperti ditentukan dalam peraturan tahun 1893 terdiri atas mata pelajaran sebagai berikut: (1) Membaca dan menulis dalam bahasa daerah dalam huruf daerah dan Latin, (2) Membaca dan menulis dalam bahasa Melayu, (3) Berhitung, (4) Ilmu Bumi Indonesia, (5) Ilmu Alam, (6) Sejarah pulau tempat tinggal, (7) Menggambar, (8) Mengukur Tanah. Selaib itu semua mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Guru, kecuali ilmu mendidik, boleh diajarkan setelah disetujui inspektur. Bernyanyi fakultatif menurut pertimbangan kepala sekolah. (S. Nasution, 2008: 52)

b. Kurikulum Sekolah Kelas Dua

Menurut Statuta 1983 Sekolah Kelas Dua terdiri setidaknya atas pelajaran membaca, menulis bahasa Melayu dan berhitung. Karena sekolah ini semula dimaksud untuk seluruh rakyat, maka kurikulumnya sederhana. Namun ada kemungkinan memperluas kurikulum tersebut atas persetujuan inspektur dengan ketentuan bahwa bahasa Belanda tidak boleh diajarkan. Karena kemungkinan memperluas kurikulum maka segera timbul usaha untuk menambah mata pelajaran sehingga akhirnya menjadi sama dengan program Sekolah Kelas Satu dan pada tahun 1895 dikeluarkan peraturan bahwa program

Sekolah Kelas Dua sama dengan program Sekolah Kelas Satu kelas 1-3.(S. Nasution, 2008: 64)

c. Kurikulum Sekolah Desa

Kurikulum Sekolah sangat sederhana menyesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan rakyat desa. Kurikulum Sekolah Desa terdiri dari: (1) Membaca dan menulis bahasa Melayu dengan huruf latin dan Arab, (2) Latihan bercakap-cakap, (3) Berhitung 1-20 dan di atas 100. Walaupun ada saran-saran untuk memperluas kurikulum Sekolah Desa dengan pekerjaan tangan, pengetahuan tentang gejala-gejala yang dihadapi oleh petani dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagainya namun kurikulumnya tetap sangat sederhana (S. Nasution, 2008: 80).

d. Kurikulum Holland Inlandse School (HIS)

Kurikulum HIS seperti tercantum dalam Statuta 1914 No. 764 meliputi semua mata pelajaran ELS bukan kelas satu dengan perbedaan bahwa juga diajarkan membaca dan menulis bahasa daerah dalam aksara Latin dan bahasa Melayu dalam tulisan Arab dan Latin.

Kurikulum 1915 tidak meliputi sejarah, bernyanyi, dan pendidikan jasmani. Sejarah dianggap sensitive dari segi politik dan untuk bernyanyi dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang kompeten.

Mata pelajaran paling penting ialah bahasa Belanda, sebab utama maka sekolah ini diciptakan. Pelajaran meliputi 43.9% dari seluruh waktu pengajaran. Selain itu mata pelajaran lain juga digunakan untuk menguasai bahasa ini. Dengan demikian waktu sesungguhnya mempelajari Bahasa Belanda menjadi 66,4%.(S. Nasution, 2008: 114)

e. Kurikulum Algemene Middelbare School (AMS)

Kurikulum AMS terdiri atas (1) mata pelajaran umum yang diharuskan bagi semua siswa yakni bahasa Belanda, bahasa Melayu, bahasa Inggris, sejarah, geografi, undang-undang negara, matematika, botani dan zoology, pendidikan

jasmani. Tiap bagian AMS nenounyai mata pelajaran khusus sesuai hakikat bagian itu. AMS bagian AI klasik Timur, meliputi : bahasa Jawa, arkeologi, etnologi Indonesia, fisika, kimia, menggambar tangan, dan bahasa Jerman, sedangkan bahasa Perancis dijadikan elektif. AMS bagian AII, klasik Barat, menyajikan mata pelajaran yang sama seperti bagian klasik Timur kecuali bahasa Latin sebagai pengganti bahasa Jawa dan arkeologi dan juga tata buku.

AMS bagian B yang memusatkan studi pada matematika dan fisika menyajikan pelajaran fisika, kimia, matematika, kosmografi, gambar garis dan Bahasa Jerman.(S. Nasution, 2008: 137)

f. Kurikulum Sekolah Pendidikan Guru (Kweekschool)

Kurikulum Sekolah Pendidikan Guru meliputi bahasa daerah (dengan buku karangan Belanda), berhitung (menggunakan buku Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau daerah), geometri elementer, geografi (meliputi Indonesia, Nederland, dan dunia), sejarah, ilmu alam (botani, zoology, dan fisika), menggambar, pedagogic (teori dan praktik), menulis tangan (huruf latin, Jawa, dan lain-lain tergantung daerahnya), dan bernyanyi.

3. Pendidikan Bagi Warga Cina

a. Kurikulum Hollands Chinese School (HCS)

HCS mempunyai dasar yang sama dengan ELS Bahasa Perancis biasanya pada sore hari seperti halnya dengan bahasa Inggris, yang sebenarnya tidak diberikan pada ELS, namun diajarkan berhubung dengan kepentingannya bagi perdagangan. Kurikulum HCS, meliputi pengajaran bahasa Perancis, Inggris, Cina, dan Melayu (S. Nasution, 2008: 108).

F. Tenaga Pendidik

1. Pendidikan Bagi Anak Belanda

a. Tenaga Pendidik Europeese Lagere School (ELS)

Usaha yang dilakukan untuk memperoleh tenaga pendidik atau guru yang berkualifikasi tinggi, dilakukan dengan cara mendatangkan dari negeri Belanda kemudian melatihnya di Indonesia atau menyuruh pemuda ke Nederland untuk pendidikan guru.(S. Nasution, 2008: 95)

b. Tenaga Pendidik Hogere Burgerschool (HBS)

Tenaga pendidik untuk HBS adalah mereka yang memiliki ijazah Ph.D (Doktor) atau diploma MO yang berwenang mengajar di HBS. Diploma MO – B adalah ijazah tertinggi yang dicapai oleh seorang guru, yang dapat disamakan dengan gelar Doktor. Namun karena sulitnya memperoleh guru dengan ijazah yang kualifikasi yang demikian, maka dipekerjakan guru dengan ijazah Ir, perwira AD, dan AL, pemegang Diploma MO-A (wewenang mengajar pada tiga tahun pertama HBS) bahkan yang berijazah HA (Hoofdacte) untuk sementara dapat dipekerjakan pada HBS, khususnya di kelas-kelas rendah. Pada tahun 1900 80% - 90% dari guru HBS telah berwenang dan dengan demikian dapat mencapai taraf yang sama dengan HBS di Nederland (S. Nasution, 2008: 134).

c. Tenaga Pendidik Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)

Tenaga pendidik MULO pada g guru-guru yang sedianya disiapkan untuk sekolah rendah. Akan tetapi pelajaran MULO jauh melebihi apa yang diajarkan di sekolah rendah sehingga memerlukan tenaga pendidik yang berkompetensi tinggi. Mereka harus memiliki ijazah HA (Hoofdacte), akta kepala sekolah. Di samping itu ijazah khusus untuk mata pelajaran tertentu.(S. Nasution, 2008: 125)

2. Pendidikan Untuk Warga Bumi Putera

a. Tenaga Pendidik Sekolah Kelas Satu

Lulusan Sekolah Guru biasanya dijadikan Kepala Sekolah Kelas Satu maupun Kelas Dua. Cepatnya perkembangan Sekolah sesudah tahun 1900, lulusan Sekolah Guru tidak mencukupi sehingga terpaksa mengangkat Kepala Sekolah

dengan kualifikasi yang lebih rendah. Tahun 1909 dibuka kursus untuk mendidik guru pada sore hari, tetapi tidak memuaskan. (S. Nasution, 2008: 56)

- **Penerimaan Calon Guru**

Mulanya Sekolah Guru menemui kesukaran mendapatkan murid pemerintah menerapkan kenaikan gaji guru yang cukup besar sehingga banyak pelamar, dan harus diadakan seleksi. Alasan Sekolah Guru banyak menarik peminat :

- 1) Pendidikan guru bebas biaya pendidikan, bahkan diberi uang saku tiap bulan
- 2) Para lulusan dipastikan mendapat pekerjaan pada sekolah pemerintah dengan gaji yang baik yang memberikan status terhormat
- 3) Salah satu jalan bagi golongan menengah dan rendah untuk menikmati pendidikan lanjutan

- **Orang Indonesia Sebagai Guru Bahasa Belanda**

Sejak bahasa Belanda menjadi mata pelajaran di Kelas Dua, maka tiap sekolah diangkat 2 orang guru Belanda. Kekurangan akan guru Belanda, mendorong pemerintah untuk melatih guru dari Indonesia yang dipercayakan kepada guru berbangsa Belanda yang masing-masing melatih 2 orang Indonesia selama 2 tahun.

b. **Tenaga Pendidik Sekolah Desa**

Pada umumnya tenaga pendidik Sekolah Desa lebih rendah mutunya daripada tenaga pendidik sekolah lainnya. Pemerintah waktu itu tidak merasa perlu mencari guru yang kompeten dan menganggap juru tulis desa sudah memadai. Lulusan Kelas Dua dianggap cukup berwenang menjadi seorang guru Sekolah Desa. Guru yang lebih kompeten akan terlampaui mahal dan biasanya tak bersedia mengajar di lingkungan yang primitive.

Gaji guru desa f 15,- yang sebagian diperoleh dari pemerintah, sebagian lagi dari uang sekoalh dan bunga dari lumbung desa. Bila diangkat guru kedua, maka akan memperoleh f 10,- sebulan. Guru-guru dibebaskan dari kerja rodi.(S. Nasution, 2008: 81)

c. Tenaga Pendidik Holland Inlandse School (HIS)

HIS merupakan lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat, khususnya mempelajari bahasa Belanda sebagai kunci untuk pendidikan lanjutan, pintu kebudayaan Barat, syarat untuk memperoleh pekerjaan. Bahasa Belangajarkan bahsa Belanda diinginkan tenaga pendidikda memberikan prestise dan memasukkan seseorang ke dalam golongan intelektual dan elite.

Untuk mengajarkann Bahasa Belanda diinginkan guru Belanda akan tetapi karena sukarnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang selalu bertambah maka digunakan guru-guru Indonesia lulusan HKS (Hogere Kweekschool).

Sebagai kepala sekolah ditunjuk orang Belanda yang mempunyai Hoofdacte, ijazah kepala sekolah. Akan tetapi tidak ada keberatan menjadikan orang Indonesia sebagai kepala HIS asal memiliki H.A. (Hoofdacte) dan untuk itu diadakan kursus H.A.(S. Nasution, 2008: 115)

d. Tenaga Pendidik Algemene Middelbare School (AMS)

Tenaga Pendidik AMS harus memenuhi syarat yang sama dengan HBS dan sering seperti di Bandung, guru yang sama mengajar HBS dan AMS. Dapat diharapkan dicapai hasil akademis yang sama pada kedua lembaga pendidikan itu (S. Nasution, 2008: 139).

e. Tenaga Pendidik Sekolah Pendidikan Guru (Kweekschool)

Sebelum Sekolah Guru dapat menghasilkan jumlah guru yang cukup, tidak diadakan syarat khusus untuk melakukan profesi guru ini. Karena kebutuhan guru yang mendesak setelah tahun 1863, pemerintah memutuskan pada tahun

1892 akan mengangkat guru sebagai tenaga pendidik tanpa pendidikan sebagai guru.

Guru dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu: (1) guru yang berwenang penuh lulusan Sekolah Guru (2) guru melalui ujian guru tanpa menempuh Sekolah guru dan arena itu mendapat gaji yang lebih rendah, (3) guru bantu melalui ujian guru bantu, (4) calon guru atau magang, (5) guru darurat. (S. Nasution, 2008: 42)

3. Pendidikan Bagi Warga Cina

a. Tenaga Pendidik Hollands Chinese School (HCS)

Tenaga Pendidik diambil dari lulusan HCS atau ELS juga dari MULO. Penyediaan guru Cina pada prinsipnya bukan suatu usaha untuk menyesuaikan program sekolah dengan kebutuhan orang Cina melainkan untuk mendapatkan guru yang relative murah bagi HCS yang semakin bertambah jumlahnya (S. Nasution, 2008: 109).

G. Model Pembelajaran

Pada jaman kolonial pendidikan hanya diberikan kepada para penguasa serta kaum feodal. Pendidikan rakyat cukup diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar penguasa kolonial. Pendidikan diberikan hanya terbatas kepada rakyat di sekolah-sekolah kelas 2 atau ongko loro tidak diragukan mutunya. Sungguhpun standar yang dipakai untuk mengukur kualitas rakyat pada waktu itu diragukan karena sebagian besar rakyat tidak memperoleh pendidikan, namun demikian apa yang diperoleh pendidikan seperti pendidikan rakyat 3 tahun dan pendidikan rakyat 5 tahun. Model pembelajaran yang digunakan pun juga model pembelajaran kolonial Belanda. Model pembelajaran yang tidak melatih daya kritis peserta didik. Model pembelajaran yang justru menjadikan peserta didik yang golongan pribumi menjadi generasi *inlander*. Model pembelajaran yang digunakan juga terjadi diskriminasi.

H. Sistem Penilaian

Penilaian pada masa kolonial hampir mirip seperti sekarang ini. Walaupun instrumennya belum beragam seperti saat ini. Angka yang digunakan untuk apresiasi hasil yang diperoleh adalah dari 0-10. Instrumen tes tetap merupakan alat evaluasi yang utama. Dapat dikatakan hanya pemberian tugas yang merupakan alat evaluasi tambahan. Memang keadaan ini pun tidak berbeda dengan prinsipil dengan alat evaluasi yang digunakan guru sekarang. Walaupun demikian guru belum mengenal bentuk tes obyektif. Bentuk soal yang digunakan masih berupa uraian (esai). Bentuk ini digunakan sampai pasca Indonesia merdeka dan terus digunakan tanpa ada perubahan dalam bentuk sampai nantinya digunakan bentuk tes obyektif.

I. Kompetensi Lulusan

Pendidikan kolonial untuk golongan bangsawan serta penguasa tidak diragukan lagi mutunya. Para pemimpin nasional kita kebanyakan memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah kolonial bahkan beberapa mahasiswa yang dapat melanjutkan di Universitas terkenal di Eropa. Dalam sejarah pendidikan kita dapat dikatakan bahwa intelegensi bangsa Indonesia tidak kalah dengan kaum penjajah. Masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada waktu itu adalah kekurangan kesempatan yang sama yang diberikan kepada semua anak bangsa.

Walaupun pendidikan sebelum kemerdekaan (masa kolonial Belanda) begitu banyak persoalan yang menerpa dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada saat itu masih dipengaruhi oleh kolonialisme, alhasil bangsa ini dididik untuk mengabdikan kepada penjajah atau setelah pasca kemerdekaan adalah untuk kepentingan para penguasa pada saat itu. Karena, pada saat penjajahan semua bentuk pendidikan dipusatkan untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajah. Pendidikan di zaman penjajah adalah pendidikan yang menjadikan penduduk Indonesia bertekuk lutut di bawah ketiak kolonialis. Bangsa ini tidak diberikan ruang yang lebar guna membaca dan mengamati banyak realitas pahit

kemiskinan yang sedemikian membumi di bumi pertiwi. Dalam pendidikan kolonialis, pendidikan bagi bangsa ini bertujuan membutakan bangsa ini terhadap eksistensi dirinya sebagai bangsa yang seharusnya dan sejatinya wajib dimerdekakan.

Konsep ideal pendidikan kolonialis adalah pendidikan yang sedemikian mungkin mampu mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah pula, bukan lagi untuk memanusiakan manusia sebagaimana dengan konsep pendidikan yang ideal itu sendiri. Tujuan pendidikan kolonial tidak terarah pada pembentukan dan pendidikan orang muda untuk mengabdikan pada bangsa dan tanah airnya sendiri, akan tetapi dipakai untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat penjajah agar dapat ditransfer oleh penduduk pribumi dan menggiring penduduk pribumi menjadi budak dari pemerintahan kolonial (Kartini Kartono, 1997: 49-50). Selain itu, agar penduduk pribumi menjadi pengikut negara yang patuh pada penjajah, bodoh, dan mudah ditundukkan serta dieksploitasi, tidak memberontak, dan tidak menuntut kemerdekaan bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, dkk. 2007. *Indonesia Belajarlah!*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Ary H. Gunawan. 1985. Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara
- B. Suryobroto. 2010. Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Darsono Prawironegoro. 2010. *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Nusantara Consulting.
- Haryatmoko. 2008. Menemukan Kembali Kebangsaan dan Kebangsaan. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Kartini Kartono. 1997. Tujuan Pendidikan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Leo Agung S dan Suparman. 2012. *Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: Ombak.
- Parakitri T. Simbolon. 2006. Menjadi Indonesia. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rianti Nugroho. 2008. Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- S. Nasution. 2008. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sukardjo dan Ukim Komarudin. 2009. *Landasan Kependidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

BAB III

PENDIDIKAN INDONESIA MENJELANG MASA KEMERDEKAAN: PENDIDIKAN MASA PENJAJAHAN JEPANG

A. LANDASAN FILSAFAT

Pada tahun 1940 Jepang memiliki cita-cita untuk menjadi pusat dari daerah-daerah Maschuria, Daratan Cina, Kepulauan Philippina, Indonesia Thailand, Malaysia, Indocina dan Asia (Rusia). Cita-cita tersebut lebih dikenal dengan istilah “Kesemakmuran Bersama Asia Raya”. Jepang akan menjadi pusat industri presisi, sedangkan Cina dikembangkan menjadi industri ringan dan industri tekstil. Daerah-daerah lainnya seperti Indonesia merupakan daerah pensunplay sumber bahan mentah.

“Kemakmuran Bersama Asia Raya” disambut baik dan dikukung oleh militer, sehingga mulailah ekspansi Jepang. Jepang hadir di beberapa negara termasuk Indonesia Jepang dengan menawarkan harapan baru, sehingga Jepang di Indonesia tidak mendapatkan perlawanan yang berarti.

Gerakan 3-A tampaknya mampu memikat hati bangsa Indonesia. Gerakan 3-A dibentuk pada 29 April 1942 untuk menyebarkan propaganda Jepang dengan upaya menarik simpati bangsa Indonesia.

Gerakan 3-A mempunyai arti sebagai berikut:



- Nippon (Jepang) Cahaya Asia
- Nippon (Jepang) Pelindung Asia
- Nippon (Jepang) Pemimpin Asia

Landasan tersebut yang kemudian berpengaruh dalam perubahan semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, militer maupun pendidikan. Slogan 3 A juga menjadi landasan dalam setiap kebijakan Jepang. Kongkritnya, landasan idiil pendidikan adalah mengajak bangsa Indonesia bekerjasama dengan Jepang untuk mencapai “kemakmuran Bersama Asia Raya”. Oleh karena itu setiap pelajar harus mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang dan membentuk Indonesia baru menuju “kemakmuran Asia Raya”. Konsep ini dilandasi oleh konsep Hakko-Ichi-u (Setijadi dkk, 1976: 25). Slogan ini berarti “Delapan Penjuru Dunia di Bawah Satu Atap”. Hokko-Ichi-u digunakan sebagai slogan persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk menciptakan Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Pendidikan pada zaman pendudukan Jepang lebih banyak dilaksanakan atas dasar landasan idiil yang disebut Hakko I-Chiu, (delapan benang di bawah satu atap) yang intinya adalah pembentukan suatu lingkungan yang didominasi oleh Jepang yang meliputi bagian-bagian besar dunia. Cita-cita itu mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dengan bangsa Jepang dalam rangka mencapai Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.

Didorong semangat untuk mengembangkan pengaruh dan wilayah sebagai bagian dari rencana membentuk Asia Timur Raya yang meliputi Manchuria, Daratan China, Kepulauan Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Indo China dan Rusia di bawah kepemimpinan Jepang, negara ini mulai melakukan ekspansi militer ke berbagai negara sekitarnya tersebut. Dengan konsep “Hakko Ichiu” (Kemakmuran Bersama Asia Raya) dan semboyan “Asia untuk Bangsa Asia”, bangsa fasis inipun menargetkan Indonesia sebagai wilayah potensial yang akan menopang ambisi besarnya. Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut

dukungan militer yang kuat, Jepang dalam mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik.

Selama masa pendudukan Jepang, banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sebelumnya berada dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, khususnya dalam bidang pendidikan. Kedatangan Jepang yang awalnya mengaku sebagai saudara tua dan berjanji membantu bangsa Indonesia lepas dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda rupanya hanya rekayasa politik saja. Jepang lebih tertarik untuk memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia untuk kepentingan memenangkan perang. Tidak hanya dari sektor ekonomi dan politik masyarakat Indonesia dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang, bahkan pada sektor pendidikan pun dijadikan sebagai sarana membantu keberhasilan militer Jepang. Pendidikan yang dikelola dan diatur oleh Jepang bukan untuk menghasilkan generasi yang berprestasi namun mendidik anak-anak Indonesia menjadi buruh dan menjadi tentara militer untuk membantu Jepang berperang melawan Sekutu.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang saat itu dijiwai oleh semangat militer Jepang. Pendidikan yang didasari oleh pendidikan militer, diawali dengan dilakukannya banyak perubahan terhadap pendidikan di Indonesia saat itu. Sifat dualisme pendidikan yang sebelumnya telah lama melekat pada sistem penyelenggaraan pendidikan masa kolonial Belanda dengan sistem pendidikannya yang berlapis-lapis berusaha dihapuskan, kemudian diganti dengan sistem pendidikan yang lebih sederhana.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda yang sebelumnya terkesan eksklusif dan hanya dapat diakses oleh golongan-golongan tertentu saja, yaitu golongan priyayi dan orang-orang keturunan Belanda sendiri kemudian dilebur bersama sekolah-sekolah partikelir yang ada saat itu. Peleburan ini

dimaksudkan untuk meniadakan kastanisasi atau sifat eksklusif sekolah-sekolah pemerintah saat itu. Sebagai akibatnya, saat itu banyak sekolah-sekolah pemerintah dan sekolah-sekolah partikelir yang ditutup dan tidak diakui lagi keberadaannya. Pendidikan dalam konsep baru ini kemudian diperkenalkan sebagai bagian dari propaganda Jepang, bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan yang sebelumnya eksklusif dan diperuntukkan hanya untuk kalangan tertentu saja, kemudian dibuka secara umum, dan dinyatakan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada era pendudukan Jepang, pendidikan sekolah bukan merupakan prioritas utama meskipun tetap menjadi hal yang cukup penting. Prioritas utama pemerintah militer Jepang di Indonesia adalah dalam sektor pemerintahan, propaganda, dan pendidikan sosial.

B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Pada awal pendudukan Jepang, sekolah-sekolah ditutup, dan pada akhir April 1942 sekolah-sekolah dibuka kembali dengan sistem baru. Bekas sekolah desa (*volk school*), *vervlog school* (sekolah lanjutan), *volledige tweede klas school* (sekolah pribumi lengkap), dan *meisjes vervolg school* (sekolah lanjutan putri) dibuka kembali dengan dasar Undang-Undang No. 12.

Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah militer Jepang di Indonesia, sangat berbeda dengan pendidikan yang diselenggarakan pada masa Belanda, karena semua lapisan masyarakat pribumi diberikan hak untuk dapat mengaksesnya. Dengan menyederhanakan sistem pendidikan dan menghilangkan dualisme pendidikan pemerintah Jepang memperoleh dua keuntungan sekaligus. Pertama, mereka tidak perlu meneruskan sistem pendidikan masa kolonial Belanda yang rumit dan memerlukan kontrol yang ketat dari pemerintah, karena penyelenggaraan pendidikan yang berlapis-lapis. Keuntungan kedua, dihapuskannya dualisme pendidikan mendukung propaganda Jepang dalam rangka mengambil simpati masyarakat pribumi saat itu, bahwa

tidak adanya pelapisan masyarakat dalam mengakses pendidikan membuat semua warga Indonesia menjadi mengerti akan pentingnya pendidikan.

Apabila ditelusuri dari riwayat kedatangannya, setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Sejak itulah Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain: (1) dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan Bahasa Belanda; (2) adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial (dualisme pendidikan) di era penjajahan Belanda.

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pendidikan Dasar (*Kokumin Gakko* / Sekolah Rakyat), lama studi 6 tahun. Termasuk SR (Sekolah Rakyat) adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda; (2) Pendidikan Lanjutan, yang terdiri dari *Shoto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan *Koto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun; (3) Pendidikan Kejuruan, mencakup sekolah lanjutan yang bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian; (4) Pendidikan Tinggi.

Dalam menerapkan kebijakannya, guna memperoleh dukungan tokoh pribumi, Jepang mengawalinya dengan menawarkan konsep Putera (Pusat Tenaga Rakyat) di bawah pimpinan Sukarno, M. Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur pada Maret 1943. Konsep ini dirumuskan setelah kegagalan *the Triple Movement* yang sudah dibentuk sebelumnya tetapi tidak menyertakan wakil tokoh pribumi. Namun demikian Putera akhirnya mengalami nasib serupa setahun kemudian. Pasca ini, Jepang tetap merekrut Ki Hadjar Dewantara sebagai penasehat bidang pendidikan mereka. Upaya Jepang mengambil tenaga pribumi ini dilatarbelakangi pengalaman kegagalan sistem pendidikan mereka di

Manchuria dan China yang menerapkan sistem Nipponize (Jepangisasi). Karena itulah, di Indonesia mereka mencobakan format pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Sekalipun patut dicatat bahwa pada menjelang akhir masa pendudukannya, ada indikasi kuat Jepang untuk menerapkan sistem *Nipponize* kembali, yakni dengan dikerahkannya *Sendenbu* (propagator Jepang) untuk menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya.

Jepang juga memandang perlu melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain: (1) Indoktrinasi ideologi *Hakko Ichiu*; (2) *Nippon Seisyin*, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang; (3) Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang; (4) Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis; serta (5) Olahraga dan nyanyian Jepang. Sementara untuk pembinaan kesiswaan, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini: (1) Menyanyikan lagi kebangsaan Jepang, *Kimigayo* setiap pagi; (2) Mengibarkan bendera Jepang, Hinomura dan menghormat Kaisar Jepang, Tenno Heika setiap pagi; (3) setiap pagi mereka juga harus melakukan *Dai Toa*, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya; (4) Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan *Taiso*, senam Jepang; (5) Melakukan latihan-latihan fisik dan militer; (7) Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan di sekolah.

Setelah menguasai Indonesia, Jepang menginstruksikan ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa Belanda, pelarangan materi tentang Belanda dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Termasuk yang harus ditutup adalah HCS (*Hoolands Chinese School*), sehingga memaksa peranakan China kembali ke sekolah-sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi Hua-Chino Tsung Hui, yang berimplikasi pada adanya proses resinification (penyadaran dan penegasan identitas sebagai keturunan bangsa China).

Kondisi tersebut akhirnya memaksa para guru untuk mentranslasikan buku-buku berbahasa asing kedalam Bahasa Indonesia untuk kepentingan proses pembelajaran. Selanjutnya sekolah-sekolah yang bertipe akademis diganti dengan sekolah-sekolah yang bertipe vokasi. Jepang juga melarang pihak swasta mendirikan sekolah lanjutan dan untuk kepentingan kontrol, maka sekolah swasta harus mengajukan izin ulang untuk dapat beroperasi kembali. Taman Siswa misalnya terpaksa harus mengubah Taman Dewasa menjadi Taman Tani, sementara Taman Guru dan Taman Madya tetap tutup. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya kemunduran yang luar biasa bagi dunia pendidikan dilihat dari aspek kelembagaan dan operasonalisasi pendidikan lainnya.

Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain: (1) Mengubah *Kantoor Voor Islamistische Zaken* pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim Asy'ari. Di daerah-daerah dibentuk Sumuka; (2) Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang; (3) Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin; (4) Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta; (4) Diizinkan ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan; dan (5) Diizinkan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU. Lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan.

Kebijakan untuk menyederhanakan sistem persekolahan oleh pemerintah Jepang menimbulkan banyak sekali dampak setelahnya. Pendidikan yang

sebelumnya berlapis-lapis dan sangat eksklusif menjadi lebih sederhana dan dinyatakan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, rupanya kebijakan tersebut kurang membawa dampak positif di masyarakat. Dampak pertama yang terlihat dari penerapan kebijakan tersebut adalah kebijakan peleburan mengakibatkan banyak sekolah yang kemudian ditutup dan tidak beroperasi lagi. Banyak gedung-gedung sekolah yang kemudian berubah fungsi menjadi barak-barak militer dan gudang penyimpanan amunisi dan bahan makanan persediaan perang milik militer Jepang. Filosofi pendidikan untuk semua ternyata hanya propaganda belaka, karena pasca pemberlakuan kebijakan tersebut justru mengakibatkan semakin turunnya jumlah siswa yang bersekolah dan jumlah sekolah juga berkurang dengan sangat drastis.

Selain menghapus dualisme pendidikan dan menggantinya dengan kebijakan sekolah umum serta memberi kesempatan kepada seluruh lapisan untuk dapat mengakses pendidikan, pemerintah militer Jepang di Indonesia juga berusaha menghapus pengaruh Barat dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu dengan cara menghapus Bahasa Belanda sebagai Bahasa pengantar di sekolah. Bahasa yang diperbolehkan saat itu adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang. Selain itu, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang juga lebih ditekankan pada *physical training*, bukan mental disiplin. Pendidikan militer ditekankan dalam rangka tercapainya target Jepang untuk memenangkan perang melawan sekutu.

C. SISTEM PENDIDIKAN

Kejayaan penjajahan Belanda lenyap setelah Jepang berada di Indonesia. Mereka bertekuk lutut tanpa syarat ke Jepang. Adapun Tujuan Jepang ke Indonesia ialah menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan mentah dan tenaga manusia yang sangat besar artinya bagi kelangsungan perang Pasifik hal ini sesuai dengan cita-cita politik ekspansinya. Sebagai cara yang dilakukan oleh Jepang dalam mengelabui bangsa Indonesia untuk kepentingan politiknya. Demi kepentingan perang, Jepang mengambil pasukan dari Indonesia dengan menyuguhkan pendidikan kemiliteran. Kendati demikian, di balik kekejaman

Jepang itu, Indonesia banyak memanfaatkan berbagai toleransi dari pihak Jepang terutama untuk bidang pendidikan.

Ada beberapa perubahan penting yang terjadi di bidang pendidikan sejak dipegang oleh pemerintah Jepang di Indonesia, yaitu: (1) hapusnya dualisme pengajaran, berbagai jenis sekolah rendah yang diselenggarakan pada zaman pemerintahan Belanda dihapuskan sama sekali. Sehingga hanya ada satu sekolah rendah, yaitu Sekolah Rakyat 6 tahun (Kokimin Gakkoo); (2) sekolah-sekolah desa diganti namanya menjadi sekolah pertama, sehingga susunan pengajarannya adalah Sekolah Rakyat 6 tahun, Sekolah Menengah 3 tahun, dan Sekolah Menengah Tinggi 3 tahun; (3) Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi dan bahasa pengantar bagi semua jenis Sekolah, selain itu. Bahasa Jepang dijadikan mata pelajaran wajib dan adat kebiasaan Jepang pun harus ditaati.

Secara konkrit tujuan pendidikan pada zaman Jepang di Indonesia sebenarnya adalah menyediakan tenaga kerja cuma-cuma yang disebut "romusha" dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan demi kepentingan Jepang. Oleh karenanya maka para pelajar diwajibkan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi ketat. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan senam pagi yang disebut "taiso" sebelum belajar (juga bagi para pegawai sebelum kerja) mengikuti komando dengan radio. Mengikuti latihan kemiliteran yang disebut "kyoren" bagi para pelajar dengan barisannya yang disebut "Seinendan", barisan keamanan rakyat yang disebut "Keibodan" dan barisan prajurit yang disebut "Heiho".

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Beberapa kegiatan dan pembekalan bagi para guru sengaja dilakukan dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan suksesnya propaganda Jepang. Beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah Jepang adalah seperti berikut:

1. Pelatihan bagi para guru

Usaha penanaman Ideologi Hakko Ichiu melalui sekolah-sekolah dimulai dengan mengadakan pelatihan bagi para guru, karena para guru ini bertugas sebagai penyebar ideologi tersebut. Pelatihan dipusatkan di Jakarta dan setiap kabupaten diwajibkan mengirim wakilnya untuk mendapat gemblengan langsung dari pimpinan Jepang. Pelatihan berlangsung selama 3 bulan, jangka waktu tersebut runpanya sudah dirasa cukup untuk menjepangkan para guru.

3. Pelatihan-pelatihan jasmani berupa pelatihan kemiliteran mengisi aktivitas keseharian para murid. Guna memperlancar proses pendidikan militer, pada tiap-tiap sekolah dibentuk barisan-barisan murid. Barisan murid-murid tingkat sekolah dasar disebut *Seinen-tai*, sedangkan barisan murid-murid sekolah lanjutan disebut *Gakutotai*.
4. Untuk menanamkan semangat Jepang, setiap hari murid harus mengucapkan sumpah belajar dalam bahasa Jepang. Selain itu, mereka juga harus menguasai bahasa dan nyanyian Jepang. Setiap pagi diadakan upacara, dengan menyembah bendera Jepang dan menghormati istana Tokyo.
5. Agar bahasa Jepang lebih populer, diadakan ujian Bahasa Jepang bagi para guru dan para pegawai. Pemilik ijazah/sertifikat kelulusan ini kemudian mendapat tambahan upah.

Selain sistem pendidikan yang banyak berubah, isi pengajaran yang diberikan oleh pemerintah Jepang juga mengalami banyak perubahan. Pengajaran dipergunakan sebagai alat propaganda dan juga untuk kepentingan perang. Murid-murid seringkali diharuskan kerja bakti, misalnya : membersihkan bengkel, asrama, membuat bahan-bahan untuk kepentingan pertahanan, dan sebagainya. Kegiatan lain yang harus ditaati oleh para murid adalah kewajiban untuk membuat pupuk kompos atau beramai-ramai membasmi hama tikus di sawah,

dengan tujuan untuk melipatgandakan hasil bumi. Selain itu, sebagian waktu belajar digunakan untuk menanam halaman sekolah dan pinggir-pinggir jalan dengan tanaman jarak.

Sebagai upaya untuk mengambil hati para tokoh Islam Indonesia, pemerintah Jepang mengizinkan pesantren tetap berdiri. Selain itu, Pemerintah Jepang membolehkan pula dibentuknya barisan Hizbullah untuk memberikan pelatihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Barisan ini dipimpin oleh K.H. Zainul Arifin. Pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkar dan Bung Hatta. Para ulama Islam bekerja sama dengan pimpinan-pimpinan Nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (Peta). Tokoh-tokoh santri dan pemuda Islam yang ikut serta dalam pelatihan kader militer, antara lain Sudirman, Abdul Khalik Hasyim, Iskandar Sulaiman, Yunis, Aruji Kartawinata, Kasman Singodimedjo, Mulyadi Joyomartono, Wahid Wahab, Sarbini, Saiful Islam, dan sebagainya. Tentara Pembela Tanah Air ini pada masa kemerdekaan kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia yang disingkat menjadi TNI.

Meskipun demikian, tidak ubahnya dengan Belanda, pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang ini pun mendapat hambatan yang cukup besar. Pada tahun-tahun pertama pendidikan Jepang, mereka dilarang mengajarkan bahasa Arab di sekolah-sekolah agama termasuk pesantren. Campur tangan Jepang dalam seluruh bidang pendidikan agama terutama ditunjukkan dalam hubungannya dengan Arab dan mencegah pengaruh pan-Islamisme.

Dunia pendidikan Islam di Indonesia menjadi terbengkalai, banyak madrasah-madrasah yang bubar karena muridnya menghindari dari kekejaman serdadu Jepang dan tidak sedikit pula yang sengaja dibubarkan oleh Pemerintah Jepang karena mengganggu stabilitas pemerintah jajahan. Ada sedikit keberuntungan bagi madrasah yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren. Mereka bebas dari pengawasan para penguasa Jepang. Selain itu, juga bebas dari

proses belajar Dai Nippon yang melakukan penekanan-penekanan terhadap umat Islam Indonesia pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

D. MODEL PEMBELAJARAN

Pendidikan yang diberlakukan pada era pendudukan Jepang di Indonesia adalah pendidikan semi militer dengan menerapkan latihan fisik, kemiliteran, dan indoktrinasi ketat. Meskipun demikian, rakyat Indonesia banyak memperoleh kesempatan dalam bidang pendidikan.

Selain itu, bahasa pengantar yang digunakan di sekolah-sekolah adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah, juga bahasa Jepang, sedangkan penggunaan bahasa Belanda untuk keperluan resmi dihapuskan oleh pemerintah pendudukan Jepang (R.E. Elson, 2008: 152).

Ada dampak positif terkait hal tersebut, yaitu bahasa Indonesia bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Namun, ada pula dampak negatifnya, yaitu pendidikan di perguruan tinggi hampir tidak mungkin karena buku-buku dalam bahasa Belanda atau Inggris juga dilarang (M.C Ricklefs, 2008: 410).

Jepang menerapkan aturan untuk menghormati ke arah matahari terbit karena bangsa Jepang mengaku sebagai keturunan Dewa Matahari. Selain itu, Jepang juga menerapkan etos keprajuritan kepada anak-anak sekolah dengan mengadakan olahraga senam (*taiso*) dan mengikuti latihan baris-berbaris atau perang-perangan serta menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo.





Taiso, Senam Khas Jepang

Jepang juga menggunakan lagu sebagai salah satu sarana propaganda untuk menyebarkan gagasan serta meningkatkan nilai moral dan semangat. Lagu-lagu militer dan kepahlawanan Jepang berulang-ulang diajarkan di sekolah-sekolah. Jepang menyebarkan buku-buku yang berisi tentang lagu-lagu Jepang dengan alasan untuk meningkatkan moral dan semangat sebagai sesama bangsa Asia. Namun, sebenarnya hal ini dilakukan Jepang untuk meningkatkan semangat rakyat yang hidup dalam situasi sosial ekonomi yang menyedihkan dan sebagai pengganti atau saluran pesan politik (Aiko Kurasawa, 1993: 253-254).

E. PESERTA DIDIK

Semenjak Jepang menguasai Indonesia, sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah ada pada zaman Belanda diganti dengan sistem Jepang. Segala upaya ditujukan untuk kepentingan memenangkan perang. Murid-murid hanya mendapat pengetahuan yang sangat sedikit, kegiatan persekolahan banyak diisi dengan kegiatan pelatihan perang atau bekerja untuk kepentingan militer Jepang.

Secara kongkrit tujuan yang ingin dicapai Jepang adalah menyediakan tenaga cuma-cuma (romusha) dan tenaga militer untuk membantu peperangan bagi

kepentingan Jepang. Oleh karena itu, pelajar-pelajar diharuskan mengikuti pelatihan fisik, pelatihan kemiliteran dan indoktrinasi ketat. Pada akhir zaman Jepang tampak tanda-tanda tujuan menjepangkan anak-anak Indonesia. Dikerahkan barisan propaganda Jepang yang terkenal dengan nama *Sendenbu*, untuk menanamkan ideologi baru, untuk menghancurkan ideologi Indonesia Raya.

Banyak perubahan yang terjadi menyusul diterapkannya berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan di Indonesia oleh pemerintah Jepang, di antaranya adalah dengan dihapuskannya dualisme pengajaran. Dampak dari kebijakan ini adalah selesainya riwayat susunan pengajaran Belanda dualistis, yang membedakan dua jenis pengajaran yakni pengajaran Barat dan pengajaran Bumiputra. Selain itu, dampak terbesar dari kebijakan ini adalah pada sistem perekrutan murid di sekolah. Sekolah yang tadinya dikotak-kotakkan oleh perbedaan suku, ras dan agama kemudian disatukan dalam satu jenis sekolah. Semua kalangan diberi kesempatan untuk masuk ke lembaga sekolah.

Pada masa ini hampir semua rakyat Indonesia dapat memperoleh dan berkesempatan untuk menempuh pendidikan. Hal ini dikarenakan pada masa Jepang sistem sosial menurut bangsa maupun status sosial yang diterapkan masa Hindia Belanda dihapuskan. Siswa Cina peranakan dan Cina totok pada masa Jepang juga tidak dibeda-bedakan (Rochiati Wiriaatadja, 2002: 207).

Terbukanya kesempatan belajar pada masa Jepang menjadi salah satu penyebab naiknya jumlah siswa sekolah, terutama sekolah dasar. Rata-rata jumlah murid tiap sekolah sebanyak 113 orang pada tahun 1940, meningkat menjadi 178 orang pada tahun 1944, ini berarti meningkat 60%. Apabila dibandingkan pada masa kolonial Hindia Belanda, jumlah siswa sekolah naik menjadi 78% dan jumlah sekolah meningkat menjadi 32%. Jika pada masa Belanda jumlah siswa per kelas ada 25 murid, pada masa Jepang meningkat menjadi 35 hingga 40 murid.

Data yang dikemukakan Aiko Kurasawa menunjukkan bahwa jumlah siswa sekolah pertama tahun 1944 adalah 1.806. 233 orang, Sekolah Rakyat adalah 552.102 orang, dan Sekolah Rakyat swasta adalah 267 625 orang. Banyaknya jumlah siswa pada masa tersebut juga dikarenakan dorongan pemerintah pendudukan Jepang yang mewajibkan orang harus bisa membaca dan menulis untuk dapat menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan desa maupun jabatan administrasi lainnya sehingga orang-orang desa terotivasi untuk belajar dan bersekolah (Aiko Kurasawa, 1993: 362).

F. KURIKULUM PENDIDIKAN

Pendudukan Jepang di bumi Nusantara berjalan tidak begitu lama, meskipun demikian tetapi pengaruhnya bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia sangatlah besar. Tujuan pendidikan pada masa itu telah disisipi misi Nipponisasi dan upaya-upaya pemberdayaan bangsa Indonesia untuk membantu kepentingan perang Jepang. Misi tersebut dilakukan dengan mendekati tokoh-tokoh kiai yang menjadi panutan umat Islam agar dapat dijadikan sandaran politik mereka. Pertemuan antara 32 ulama gerakan *Gunseikan* pada 7 Desember 1942 berisi tukar pendapat mengenai ke-Islam-an dan komitmen Jepang untuk melindungi adat dan agama Islam, tidak mencampuri lembaga keagamaan bahkan diperkenankan secara resmi untuk meneruskan pekerjaannya, serta memberi kedudukan yang baik pada mereka yang telah mendapatkan pendidikan agama tanpa membeda-bedakannya dengan golongan lain (Assegaf, 2005).

Pemerintah Militer Jepang di Indonesia mencoba menyusun kurikulum baru yang jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum baru yang disusun ini ternyata digunakan untuk mendukung cita-cita Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kurikulum baru diterapkan mulai tahun April 1943 untuk menjalankan pendidikan dengan mata pelajaran dan buku-buku penunjang yang baru.

Jumlah pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar ditetapkan oleh pemerintah militer Jepang mencapai 16 pelajaran meliputi: latihan kemiliteran (*kyoren*), pelajaran moral (*shusin*), pekerjaan praktis (*sagyo*), bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa daerah (Jawa, Sunda, dan Madura), sejarah, geografi, matematika, ilmu alam, olahraga, musik, seni menulis (*shuji*), kerajinan tangan, melukis, dan perawatan rumah (khusus untuk siswa perempuan).

Ada beberapa materi pembelajaran yang mengalami perubahan jika dibandingkan pendidikan pada zaman Hindia Belanda. Perubahan materi tersebut tentunya terkait dengan keinginan tujuan Jepang menjadi pusat “Kemakmuran Bersama Asia Raya”. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Jepang dicita-citakan menjadi *lingua franca sehingga* pelajaran bahasa Jepang sangat diperhatikan pemerintah militer Jepang seluas mungkin dengan maksud untuk membuat murid memahami tentang semangat dan kehidupan Jepang.

Keseriusan pengajaran Jepang dalam pembelajaran bahasa Jepang ditunjukkan dengan mengirim guru dari Jepang untuk sekolah lanjutan. Selain itu, alokasi waktu untuk bahasa Jepang sangat banyak, yaitu minimal 3 jam dan maksimal 10 jam. Berikut ini alokasi waktu yang dibutuhkan untuk belajar bahasa Jepang (Aiko Kurasawa, 1993: 367-366):

Sekolah Dasar	Kelas 1	3 jam per minggu
	Kelas 2	4
	Kelas 3	5
	Kelas -6	6
Sekolah Menengah Pertama	Siswa	7
	Siswi	6
Sekolah Guru	Kelas 1	9
	Kelas 2-3	8
	Kelas 4	6
Sekolah Guru Wanita	Tahun 1-3	8
	Tahun 4	6
Sekolah Menengah Atas	Kelas 1-3	10
Jurusan Ilmu Manusia	Kelas 1	9
Jurusan Ilmu Alam	Kelas 2-3	8

Untuk menunjang pembelajaran dengan model dan ideologi yang baru dan berbeda dari sebelumnya, maka diperlukan buku penunjang yang sesuai dengan kurikulum baru yang berisi: pelajaran moral, bahasa Jepang, lagu-lagu, dan sejarah Jepang. Buku-buku pelajaran di tahun-tahun sebelumnya yang digunakan pada masa Belanda dikaji ulang dan diperbaiki. Hasilnya adalah buku pelajaran baru dengan sampul buku bergambar pohon sakura dan Gunung Fuji khas Jepang. Buku pelajaran yang berhasil diterbitkan sebanyak 57 jenis dan disebarakan ke berbagai daerah meskipun belum merata (Aiko Kurasawa, 1993: 368-369).

Bahasa Indonesia dan daerah digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Mengenai pemilihan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar pendidikan dikarenakan pada anak-anak sekolah rendah hanya sedikit yang bisa memahami bahasa Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan bahasa daerah menjadi bahasa pengantar pada tahun-tahun pertama untuk pendidikan dasar. Dampak digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan adalah semakin meluasnya bahasa Indonesia sampai ke desa-desa, namun sayang bahasa Indonesia juga tidak banyak digunakan sebagai pengantar karena guru-guru di desa-desa tidak terlalu menguasai bahasa Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang bisa disimpulkan bahwa kurikulum yang telah dirancang tidak bisa diimplimentasikan seperti "seharusnya". Di lapangan, kurikulum harus menyesuaikan karena beban tugas tambahan dan kegiatan kerja bakti yang memakan waktu.

Bangsa Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia. Ketika kondisi dunia saat terjadi perang, Jepang tak tinggal diam dan menampilkan diri ikut dalam peperangan tersebut. Jepang mendapatkan prestasinya ketika menghadapi Rusia. Jepang bercita-cita besar, yaitu menjadi pemimpin Asia Timur Raya dan berhasil menakhlukkan Belanda yang telah lama menjajah Indonesia. Sekolah-

sekolah yang ada di zaman Belanda diganti dengan sistem Jepang. Selama Jepang menjajah Indonesia, hampir sepanjang hari hanya diisi dengan kegiatan latihan perang atau bekerja. Jika ada kegiatan-kegiatan sekolah, hal tersebut tidak jauh dengan konteks Jepang sedang berperang. Kegiatan yang dikatakan berhubungan dengan sekolah tersebut antara lain:

1. Mengumpulkan batu dan pasir untuk kepentingan perang.
2. Membersihkan bengkel-bengkel dan asrama-asrama militer.
3. Menanam ubi-ubian dan sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persediaan bahan makanan.
4. Menanam pohon jarak untuk bahan pelumas (Rifa'i, 2011: 83-84).

Di samping itu, murid setiap pagi wajib mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran.

Pelajaran-pelajaran yang diberikan pada masa penjajahan Jepang meliputi Sejarah Ilmu Bumi, Bahasa Indonesia (Melayu), Adat Istiadat, Bahasa Jepang, Ideologi Jepang, dan Kebudayaan Jepang. Untuk menyebarkan ideologi dan semangat Jepang, para guru ditatar secara khusus oleh pemimpin-pemimpin Jepang selama tiga bulan di Jakarta. Mereka diharuskan dan diwajibkan meneruskan materi yang telah diterima kepada teman-temannya. Untuk menanamkan semangat Jepang itu kepada murid-murid, diajarkan bahasa Jepang, nyanyian-nyanyian perjuangan, atau nyanyian-nyanyian semangat kemiliteran (Rifa'i, 2011: 84-85). Menurut Soemanto dan Soeyarno dalam Rifa'i (2011: 85) memang kehadiran Jepang di Indonesia dapat menanamkan jiwa berani pada bangsa Indonesia. Akan tetapi semua itu demi kepentingan Jepang.

Menurut Rifa'i (2011: 85) sebenarnya tujuan pendidikan Jepang di zaman penjajahan Jepang tidaklah banyak yang dapat diuraikan sebab murid disibukkan dengan peperangan sehingga perhatian terhadap pendidikan sangat sedikit. Rayuan Jepang kepada bangsa Indonesia mengatakan bahwa Jepang adalah saudara tua yang akan datang ke Indonesia untuk mencapai

kemakmuran bersama di Asia Timur Raya atau yang terkenal dengan *hakko ichiu* sebagai landasan utama pendidikan pada zaman pendudukan Jepang.

Penjajah Jepang mengambil kebijakan bahwa bahasa Belanda dilarang dipergunakan sama sekali. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi, baik di kantor-kantor maupun di sekolah-sekolah. Bahasa Jepang menjadi bahasa kedua. Selama masa kependudukan Jepang inilah bahasa Indonesia berkembang dan dimodernkan sehingga menjadi bahasa pergaulan dan bahasa ilmiah (Rifa'i, 2011: 85).

Menurut Gunawan dalam Rifa'i (2011: 86) dari sudut lain, dapat kita lihat bahwa secara konkret tujuan pendidikan pada zaman Jepang di Indonesia adalah menyediakan tenaga kerja cuma-cuma yang disebut *romusha* dan *prajurit-prajurit* untuk membantu peperangan demi kepentingan Jepang. Pengaruhnya adalah para pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi ketat. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan senam pagi yang disebut *taiso* sebelum belajar (juga bagi para pegawai sebelum bekerja) mengikuti komando dengan radio. Mengikuti latihan kemiliteran yang disebut *kyoren* bagi para pelajar dengan barisannya yang disebut *seinendan*, barisan keamanan rakyat yang disebut *keibodan*, dan barisan prajurit yang disebut *heiho*.

Dengan adanya penyederhanaan sistem pendidikan dan sekolah di zaman Jepang, kesempatan belajar terbuka lebar bagi semua golongan penduduk di Indonesia, semua mendapat kesempatan yang sama. Jalur-jalur sekolah dan pendidikan menurut penggolongan keturunan bangsa, strata, ataupun strata sosial telah dihapuskan (Rifa'i, 2011: 89).

Kebijakan di bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh Jepang memang banyak yang terlihat seolah-olah ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (mulai dari pemberlakuan sekolah gratis, pemberian tambahan insentif guru, hingga penyederhanaan sistem persekolahan), tetapi pada kenyataannya kebijakan tersebut sarat dengan muatan politis yang

membawa misi Nipponisasi dan pemberdayaan bangsa Indonesia untuk perburuhan dan mobilisasi militer.

G. TENAGA PENDIDIK

Pada masa pendudukan Jepang, jumlah tenaga guru di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini terjadi karena banyak guru yang ditempatkan atau bekerja di sektor lain, seperti administrasi, pangreh praja, militer, bahkan sebagai petugas propaganda Jepang.

Status guru pada masa pendudukan Jepang pernah ditingkatkan menjadi pegawai pemerintah. Selain itu, guru juga mengalami kenaikan upah sesuai tingkatan pangkatnya (Aiko Kurasawa, 1993: 370). Gaji guru masa Jepang ini kurang lebih naik 150% daripada gaji guru pada masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Namun, perlu diingat bahwa pada masa Jepang ekonomi mengalami inflansi sehingga nilai tukar uang semakin melejit.

Langkanya profesi guru pada masa Jepang menyebabkan beban yang harus ditanggung oleh para guru yang sudah ada menjadi semakin besar. Hal ini disebabkan karena jumlah siswa tiap kelas menjadi semakin banyak. Selain itu, guru juga mendapat beban ganda karena selain mengajar, mereka juga harus melakukan pekerjaan politik, seperti kampanye propaganda, kursus pencerahan, pengajaran untuk umum, dan lain-lain (Aiko Kurasawa, 1993: 370).

Upaya untuk mengatasi kelangkaan guru dilakukan pemerintah Jepang dengan merekrut guru-guru baru, guru bantu, atau memberi pelatihan jangka pendek. Aiko Kurasawa (1993: 370-371), menjelaskan bahwa ada tiga jenjang yang harus dilalui oleh seorang calon guru pada masa pendudukan Jepang, yaitu:

- a. Ujian untuk guru reguler di Sekolah Rakyat, yaitu bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah selama 9 tahun dan sudah berusia 18 tahun. Mereka yang lulus ujian ini dianggap setara dengan lulusan sekolah guru.

- b. Ujian untuk guru bantu di Sekolah Rakyat, yaitu bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah selama 9 tahun dan berusia 18 tahun. Mereka yang lulus ujian ini dianggap setara dengan lulusan sekolah guru menengah pertama.
- c. Ujian untuk guru Sekolah Rakyat Pertama, yaitu bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah selama 6 tahun dan berusia di atas 16 tahun.

Selain itu, kursus untuk para guru diadakan diberbagai jenjang, dan yang telah lulus dalam satu jenjang dapat mengikuti ke jenjang yang lebih tinggi. Ujian kecakapan guru diadakan di setiap karesidenan dengan meliputi materi yang diujikan, seperti moral, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa daerah, matematika, sejarah, geografi, ilmu alam, menggambar, *taiso*, dan menyanyi.

Kelangkaan terjadi untuk guru yang bertugas mengampu mata pelajaran bahasa Jepang. Hal ini disebabkan karena guru-guru lokal tidak banyak yang menguasai materi pelajaran bahasa Jepang. Untuk memenuhi kebutuhan guru bahasa Jepang, kemudian pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia mendatangkan guru bahasa dari Jepang untuk memberikan pelatihan atau kursus singkat kepada guru-guru lokal.

Guru yang dikirim dari Jepang juga harus memiliki kualifikasi yang diberlakukan oleh pemerintah militer Jepang. Syarat yang diberlakukan adalah lulusan universitas untuk guru pria dan lulusan kolese atau lebih tinggi untuk guru perempuan. Baik guru perempuan maupun pria harus bisa menguasai bahasa Inggris meskipun tidak fasih dan batas usia maksimal adalah 45 tahun. Guru-guru yang berasal dari Jepang ini ditempatkan di setiap karesidenan masing-masing 4 orang. Mereka mengajar di tingkat sekolah lanjutan dan sekolah bahasa Jepang untuk umum (Aiko Kurasawa, 1998: 366).

Guru bahasa Jepang di sekolah tingkat dasar diambil dari guru-guru lokal yang telah dibekali kursus jangka pendek. Materi kursus yang diberikan yaitu

mengenai kecakapan bahasa, mereka juga diberi tunjangan. Besar tunjangan mencapai F 1,00 untuk tingkat 5, dan F 3,5 untuk tingkat 3 (Aiko Kurasawa, 1998: 367). Kelangkaan guru menyebabkan mutu pendidikan saat itu menjadi sangat rendah.

Pada masa Jepang, tenaga pendidik yang digunakan merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda. Namun, guru-guru tersebut diberikan latihan, kuliah, atau kursus singkat. Sayangnya, tidak semua guru pada jaman pemerintah Hindia Belanda memilih profesi yang sama ketika Jepang menduduki Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Saat itu, profesi guru dianggap kurang prestisius jika dibandingkan dengan pekerjaan lain, misalnya pegawai pemerintahan.

Banyak guru di era Hindia Belanda yang sudah berganti profesi ketika Jepang menduduki Indonesia.

Banyak guru yang tidak terbiasa mengajar dengan menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jepang, karena selalu memakai bahasa Belanda ketika mengajar pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Meskipun demikian, guru yang tetap ingin melanjutkan profesinya di masa pendudukan Jepang diberikan kursus-kursus singkat. Namun, tentu saja kursus singkat ini diberikan agar guru sekaligus bisa menjadi propagandis. Kursus ini tidak hanya diberikan untuk guru di sekolah umum, melainkan juga diberikan kepada para pengajar di pondok pesantren, misalnya ustadz atau kyai.

Pengajaran dalam kursus atau kuliah ini diberikan oleh pengajar lokal dengan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Namun, pengajar dari Jepang juga dihadirkan dan memberikan pelajaran dengan menggunakan bahasa Jepang tanpa disertai oleh penerjemah.

Program kuliah ini dilakukan selama 2-3 bulan dengan beragam tema yang bernuansa indoktrinasi, misalnya materi tentang bagaimana menggalang kerjasama dengan Jepang dan hal-hal yang menyangkut negeri penjajah itu,

termasuk bahasa Jepang, nyanyian Jepang, gerak badan (*taiso*), latihan kemiliteran (*kyoren*), pengajaran moral, dan kursus untuk guru perempuan dengan karakter khusus Jepang. Jumlah guru yang dilatih saat itu masih sangat terbatas, yaitu 692 guru pria dan 419 guru wanita pada tahun 1944 (Aiko Kurasawa, 1998: 372).

Pemerintah militer Jepang mencurahkan banyak waktu untuk melakukan indoktrinasi guru dengan “semangat Jepang”. Memahami pola pikir orang Jepang lebih ditekankan ketimbang membuat guru-guru memiliki persyaratan akademik dan memiliki teknik mengajar atau pengetahuan akademik yang mendalam (Aiko Kurasawa, 1998: 372).

Pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia juga memberlakukan kebijakan Ordonansi Guru yang pernah diterapkan pemerintah Hindia Belanda sebelumnya. Bahkan, menurut M.C. Riklefs (2008: 416), kebijakan Ordonansi Guru di era Jepang ini cenderung lebih keras, termasuk mewajibkan kepemilikan surat izin bagi guru-guru agama.

H. KOMPETENSI LULUSAN

Jepang memang mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Namun, dilihat dari hasilnya, kualitas siswa pada era Jepang bisa dikatakan lebih rendah dari pada masa Hindia Belanda. Hal ini disebabkan karena faktor dari guru dan siswa. Guru misalnya kualitasnya menurun karena pelatihan yang diberikan tidak maksimal, dan tenaga guru sangat terbatas. Selain itu, guru dan siswa mendapat beban tambahan. Beban tambahan tersebut menjadikan siswa dan guru tidak benar-benar berkonsentrasi dalam pelajaran di kelas.

Beban tambahan yang diberikan pada guru dan siswa seperti melakukan kerja bakti atau *kinro hoshi* untuk memperbaiki tempat umum, membangun dan memperbaiki infrastruktur, bekerja di pabrik-pabrik, berkerja di sawah, menanam pohon jarak, dan lainnya. Kerja bakti ini dilakukan oleh semua siswa

bahkan siswa sekolah rendah pada jam pelajaran akibatnya sedikit waktu untuk belajar. Kerja bakti ini bahkan menjadi bagian kurikulum sehingga proses pembelajaran yang lain menjadi terganggu.

Tidak hanya itu, proses belajar-mengajar juga terganggu dengan adanya *kushukeiho* atau tanda peringatan dari bahaya serangan udara. Peringatan serangan udara ini berupa sirene atau kentongan, dan ketika berbunyi siswa harus mengigit sepotong karet dan menyembunyikan diri di lubang perlindungan yang dibangun di dalam sekolah. Kejadian seperti ini sering berlangsung (Aiko Kurasawa, 368).

Siswa dan guru-guru yang selesai mengikuti pelatihan akan diberi ijazah. Nilai dikeluarkan sesuai dan diberikan untuk hasil pendidikan. Namun sayang, sejauh ini belum ditemui data yang akurat tentang sistem skor dan penilaian pada masa pendidikan Jepang.

Pada masa ini, hal yang penting dicatat adalah Jepang lebih menekankan untuk menghasilkan militer dan tenaga buruh, yang membuat usaha untuk pendidikan lanjutan menjadi kurang. Pendidikan dasar dan masyarakat melek huruf lebih ditekankan daripada penciptaan orang dengan kecakapan dan keahlian yang baik.

Menurut Aiko Kurasawa (1993: 362), pada akhir tahun pendudukan Jepang euforia sekolah sudah merosot dan siswa banyak yang mengalami *drop out*. Hal ini disebabkan karena krisis ekonomi sehingga siswa harus keluar dari sekolah untuk bekerja demi memenuhi kekurangan tenaga kerja akibat dari *romusha*.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, Abd. Rachman. 2005. Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi. Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Ki Hadjar Dewantara. 2004. Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Muhammad Said dan Junimar Affan. 1987. Mendidik dari Zaman Ke Zaman. Bandung: Jemmars.
- Najamuddin. 2005. Perjalanan Pendidikan Di Tanah Air (Tahun 1800-1945). Bandung: Rineka Cipta.
- Ricklefs, M.C. 2001. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi.
- Rifa'i, Muhammad. 2011. Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sjamsudin. 1993. Sejarah Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Depdikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Edi.Subkhan. 2010. Ki Hajar Dewantara Peletak Dasar Pendidikan Indonesia.
- Dedi Supriadi (Ed.). 2003. Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan, dan Perjuangan Sejak Zaman Kolonial hingga Era Reformasi. Jakarta: Depdikbud.
- Aiko Kurasawa, 1993, Mobilisasi dan Kontrol; Studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942-1945, Jakarta: Yayasan Karti Sarana dan Gramedia.
- Setijadi, 1975, Pendidikan di Indonesia 1900-1974, Jakarta: Balai Pustaka.
- M.C. Ricklefs, 2008, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Jakarta: Serambi.
- R. E. Elson, 2008, The Idea of Indonesia; Sejarah pemikiran dan Gagasan, Jakarta: Serambi.
- Roohiati Wiriaatmadja, 2002, Pendidikan Sejarah Indonesia: Perpektif Nasional, dan Global, Jakarta: Serambi.

BAB IV

PENDIDIKAN JAMAN ORDE LAMA: DARI KOLONIALISTIK SAMPAI NASIONALISTIK

A. LANDASAN FILSAFAT

Landasan dan visi pendidikan masa orde lama ketika itu diharapkan mampu menentukan tujuan pendidikan yang jelas. Karena, tujuan pendidikan yang jelas pada gilirannya akan mengarahkan ke pencapaian kompetensi yang dibutuhkan serta metode pembelajaran yang efektif. Dan pada akhirnya, kelak pendidikan mampu menjawab tuntutan untuk mensejahterakan masyarakat dan kemajuan bangsa. Pada awal kemerdekaan, pembelajaran di sekolah-sekolah lebih ditekankan pada semangat nasionalisme dan membela tanah air.

Pendidikan masa awal kemerdekaan berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah negara, kendati baru pada penentuan saja karena belum dijelaskan bagaimana meletakkan dasar itu pada tiap-tiap pelajaran (Somarsono Moestoko, 1986: 145). Pendidikan pada waktu itu dirumuskan untuk mendidik warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Dengan kata lain tujuan pendidikan pada masa itu penekanannya pada penanaman semangat patriotisme. Penanaman semangat patriotisme sebagai tujuan pendidikan memang sesuai dengan situasi pada waktu itu. Negara dan bangsa Indonesia sedang mengalami perjuangan fisik dan sewaktu-waktu pemerintah kolonial Belanda masih berusaha untuk menjajah kembali negara Indonesia. Maka dengan semangat itu, kemerdekaan dapat di pertahankan dan diisi (Somarsono Moestoko, 1986: 148)

Sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran dan pendidikan di negara republik Indonesia yang menjadi dasarnya berintisarikan pancasila, Sifat-sifat itu meliputi hal-hal berikut ini.

1. Perasaan bakti kepada Tuhan YME

Perasaan cinta kepada Alam

Perasaan cinta kepada Negara

Perasaan cinta dan hormat kepada Ibu dan Bapak

Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan

Perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya.

Keyakinan bahwa orang menjadi sebagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat.

Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama harganya, sebab itu berhubungan sesama anggota masyarakat harus bersifat hormat menghormati, berdasarkan atas ras keadilan dengan berpegang teguh atas harga diri sendiri.

Keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, tahu pada kewajiban, jujur dalam pikiran dan tindakannya.

Undang-undang dasar 1945 diganti dengan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat, walaupun demikian landasan idil pendidikan tetap tidak mengalami perubahan tetapi tujuan pendidikan. Dalam UU No 4/1950 Bab II, pasal, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Pendidikan di masa pascakolonial melahirkan beberapa hal diantaranya (Kartini Kartono, 1997: 49-50) sebagai berikut.

1. Terdapat banyak sikap hidup yang bisu dan kelu. Kebudayaan bisu dan budaya pedagogi yang hanya mengandalkan memori otak sehingga menjadikan sekolah hanya sebagai tempat untuk mendengarkan guru ceramah tanpa siswa diberikan kesempatan untuk berpikir kritis. Pada saat ini siswa tidak memiliki pilihan untuk tidak mengikuti metode ceramah ini, karena guru diposisikan sebagai subjek sentral yang harus dihormati oleh murid.

Penduduk dipinggiran kota (di kampung-kampung kumuh) ternyata belum mampu berkembang dan belum dapat diikutsertakan dalam proses pendidikan.

Model sekolah yang mengikuti model barat ternyata belum hilang bekas-bekas pengaruhnya dalam mengalami kegagalan.

Di sekolah-sekolah, bahasa ibu (bahasa daerah asli) didiskualifikasi secara sistematis, diganti dengan bahasa intelektual dan artifisial penguasa di bidang politik.

Kaum elit dan intelektual yang mendapatkan pendidikan dari luar negeri ternyata tidak akrab dengan masyarakat pribumi.

Perjuangan kemerdekaan menghasilkan kemerdekaan RI tahun 1945. Segera setelah kemerdekaan, para pemimpin Indonesia menjadikan pendidikan sebagai hak setiap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tujuan nasional. Dicanangkanlah bahwa dalam 10 tahun ke depan pada waktu itu seluruh anak Indonesia harus bisa menikmati sekolah. Oleh karena itu dilakukan berbagai pembenahan seperti penambahan jumlah pengajar, pembangunan gedung sekolah, dan sebagainya.

Pemerintah juga membagi tingkatan pendidikan seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi. Pada awal kemerdekaan, pembelajaran di sekolah-sekolah lebih ditekankan pada semangat nasionalisme dan membela tanah air. Soekarno, presiden pertama Indonesia membawa semangat "nation and character building" dalam pendidikan Indonesia. Di seluruh pelosok tanah air didirikan sekolah, dan anak-

anak dicari untuk disekolahkan tanpa dibayar. Untuk meningkatkan kualitas guru, didirikan pendidikan guru yang diberi nama KPK-PKB, SG 2 tahun, SGA/KPG, kursus B-1 dan kursus B-2. (Rianti Nugroho, 2008: 16). Oleh karena itu, secara garis besar pendidikan di awal kemerdekaan diupayakan untuk dapat menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara-negara maju, khususnya dalam mengejar ketertinggalan di berbagai sektor kehidupan.

Pada tanggal 29 Desember 1945 Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan supaya segera mungkin mengusahakan agar pembaharuan pendidikan dan pengajaran dijalankan sesuai dengan rencana pokok-pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru (Somarsono Moestoko, 1986: 145). Adapun pokok-pokok pengajaran tersebut adalah:

1. Untuk menyusun masyarakat baru perlu adanya perubahan pedoman pendidikan dan pengajaran. Paham perseorangan yang hingga kini berlaku haruslah diganti dengan paham kesusilaan dan peri kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab.

Untuk memperkuat persatuan rakyat kita hendaknya diadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat.

Metode yang berlaku di sekolah-sekolah hendaknya berdasarkan sistem sekolah kerja agar aktivitas rakyat kita kepada pekerjaan bisa berkembang seluas-luasnya. Lain dari perguruan-perguruan biasa hendaklah diadakan perguruan orang dewasa yang memberi pelajaran pemberantasan buta huruf dan seterusnya hingga bersifat Taman Ilmu Rakyat.

Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur seksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengantidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakekatnya

adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata, yang sudah berurat bakar dalam masyarakat Indonesia umumnya.

Pengajaran tinggi hendaknya diadakan seluas-luasnya dan jika perlu dengan menggunakan bantuan bangsa asing sebagai guru besar. Lain dari hal itu hendaklah diusahakan berlakunya pengiriman pelajar-pelajar ke luar negeri untuk keperluan negara.

Kewajiban belajar dengan lambat laun dijalankan dengan ketentuan bahwa dengan tempo yang sesingkat-singkatnya paling lama 10 tahun, bisa berlaku dengan sempurna dan merata.

Pengajaran teknik dan ekonomi terutama pengajaran pertanian, industri, pelayaran dan perikanan hendaklah mendapat perhatian istimewa.

Pengajaran kesehatan dan olahraga hendaklah tertur sebaik-baiknya hingga terdapat kemudian hasil kecerdasan rakyat yang harmonis.

Di sekolah Rendah tidak dipungut uang sekolah. Untuk sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi hendaklah diadakan aturan pembayaran dan tunjangan yang luas, sehingga soal keuangan jangan menjadi halangan bagi pelajar-pelajar yang kurang mampu.

Pada masa awal kemerdekaan pemerintah telah melakukan berbagai usaha di bidang pendidikan (Heliussjamsuddin, 1993: 11). Usaha-usaha tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Sejak Panitia Persiapan Kemerdekaan pada zaman Jepang telah terdapat didalamnya. Sub Panitia Pendidikan dan Pengajaran yang bertugas merumuskan rencana cita-cita dan usaha-usaha pendidikan dan pengajaran seperti telah di kemukakan.
2. Setelah proklamasi kemerdekaan, di dalam UUD 1945 dicantumkan pula pasal tentang pendidikan, yakni pasal 31 yang diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP).

3. Tahun 1946, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan Pengajaran yang bertugas meninjau kembali dasar-dasar, isi, susunan dan seluruh usaha pendidikan dan pengajaran.
4. Tahun 1947 diadakan kongres pendidikan Indonesia di Solo
5. Tahun 1948 menteri PP dan K membentuk panitia pembentukan rencana UUPP yang bertugas menyusun rencana UUPP.
6. Tahun 1949 kongres pendidikan di Yogyakarta dengan tugas merumuskan dasar-dasar pendidikan dan lain-lain.
7. Tahun 1950 rencana UUPP diterima oleh BPKNIP dengan suara terbanyak. Setelah disahkan oleh Acting Presiden dan Menteri PP dan K maka RUU itu diresmikan menjadi Undang-undang No 4 Tahun 1950 dengan nama undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Pada masa peralihan antara tahun 1945-1950 bangsa Indonesia merasakan berbagai kesulitan baik di bidang sosial ekonomi, politik maupun kebudayaan, termasuk pendidikan. Pada zaman penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah hanya beberapa persen saja yang sempat menikati sekolah, sehingga sisanya lebih dari 90% penduduk Indonesia masih buta huruf. Keadaan seperti sudah tentu menjadi beban yang berat sekali bagi pemerintah untuk segera dapat mengatasinya. Sementara itu antara tahun 1945-1950 telah beberapa kali terjadi pergantian menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, yaitu berikut ini.

- a. 19 Agustus 1945-14 Nopember 1945 :Ki Hajar Dewantoro.
- b. 14 Nopember 1945-12 Maret 1946: Mr. Dr. TGSG. Mulia
- c. 12 Maret 1946-2 Oktober 1946: Moh. Syafe'i
- d. 2 Oktober 1946 – 27 Juli 1947: Mr. Suwandi

- e. 3 Juli 1947-4 Agustus 1949: Mr. Ali Sastroamidjojo.
- f. 4 Agustus 1949-6 September 1950: S. Mangunsakoro.

Dengan singkatnya para menteri tersebut bertugas maka usaha-usaha untuk mengadakan perubahan dan perbaikan tidaklah dapat dirasakan secara maksimal. Beberapa usahanya yang diketuai adalah pembukaan Sekolah Guru A, Sekolah Guru B, dan Sekolah Guru C yang masing-masing lama pendidikannya 6 tahun, 4 tahun dan 2 tahun sejak tamat sekolah rendah. Menteri Suwandi dengan keputusan No. 104/Bhg-0/1946 tanggal 1 Maret 1946 telah membentuk suatu panitia penyelidikan pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara dan sekretarisnya Soegarda Purbakawatja yang bermaksud untuk mengatur-mengatur sekolah. Panitia ini selanjutnya menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat yang akhirnya telah menghasilkan pengaturan pendidikan dan pengajaran mulai dari pendidikan untuk anak desa sampai kota dan pendidikan umum kejuruan. Tugas yang diembankan kepada panitia ini adalah berikut ini.

- a. Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah

Menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan menimbangkan keperluan yang praktis dan jangan terlalu berat.

Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah

C. SISTEM PENDIDIKAN

1. Periode 1945-1950

Sistem persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk tiga tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan sedangkan rencana pembelajaran pada umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Buku-buku pelajaran yang digunakan adalah buku-buku hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dirintis sejak jaman Jepang

(Somarsono Moestoko, 1986: 17). Adapun sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1945-1950 adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Rendah

Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan Sekolah Rakyat (SR) lama pendidikannya semula 3 tahun. Maksud pendirian SR ini adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Mengingat kurikulum SR diatur sesuai dengan putusan Menteri PKK tanggal 19 November 1946 NO 1153/Bhg A yang menetapkan daftar pelajaran SR dimana tekanannya adalah pelajaran bahasa berhitung. Hal ini dapat terlihat bahwa dari 38 jam pelajaran seminggu, 8 jam adalah untuk bahasa Indonesia, 4 jam untuk bahasa daerah dan 17 jam berhitung untuk kelas IV < V dan VI. Tercatat sejumlah 24.775 buah SR pada akhir tahun 1949 pada akhir tahun 1949 di seluruh Indonesia.

b. Pendidikan Guru

Dalam periode antara tahun 1945-1950 dikenal tiga jenis pendidikan guru yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekolah Guru B (SGB) lama pendidikan 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan SR yang akan lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. Pelajaran yang diberikan bersifat umum untuk di kelas I, II, III sedangkan pendidikan keuruan baru diberikan di kelas IV. Untuk kelas IV ini juga dapat diterima tamatan sekolah SMP, SPG dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang membawahnya sejumlah guru dan diantaranya merupakan tenaga tidak tetap karena memang sangat kekuarangan guru tetap. Adapun sistem ujian pelaksanaannya dipecah menjadi dua yaitu, pertama ditempuh di kelas II dan ujian kedua di kelas IV.
- 2) Sekolah Guru C (SGC) berhubung kebutuhan guru SR yang mendesak maka terasa perlunya pembukaan sekolah guru yang dalam tempo singkat dapat menghasilkan. Untuk kebutuhan tersebut didirikan sekolah guru dua tahun

setelah SR dan di kenal dengan sebutan SGC tetapi karena dirasakan kurang bermanfaat kemudian ditutup kembali dan diantaranya dijadikan SGB.

- 3) Sekolah guru A (SGA) karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf pendidikan guru, maka dibukalah SGA yang memberi pendidikan tiga tahun sesudah SMP. Disamping itu dapat pula diterima pelajar-pelajar dari lulusan kelas III SGB. Mata pelajaran yang diberikan di SGA sama jenisnya dengan mata pelajaran yang diberikan di SGB hanya penyelenggaraannya lebih luas dan mendalam.

c. Pendidikan Umum

Ada dua jenis pendidikan Umum yaitu sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah Tinggi (SMT).

- 1) Sekolah Menengah Pertama (SMP) seperti halnya pada zaman jepang, SMP mempergunakan rencana pelajaran yang sama pula, tetapi dengan keluarnya surat keputusan menteri PPK thun 1946 maka diadakannya pembagian A dan B mulai kelas II sehingga terdapat kelas II A,IIB, IIIA dan IIIB. Dibagian A diberikan juga sedikit ilmu alam dan ilmu pasti.Tetapi lebih banyak diberikan pelajaran bahasa dan praktek administrasi.Dibagian B sebaliknya diberikan Ilmu Alam dan Ilmu Pasti.
- 2) Sekolah Menengah Tinggi (SMT): Kementerian PPK hnaya mengurus langsung SMAT yang ada di jawa terutama yang berada di kota-kota sperti: Jakarta,bandung, semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Cirebon. SMT di Luar Jawa berada di bawah pengawasan pemerintah daerah berhubung sulitnya perhubungan dengn pusat. SMT merupakan pendidikan tiga tahun setelah SMP dan setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Mengenai rencana pelajaran belum jelas, dan yang diberikan adalah rencana pelajaran dalam garis besar saja.Karena pada waktu itu msaih harus menyesuaikan dengan keadaan zaman yang masih belum stabil. Demikian rencana pembelajaran yang berlaku yaitu: (1) isinya memenuhi

kebutuhan nasional, (2) bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia, (3) mutunya setingkat dengan SMT menjelang kemerdekaan. Ujian akhir dapat diselenggarakan oleh masing-masing sekolah selama belum ada ujian negara, tetapi setelah tahun 1947 barulah berlaku ujian negara tersebut.

d. Pendidikan Kejuruan

Yang dimaksud dengan pendidikan kejuruan adalah Pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan:

- 1) Pendidikan ekonomi: pada awal kemerdekaan pemerintah baru dapat membuka sekolah dagang yang lama, pendidikannya tiga tahun sesudah Sekolah Rakyat. Sekolah dagang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau pembukuan, sedangkan penyelenggaraan sekolah dagang tersebut dilaksanakan oleh inspektur sekolah dagang.
- 2) Pendidikan Kewanitaan: sesudah kemerdekaan dimana pemerintah membuka Sekolah Kepandaian Putri (SKP) dan pada tahun 1947 sekolah guru kepandaian putri (SGKP) yang lama pelajarannya empat tahun setelah SMP atau SKP.

e. Pendidikan Teknik

- 1) Seperti sekolah lain, keadaan Sekolah Teknik tidaklah teratur karena disamping pelajarnya sering terlibat dalam pertahanan negara, sekolah tersebut kadang-kadang juga dipakai sebagai pabrik senjata. Sekolah Teknik di Solo misalnya, dikerahkan untuk membuat senjata yang sangat diperlukan kendali apa adanya. Adapun sekolah-sekolah teknik yang ada pada masa itu ialah:
- 2) Kursus Kerajinan Negeri (KKN): sekolah/kursus ini lamanya satu tahun lamanya dan merupakan pendidikan teknik terendah berdasarkan SR enam tahun. KKN terdiri atas jurusan-jurusan: kayu, besi, anyaman, perabot rumah, las dan batu.

- 3) Sekolah Teknik Pertama (STP): bertujuan mendapatkan tenaga tukang yang terampil tetapi disertai dengan pengetahuan teori. Lama pendidikan ini dua tahun sesudah SR dan terdiri atas jurusan-jurusan: kayu, batu, keramik, perabot rumah, anyaman, besi ,listrik, mobil, cetak, tenun kulit, motor, ukur tanah dan cor.
- 4) Sekolah Teknik (ST): bertujuan mendidik tenaga-tenaga pengawasan bangunan. Lama pendidikan dua tahun setelah STP atau SMP bagian B dan meliputi jurusan-jurusan: bangunan gedung, bangunan air dan jalan, bangunan radio, bangunan kapal, percetakan dan pertambangan.
- 5) Sekolah Teknik menengah (STM): bertujuan mendidik tenaga ahli teknik dan pejabat-pejabat teknik menengah. Lama pendidikan empat tahun setelah SMP bagian B atau ST dan terdiri atas jurusan-jurusan: bangunan gedung, bangunan sipil, bangunan kapal, bangunan mesin, bangunan mesin, bangunan listrik, bangunan mesin kapal, kimia, dan pesawat terbang.
- 6) Pendidikan guru untuk sekolah-sekolah teknik: untuk memenuhi keperluan guru-guru sekolah teknik, dibuka sekolah/kursus-kursus untuk mendidik guru yang menghasilkan:
 - a) Ijazah A Teknik (KGSTP) guna mengajar dengan wewenang penuh pada STP dalam jurusan: bangunan sipil, mesin, listrik dan mencetak.
 - b) Ijazah B I Teknik (KGST) untuk mengajar dengan wewenang penuh pada ST/STM kelas I dalam jurusan bangunan sipil, bangunan gedung-geung dan mesin.
 - c) Ijazah B II Teknik guna mengajar dengan wewenang penuh pada STM dalam jurusan bangunan sipil, bangunan gedung, mesin dan listrik.

f. Pendidikan Tinggi

Dalam periode 1945-1950 kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga

pendidikan ini berkembang pesat tetapi karena adanya pelaksanaannya di lakukan perjuangan fisik maka perkuliahan kerap kali di sela dengan perjuangan garis depan.

Lembaga pendidikan yang ada adalah Universitas Gajah Mada, beberapa sekolah tinggi dan akademi di Jakarta (daerah kependudukan) Klaten, Solo dan Yogyakarta. Sistem persekolahan Serta tujuan dari masing-masing tingkat pendidikan diatas diatur dalam UU No 4 Th 1950 bab V pasal 7 sebagai berikut.

Tentang jenis pendidikan dan pengajaran dan maksudnya.

1. Pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah.
2. Pendidikan dan pengajaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat dan kesukaannya masing-masing dan memberikan dasr-dasar pengetahuan, kecakapan, dan ketangkasan baik lahir maupun batin.
3. Pendidikan dan pengajaran menengah umum (umum dan vak) bermaksud melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah-sekolah rendah untuk mengembangkan cara hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.
4. Pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.

5. Pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rohaninya supaya mereka dapat memiliki hidupnya lahir batin yang layak.

g. Pendidikan Tinggi Republik

Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi kendati mengalami berbagai tantangan, tetapi tidak juga dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan merupakan salah satu kekuatan dari seluruh kekuatan rakyat Indonesia. Sejak awal kemerdekaan di Jakarta pada waktu merupakan daerah pendudukan Belanda, berdiri sekolah Tinggi kedokteran sebagai kelanjutan Ika Daigaku zaman Jepang. Pada bulan Nopember 1946 dibuka pula Sekolah Tinggi Hukum serta filsafat dan sastra. Setelah aksi agresi militer I kedua lembaga pendidikan tinggi terakhir ini ditutup oleh Belanda sehingga secara resmi sudah tidak ada lagi, dengan demikian pendidikan tinggi waktu itu terpecah menjadi dua yaitu pendidikan tinggi republik dan Pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda. Tetapi kuliah-kuliah masih dilanjutkan di rumah-rumah dosen sehingga merupakan semacam kuliah privat. Sebelum agresi militer I di Malang terdapat pula lembaga pendidikan tinggi republik, dengan adanya. Demikian pula terdapat sekolah tinggi kedokteran hewan sekolah tinggi teknik di Bandung dipindahkan ke Yogyakarta (Helius Sjamsuddin, 1993: 11).

Sementara itu daerah Republik Indonesia sendiri terdapat lembaga-lembaga pendidikan tinggi sebagai berikut:

1. Di Yogyakarta

Universitas Gadjah Mada dengan fakultas-fakultas:

- a) Hukum dengan masa 4 tahun kuliah
- b) Sastra dan Filsafat dengan masa 5 tahun kuliah
- c) Sekolah tinggi Islam Indonesia dalam bidang studi:
- d) Ilmu Ke-Tuhanan (Usuludin)
- e) Ilmu pendidikan

- f) Ilmu Hukum
- g) Ilmu ekonomi
- h) Sekolah Tinggi Teknik dengan masa 4 tahun kuliah dengan jurusan:
 - Teknik sipil
 - Eklektro
 - Kimia
 - Akademi politik
 - Akademi polisi

2. Di Klaten

- a) Sekolah Tabib (kedokteran) Tinggi, hanya sampai tingkatan kandidat.
- b) Sekolah Tinggi Farmasi
- c) Sekolah Tinggi Pertanian.

3. Di Solo

- a) Sekolah Tabib (Kedokteran) Tinggi, tingkat doktoral sebagai kelanjutan dari sekolah Tinggi di klaten.

h. Pendidikan Tinggi di Daerah Pendudukan Belanda

Atas prakarsa pihak belanda pada bulan Januari 1946 didirikan suatu universitas darurat (NOOD Universiteit) yang terdiri dari lima fakultas yaitu fakultas-fakultas kedokteran, hukum, sastra dan filsafat dan pertanian di jakarta dan fakultas teknik di bandung.

Pada bulan Maret 1947 oleh pemerintah belanda secara resmi nama universitas darurat diganti dengan nama Universitas Indonesia (Universiteit Van Indonesie). Pada Tahun 1947 juga universitas tersebut di perluas dengan fakultas ilmu pasti dan alam di Bandung, kedokteran hewan di Bogor, Kedokteran di

Surabaya dan Ekonomi di maksar (Ujung Pandang). Pada Bulan Maret 1948 fakultas pertanian di pindahkan ke Bogor.

2. Periode 1950-1966

Masa revolusi pendidikan nasional mulai meletakkan dasar-dasarnya. Pada masa revolusi sangat terasa serba terbatas, tetapi bangsa kita dapat melaksanakan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kita dapat merumuskan Undang Undang Pendidikan No. 4/1950 junto no. 12/ 1954. Kita dapat membangun sistem pendidikan yang tidak kalah mutunya. Para pengajar, pelajar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya walaupun serba terbatas. Dengan segala keterbatasan itu memupuk pemimpin-pemimpin nasional yang dapat mengatasi masa pancaroba seperti rongrongan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sayang sekali pada akhir era ini pendidikan kemudian dimasuki oleh politik praktis atau mulai dijadikan kendaraan politik. Pada masa itu dimulai pendidikan indoktrinasi yaitu menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan Orde Lama. Pada Orde Lama sudah mulai diadakan ujian-ujian negara yang terpusat dengan sistem kolonial yang serba ketat tetapi tetap jujur dan mempertahankan kualitas.

Hal ini didukung karena jumlah sekolah belum begitu banyak dan guru-guru yang ditempa pada zaman kolonial. Pada zaman itu siswa dan guru dituntut disiplin tinggi. Guru belum berorientasi kepada yang material tetapi kepada yang ideal. Citra guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang diciptakaan era Orde Baru sebenarnya telah dikembangkan pada Orde Lama. Kebijakan yang diambil pada Orde Lama dalam bidang pendidikan tinggi yaitu mendirikan universitas di setiap provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Pada waktu itu pendidikan tinggi yang bermutu terdapat di Pulau Jawa seperti UI, IPB, ITB, Gajah Mada, dan UNAIR, sedangkan di provinsi-provinsi karena kurangnya persiapan dosen dan keterbatasan sarana

dan prasarana mengakibatkan kemerosotan mutu pendidikan tinggi mulai terjadi.

Secara umum pendidikan orde lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada prinsipnya konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas social (Moh. Yamin, 2009: 87). Pada masa ini Indonesia mampu mengeksport guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangsi seseorang untuk belajar di sekolah, karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat inilah merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.

Orde lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya, inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu, sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka dan tidak ada yang mendikte peserta didik. Tidak ada nuansa kepentingan politik sektoral tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara maupun kaum dominan pemerintah. Soekarno pernah berkata: "...sungguh alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru di perguruan taman siswa itu satu persatu adalah Rasul Kebangunan! Hanya guru yang dadanya penuh dengan jiwa kebangunan dapat 'menurunkan' kebangunan ke dalam jiwa sang anak," (Moh. Yamin, 2009: 92).

Dari perkataan Soekarno itu sangatlah jelas bahwa pemerintahan orde lama menaruh perhatian serius yang sangat tinggi untuk memajukan bangsanya melalui pendidikan. Di bawah menteri pendidikan Ki Hadjar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem “among” berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai “Panca Dharma Taman Siswa” dan semboyan “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan (jo) menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada 1961 diundangkan UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, dilanjutkan dengan UU No.14/1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan UU No. 19/1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Pada masa akhir pendidikan Presiden Soekarno, 90 % bangsa Indonesia berpendidikan SD.

D. PESERTA DIDIK

1. Periode tahun 1945-1950

Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia memberi kesempatan belajar kepada segala lapisan masyarakat. Di dalam UUD 1945, BAB XIII, Pasal 31, Ayat 1 dikatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Demikian pula dalam Undang-undang No.4 tahun 1950, tentang Dasar-dasar pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Bab XI, Pasal 17 menegaskan bahwa: “Tiap-tiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.”

Kedua penjelasan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memberi kesempatan belajar yang sama kepada setiap anak, baik untuk pendidikan rendah, menengah, maupun pendidikan tinggi. Hal ini juga

berarti bahwa setiap anak dari golongan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memasuki sekolah tertentu.

Kesempatan belajar yang diberikan kepada anak-anak berakibat pada perkembangan peserta didik dari tahun ke tahun selalu bertambah. Dalam tahun 1950 jumlah peserta didik SD, SLTP, dan SLTA mengalami pertumbuhan rata-rata 100% dibandingkan dengan jumlah peserta didik pada tahun 1945. Sedangkan di Perguruan Tinggi, jumlah mahasiswa mengalami pertambahan 200 persen lebih dibandingkan dengan keadaan tahun 1945. Pertambahan peserta didik yang cukup tajam menunjukkan adanya minat yang besar untuk bersekolah dalam upaya memperoleh penguasaan ilmu pengetahuan serta meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

2. Periode tahun 1951-1969

Seperti halnya pada pendidikan periode 1945-1950, kesempatan belajar juga diberikan seluas-luasnya kepada setiap anak Indonesia. Kesempatan itu tercantum dalam UU No.4 Tahun 1950 dan UU No. 12 Tahun 1954, Pasal 17 yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara RI mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.”

Di samping itu, dalam pasal 21, Ayat 1 dinyatakan bahwa sekolah-sekolah negeri menerima murid-murid laki-laki dan perempuan, bahkan dalam keadaan tertentu pendidikan dapat diberikan secara khusus dan terpisah.

Pada periode ini, pemerintah memberikan kesempatan belajar bagi setiap golongan masyarakat, seperti anak petani, pedagang, pegawai negeri, pengusaha, anggota ABRI, untuk mendapatkan pendidikan dari Tingkat Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Selain itu pemerintah juga memberikan kesempatan belajar bagi golongan masyarakat untuk mencapai tingkat yang tertinggi, asalkan memenuhi syarat. Bagi warga masyarakat yang tingkat sosial

ekonominya rendah namun berprestasi dapat meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi dengan bantuan pemerintah yaitu beasiswa. Pemerintah juga memberikan kesempatan belajar bagi setiap golongan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.

E. KURIKULUM PENDIDIKAN

1. Kurikulum Pendidikan Periode tahun 1945-1950

Salah satu upaya untuk mengembangkan pendidikan nasional dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, yaitu Mr. Soewandi yaitu mengubah sistem pendidikan dan pengajaran sehingga lebih sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia. Sistem pendidikan yang semula bercorak colonial berganti menjadi sistem pendidikan yang bercorak nasional.

Sebagai konsekuensi perubahan sistem, kurikulum pada semua tingkat pendidikan mengalami perubahan pula. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda "*leer plan*" artinya rencana pelajaran. (Ary H. Gunawan, 1986: 48).

Kurikulum yang semula diorientasikan pada kepentingan kolonial kini diubah selaras dengan kebutuhan bangsa yang merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Rencana pelajaran yang diterapkan pada setiap jenjang pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengurangi pendidikan pemikiran
- b) Menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari.
- c) Memberikan perhatian terhadap kesenian.
- d) Meningkatkan pendidikan watak.
- e) Meningkatkan pendidikan jasmani.
- f) Meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat.

Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan “Rencana Pelajaran SR 1947”, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi Rencana Pelajaran SR 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah: pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat.

Rencana Pelajaran SR 1947, susunannya amat sederhana, yaitu hanya memuat dua unsur pokok. Adapun kedua unsur pokok tersebut adalah (1) daftar jam pelajaran atau struktur program, dan (2) garis-garis besar program pengajaran. Rencana Pelajaran SR 1947 membedakan tiga macam struktur program, yaitu: pertama, untuk sekolah yang mempergunakan pengantar bahasa Daerah (Jawa, Sunda, dan Madura) pada kelas-kelas yang lebih rendah; kedua, untuk sekolah yang berbahasa pengantar Indonesia mulai kelas 1; ketiga, untuk sekolah yang diselenggarakan sore hari karena terpaksa oleh keadaan (terbatas sampai kelas IV, sedangkan kelas V dan VI harus diselenggarakan pagi hari).

Dengan demikian, susunan program pengajaran dalam Rencana Pelajaran 1947 terdiri dari 16 mata pelajaran, dengan tiga catatan di antaranya adalah:

1. Bahasa daerah (Jawa, Sunda, dan Madura) bagi murid yang bersangkutan
2. Pekerjaan keputrian bagi anak-anak perempuan
3. Pendidikan agama bagi anak-anak pemeluk agama bersangkutan

Perubahan kurikulum ini menyangkut pula penggantian bahasa pengantar. Bahan pelajaran yang semula bersifat Belanda diganti menjadi bersifat Indonesia yang bertujuan memupuk rasa kebangsaan, misalnya dengan menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berlaku sesudah kemerdekaan disebut Daftar Pelajaran SMP yang digunakan kurun waktu 1945-1962. Adapun Struktur Program SMP sebelum tahun 1962 meliputi Sembilan kelompok mata pelajaran yaitu kelompok bahasa, ilmu pasti, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, pelajaran ekonomi, pelajaran ekspresi, pendidikan jasmani, budi pekerti, dan agama.

Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digunakan dalam kurun waktu 1945-1950 tidak jauh berbeda dengan kurikulum AMS. Perbedaannya hanya pada mata pelajaran bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kurikulum AMS Bagian B memberikan pelajaran bahasa Belanda dan tidak memberikan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kurikulum SMA jurusan B memberikan pelajaran bahasa Indonesia dan tidak memberikan bahasa Belanda.

2. Kurikulum Pendidikan Periode tahun 1951-1969

Bertitik tolak pada tujuan pendidikan nasional seperti ditegaskan dalam UU No.4, Tahun 1950, tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah dirumuskan pula pada tujuan kurikuler menurut jenjang-jenjang pendidikan berikut:

- a. Kurikulum pendidikan rendah ditujukan untuk menyiapkan anak agar memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan, dan ketangkasan baik lahir maupun batin, serta mengembangkan bakat dan minat.
- b. Kurikulum pendidikan menengah ditujukan untuk meneruskan pelajaran ke pendidikan tinggi, serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus, sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat.
- c. Kurikulum pendidikan tinggi ditujukan untuk menyiapkan pelajar agar dapat menjadi pimpinan dalam masyarakat dan dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.

Kurikulum yang pertama digunakan dalam kurun waktu ini adalah kurikulum 1950. Dalam perkembangannya, kurikulum 1950 berubah menjadi kurikulum 1958 yang dipergunakan sampai dengan tahun 1964. Kemudian kurikulum diperbarui dan menghasilkan kurikulum 1964 yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 1965. Kurikulum ini pun masih mengalami perubahan dengan lahirnya Kurikulum 1968, yang mulai dilaksanakan pada tahun 1969. Kurikulum SMP, SMA,

SMEA, SKKP, dan SKKA diberlakukan pada tahun 1969, sedangkan untuk SMEP dan SPG mulai berlaku tahun 1970.

a. Kurikulum Sekolah Dasar

Kurikulum sekolah dasar pada kurun waktu 1951-1968/1969 mengalami dua kali perubahan yaitu kurikulum 1964 dan kurikulum 1968. Kurikulum SD 1964 dilaksanakan mulai tahun 1965 sampai tahun 1968, sedangkan kurikulum SD 1968 digunakan mulai tahun 1968. (Prof. Soegarda Poerbakawatja, 1970: 38)

Susunan Rencana Pendidikan SD 1964 masih sederhana, yaitu mencakup unsur pokok: dasar dan tujuan serta sistem pendidikan dasar, struktur program kurikulum, garis-garis besar program pengajaran tiap wardhana, dan pedoman pelaksanaan hari krida di sekolah dasar. Rencana Pendidikan SD 1964 membedakan dua mavam struktur program, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk sekolah-sekolah yang menggunakan pengantar bahasa daerah dari kelas I sampai kelas II.
2. Untuk sekolah-sekolah yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia mulai kelas I.

Kurikulum SD 1968 terdiri dari empat unsur pokok, yaitu dasar, tujuan, dan asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional Pancasila di Sekolah Dasar. Struktur program atau kerangka kurikulum Sekolah Dasar, bahan pendidikan atau garis-garis besar, program pengajaran, serta pedoman evaluasi atau pengisian dan penggunaan Buku Rapor murid Sekolah Dasar.

Kurikulum SD 1968 masih menggunakan dua macam struktur program, yaitu program untuk sekolah-sekolah yang menggunakan pengantar bahasa Daerah sampai kelas III, dan program untuk sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia mulai dari kelas I.

b. Kurikulum SMP

Dalam kurun waktu 1951-1968, Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) mengalami dua kali perubahan, yaitu Kurikulum SMP

1962 dan Kurikulum SMP 1967. Kurikulum SMP 1962 dilaksanakan mulai tahun 1962 sampai tahun 1968, sedangkan kurikulum SMP 1967 mulai digunakan tahun 1968.

Kurikulum 1962 disebut juga Rencana Pelajaran SMP Gaya Baru. Dalam Konferensi Pengawas seluruh Indonesia, bulan Juli 1962 di Tugu Bogor, Rencana Pelajaran SMP diubah dan disesuaikan dengan Sistem Pendidikan Pancawardhana. Terjadi beberapa perubahan penting, antara lain:

- 1) Pertama, penghapusan bagian A dan B pada kelas III SMP yang dimaksudkan untuk menghilangkan rasa rendah diri pada siswa bagian A, dan sebaliknya menghilangkan rasa lebih tinggi pada siswa bagian B.
- 2) Kedua, penambahan dua mata pelajaran baru ke dalam Rencana Pelajaran SMP, yaitu Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Keluarga.
- 3) Ketiga, dimasukkannya jam krida dengan maksud memberikan kesempatan luas bagi para siswa untuk menemukan atau memupuk bakat dan minat mereka masing-masing di bawah bimbingan yang teratur dari guru, dan selanjutnya untuk mengembangkan karya yang berguna bagi siswa kelak dalam kehidupan masyarakat.
- 4) Keempat, Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan yang dimaksudkan untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang diri para siswa (kecuali melalui krida).

Pengelompokan mata pelajaran dalam Rencana Pelajaran yang disusun dibagi menjadi empat kelompok, sebagai berikut:

- 1) Kelompok Dasar adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk melahirkan warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila dan berjiwa patriot paripurna serta sehat dan kuat jasmaniah dan rohaniyah.
- 2) Kelompok Cipta adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan sehingga dapat mewujudkan tenaga kejuruan yang ahli.

- 3) Kelompok Rasa/Karsa adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan membiasakan anak didik memenuhi tuntutan sosial masyarakat Indonesia, supaya anak didik cinta kepada keindahan.
- 4) Krida adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk memupuk minat, bakat, dan kemampuan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar tanggal 2 Agustus 1968 No. 342/ukk/68, Rencana Pendidikan SMP yang telah disempurnakan, yaitu Kurikulum SMP 1968 mulai berlaku pada awal ajaran 1968. Susunan program pengajaran dalam Rencana Pendidikan yang disempurnakan tahun 1967 dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertama; Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila; kelompok ini berfungsi untuk membina dan mempertinggi moral Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, serta membina jasmani yang sehat dan kuat.
- 2) Kedua; Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar; kelompok mata pelajaran ini bertujuan memberikan berbagai pengetahuan dasar yang berguna bagi anak didik untuk melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi.
- 3) Ketiga; Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus; kelompok ini bertujuan memberikan ketrampilan praktis yang berguna bagi siswa untuk bekal hidup dalam masyarakat.

c. Kurikulum SMA

Selama kurun waktu 1951-1968, Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atau Kurikulum SMA, mengalami empat kali perubahan yaitu kurikulum 1952, 1961, 1964, dan kurikulum 1968. Kurikulum SMA 1952 dilaksanakan mulai tahun 1952 sampai tahun 1961, kurikulum 1961 dilaksanakan mulai tahun 1962 sampai 1964, kurikulum 1964 dilaksanakan mulai tahun 1965 sampai tahun 1968, sedangkan kurikulum 1968 dilaksanakan mulai tahun 1969.

1) Kurikulum SMA 1952

Kurikulum SMA 1952 dikembangkan dengan tujuan untuk mempersiapkan murid masuk ke perguruan tinggi dan ke masyarakat. Sesuai dengan tujuan SMA, kurikulum SMA dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian A, B, dan C serta mata pelajaran digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu pokok, penting, dan pelengkap.

2) Kurikulum SMA 1961

Kurikulum SMA 1961 dikembangkan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap usaha pembaruan kurikulum yang telah dilakukan. Kurikulum SMA 1961, meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a) Pertama; tujuan SMA ialah mengembangkan cita-cita hidup serta mengembangkan kemampuan dan kesanggupan sebagai anggota bermasyarakat dan mendidik tenaga ahli dalam pelbagai lapangan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.
- b) Kedua; penggolongan mata pelajaran di SMA dibagi menjadi empat kelompok yang berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu: (1) Kelompok dasar (enam mata pelajaran) yaitu kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia, sejarah, ilmu bumi, dan pendidikan jasmani dan kesehatan; (2) Kelompok khusus (tujuh mata pelajaran), yaitu mata pelajaran yang sesuai dengan bakat siswa dan dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.; (3) Kelompok Penyerta (tiga mata pelajaran) yang dianggap perlu untuk memperluas mata pelajaran kelompok khusus; dan (4) Kelompok prakarya dan krida.
- c) Ketiga; penjurusan di SMA mulai dilaksanakan di kelas II dan menghapus jurusan A,B, dan C dengan mengganti jurusan Budaya, Sosial, Ilmu Pasti, dan Ilmu Pengetahuan.
- d) Keempat; Kurikulum SMA tahun 1961 disebut kurikulum Gaya Baru atau kurikulum SMA Gaya Baru.

3) Kurikulum SMA 1964

Kurikulum SMA 1961 berubah menjadi kurikulum SMA 1964, karena pengaruh kehidupan politik. Kurikulum 1964 disebut dengan kurikulum Pancawardhana. Tujuan kurikulum ini yaitu tujuan SMA semakin kompleks, tidak hanya untuk meneruskan ke perguruan tinggi tetapi juga terjun ke semua bidang kehidupan yang ada di masyarakat.

4) Kurikulum SMA 1968

Kurikulum SMA 1968 bertujuan untuk mengemablikan posisi pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila pasca terjadinya peristiwa G 30 S pada tahun 1965. Berdasarkan kurikulum ini, tujuan pendidikan SMA adalah sebagai berikut:

- a) Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti dikehendaki oleh Pembukaan dan Isi UUD 1945.
- b) Mempersiapkan anak didik untuk memasuki perguruan tinggi dengan jalan mematangkan mental dan intelegensi yang dilengkapi dengan dasar-dasar umum kecakapan kejuruan dan pembinaan perkembangan fisik yang kuat dan sehat.
- c) Memberikan dasar keahlian umum kepada anak didik sesuai dengan bakat dan minat masing-masing dalam pelbagai lapangan sehingga tamatannya dapat mengembangkan dirinya pada lembaga-lembaga pendidikan lain dan lembaga masyarakat.

3. Kurikulum Sekolah Kejuruan

Pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan secara intensif baru dilaksanakan antara tahun 1964 sampai 1968. Pada tahun 1967 disusun kurikulum baru yang disebut Kurikulum 1968.

Kurikulum sekolah kejuruan 1968 yang dilaksanakan pada tahun 1968 adalah kurikulum untuk STM dan kursus-kursus seperti KPA, KKP, KKPA, dan KPAA;

sedangkan kurikulum untuk SKKP, SKKA, dan SMEA dilaksanakan pada tahun 1969. Khusus untuk sekolah kesenian, yaitu Sekolah Seni Rupa (SSRI), Sekolah Musik Indonesia (SMIND), dan Konservatori Karawitan (KOKAR), dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.

4. Kurikulum Sekolah Keguruan

Pada tanggal 31 Juli 1961 semua Sekolah Guru B (SGB) yang setingkat dengan SLTP dihapus dan dialihfungsikan menjadi SMTP jenis lain sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Juli 1957 No.69691/S tentang Penghapusan SGB terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1958. Sebagai tindak lanjut, Sekolah Guru A (SGA) diubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG), dan Sekolah Guru Pendidikan Jasmani (SGPD) diubah menjadi Sekolah Guru Olahraga (SGO).

F. TENAGA PENDIDIK

1. Tenaga Pendidik Periode tahun 1945-1950

Untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah melakukan upaya-upaya peningkatan untuk mempertahankan suasana belajar agar proses belajar-mengajar dapat berlangsung walaupun dengan guru dan peralatan yang masih sederhana.

Selain gedung sekolah, pemerintah juga dihadapkan pada masalah tenaga pengajar. Seperti diketahui, tenaga pengajar sebelum masa kemerdekaan kebanyakan terdiri dari tenaga guru untuk sekolah rendah yang sebagian besar tidak mempunyai latar belakang guru yang lengkap. Setelah kemerdekaan kekurangan tenaga pendidik semakin terasa pada semua tingkat pendidikan. Namun, yang sangat terasa adalah tenaga guru pada tingkat rendah.

Beberapa faktor penyebab kekurangan tenaga guru di tingkat pendidikan rendah ini adalah: pertama; karena banyak tenaga guru yang meninggalkan

posnya dan menggabungkan diri dengan laskar perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan; kedua; tuntutan rakyat untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan Pasal 31, UUD 1945 yang kemudian dikuatkan oleh UU No.4, Tahun 1950, Pasal 10 dan 17 sehingga pemerintah harus membuka banyak sekolah rakyat dan meningkatkan lama belajar tiga tahun menjadi enam tahun. Hal ini sudah tentu membutuhkan tenaga guru dalam jumlah yang besar. Pada tahun 1950 kekurangan tenaga guru untuk pendidikan rendah masih sebanyak 19.819 orang.

Di samping itu, masih terdapat 50.200 orang guru yang harus ditingkatkan pendidikannya. Untuk mengatasi kekuarangan tenaga guru, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menyelenggarakan pendidikan guru yang segera dapat menghasilkan guru-guru. Jenis-jenis pendidikan guru yang diadakan pada masa itu ialah Sekolah Guru C, Sekolah Guru B, dan Sekolah Guru A. Masing-masing pendidikan guru itu lamanya dua, empat, dan enam tahun sesudah Sekolah Dasar. Pemerintah kemudian menghapuskan Sekolah Guru C (dua tahun) atas saran dari PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), dengan pertimbangan bahwa pendidikan guru dua tahun kurang memenuhi syarat untuk mengajar dan kurang dewasa untuk menjadi guru.

2. Tenaga Pendidik Periode tahun 1951-1969

Pada tahun 1951 terdapat 10.962.000 anak usia sekolah dasar. Dari jumlah tersebut yang telah tertampung sejumlah 5.040.850. Untuk dapat menampung semua anak usia SD diperlukan tambahan sekitar 140 ribu orang guru.

Untuk mengatasi kekurangan guru tersebut maka didirikan Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPKPKB). Pelaksanaannya diselingi antara belajar dan mengajar selama empat tahun. Pada tahun 1953 semua KPKPKB dinyatakan sebagai SGB sehingga pada tahun tersebut antara 500 SGB di seluruh Indonesia. Untuk mengisi kebutuhan guru Sekolah Lanjutan, pada tahun 1954 didirikan PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama) sebanyak 26

sekolah dan Kursus B I dan B II masing-masing sebanyak 102 dan 3 sekolah. Selain itu, terdapat Sekolah Guru Taman Kanak-kanak (SGTK), Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP), dan Sekolah Guru Pendidikan Teknik (SGPT).

Selain guru menurut bidang studi atau guru kelas, diperlukan pula guru agama. Guru agama diperoleh dari lulusan Lembaga Pendidikan Guru yang diselenggarakan oleh Departemen Agama Atas (PGAA) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Namun, agar keperluan guru dapat segera terpenuhi, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menyelenggarakan program pendidikan guru secara darurat, yaitu PGSLP dan PGSLA yang disempurnakan untuk menghasilkan guru Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas

G. MODEL PEMBELAJARAN

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU RI No.4 tahun 1950, meskipun menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratis, yaitu kewajiban belajar sekolah dasar bagi anak-anak yang berumur 8 tahun. Oleh karena pelaksanaan kewajiban belajar ini menghadapi masalah kekurangan guru dan jumlah sekolah maka berdasarkan keputusan menteri pendidikan No.5033/F tanggal 5 Juli 1990 didirikanlah Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajiban Belajar (KPKPKB).

Hal ini berdampak pada model pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Model pembelajaran yang digunakan masih terbatas dan belum inovatif. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah guru dan keterbatasan anggaran pendidikan pada masa itu.

Model pembelajaran pada tahun 1964 mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan (problem solving). Rencana pendidikan 1964 melahirkan kurikulum 1964 yang menitik beratkan

pada pengembangan daya cipta, rasa, karya dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah panca wardhana.

Pada saat itu pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis, yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Cara belajar dijalankan dengan metode yang disebut gotong royong terpimpin. Selain itu pemerintah menerapkan hari Sabtu sebagai hari krida, maksudnya, pada hari Sabtu siswa diberi kebebasan berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan sesuai minat siswa. Kurikulum 1964 adalah alat untuk membentuk manusia Pancasila yang sosialis Indonesia, dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan MPKS No. 11 Tahun 1960.

H. SISTEM PENILAIAN

Di jenjang pendidikan dasar dan menengah diadakan ulangan untuk setelah beberapa pertemuan. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan masa sekarang. Meskipun demikian. Pada waktu itu tidak digunakan istilah formatif, sub-sumatif, ataupun sumatif.

Di kedua jenjang pendidikan ini tes tetap merupakan alat evaluasi yang utama. Dapat dikatakan hanya pemberian tugas yang merupakan alat evaluasi tambahan. Memang keadaan ini pun tidak berbeda dengan prinsipil dengan alat evaluasi yang digunakan guru sekarang. Walaupun demikian guru belum mengenal bentuk tes obyektif. Bentuk soal yang digunakan masih berupa uraian (esai). Bentuk ini digunakan di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dan terus digunakan tanpa ada perubahan dalam bentuk sampai nantinya digunakan bentuk tes obyektif.

Fungsi ujian akhir sekolah ini terutama adalah untuk mereka yang akan melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi di tahun terakhir SD, siswa yang akan melanjutkan pelajarannya ke SMTP diharuskan untuk menempuh ujiian negara. Demikian pula bagi mereka yang ingin melanjutkan dari SMTP ke SMTA sehingga pada waktu itu dikenal adanya mereka yang akan

tamat dan sekolah dan bagi mereka yang lulus dari suatu sekolah. Keadaan semacam ini nantinya berubah di mana siswa diminta untuk ikut untuk ujian akhir pendidikannya dan setelah itu mengikuti ujian masuk suatu sekolah keadaan ini terakhir berlangsung dari tahun 1970-1987 di mana kemudian diperkenalkan sistem Nilai Ebtanas Murni (NEM). Dengan model ini siswa tidak perlu lagi mengikuti tes masuk untuk sekolah yang akan di ikutinya.

Angka yang digunakan untuk apresiasi hasil yang diperoleh adalah dari 0-10. Skala ini masih digunakan samapai sekarang dan masih merupakan warisan pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di rapor bagi kelas I dan II yang asalnya berupa skor 10-100 menjadi huruf A, B, C, dan D. Sedangkan bagi kelas III hingga VI tetap menggunakan skor 10-100.

Perubahan baru terjadi pada masa pemerintahan orde baru. Pada masa in ujian lisan masih dilakukan di perguruan tinggi meskipun pelaksanaannya terus berkurang. Dosen-dosen senior yang sudah terbiasa dengan ujian lisan masih tetap melaksanakannya meskipun demikian mereka sudah mulai didesak oleh kenyataan banyaknya mahasiswa. Jumlah yang semakin hari semakin bertambah besar menetapkan para dosen penguji harus menyediakan waktu banyak untuk menguji mahasiswa, karena itu hanya terbatas pada perkuliahan dimana jumlah mahasiswa sangat kecil.

I. KOMPETENSI LULUSAN

Pada masa Orde Lama ini Indonesia mampu mengekspor lulusan (guru) ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. Pada masa akhir pendidikan Presiden Soekarno, 90 % bangsa Indonesia berpendidikan SD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ary. H. Gunawan. 1986. Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta:
Penerbit Bina Aksara.
- Haryatmoko. 2008. Menemukan Kembali Kebangsaan dan Kebangsaan. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Helius Sjamsuddin. 1993. Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1950). Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan: Jakarta.
- Moh. Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia*. Jogjakarta: Ar Ruz.
- M.C. Riklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Serambi Ilmu Semesta.
- Redja Mudyahardjo. 2010. Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar- dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
- Rianti Nugroho. 2008. Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Soegarda Poerbakawatja. 1970. Pendidikan dalam Alam Indonesia Terbuka. Djakarta:Gunung Agung.
- Somarsono Moestoko. 1986. Pendidikan Indonesia dari jaman ke jaman. Balai Pustaka: Jakarta.
- Wina Sanjaya. 2007. Kajian Kurikulum dan Pembelajaran. Bandung : Sekolah Pasca Sarjana UPI.

BAB V

PENDIDIKAN JAMAN ORDE BARU : PENGUATAN DEMOKRASI PANCASILA

A. LANDASAN FILSAFAT

Era Orde Baru (Orba) boleh dikatakan sudah dimulai sejak mulai berkurangnya kewenangan Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia pertama setelah terjadi peristiwa bersejarah yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan 30 September 1965 yang kebenarannya masih menjadi misteri hingga saat ini. Mayor Jenderal Soeharto yang memperoleh dukungan dari sebagian kalangan militer perlahan namun pasti mulai menyingkirkan Soekarno dari kekuasaannya sebagai presiden (Katharine E. McGregor, 2008: 41).

Secara *de facto*, era Orde Baru mulai berlaku sejak tahun 1966 hingga lengsernya Soeharto pada Mei 2008. Selain ekonomi, sektor pendidikan merupakan aspek yang menjadi fokus utama pemerintahan rezim Orde Baru dengan mengusung tujuan untuk “membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya”. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dua landasan utama Orde Baru dalam menjalankan pemerintahannya secara konsekuen, termasuk dalam sektor pendidikan.

Dengan demikian, Pancasila dan UUD 1945 menjadi dua asas yang paling dianut untuk mencapai tujuan pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Menurut Dirto Hadisusanto (1995), pengertian tujuan pendidikan adalah seperangkat sasaran ke mana pendidikan tersebut diarahkan. Adapun bentuk dari tujuan pendidikan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Dengan kata lain, tujuan pendidikan merupakan suatu sistem nilai yang disepakati kebenarannya dan kepentingannya dan ingin dicapai melalui berbagai kegiatan, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Dirto Hadisusanto, 1995: 59).

Tujuan pendidikan nasional yang pertamakali ditetapkan sejak era Orde Baru berkuasa di Indonesia adalah melalui Ketetapan MPRS Nomor XXVII Tahun 1966 Bab II Ayat 3. Di dalamnya disebutkan bahwa tujuan utama pendidikan di Indonesia adalah untuk mempersiapkan manusia yang berjiwa Pancasila sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (Ary H. Gunawan, 1981: 51).

Selanjutnya, melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973 ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah "membentuk manusia-manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggungjawab, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945." (Mohammad Ali, 2007: 322).

Pembaharuan tujuan pendidikan nasional kemudian diatur melalui Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1978 yang kemudian ditegaskan dalam GBHN yang berbunyi: "Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa." (Ary H. Gunawan, 1986: 51).

Pemerintah Orde Baru berpijak pada Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut tampaknya diterapkan sebagai antitesis landasan pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama yang dinilai oleh rezim Orde Baru terkontaminasi ide dan gagasan yang disisipi pemikiran berpaham sosialisme.

Meskipun demikian, Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dasar pendidikan nasional di era Orde Baru tidak sepenuhnya dijalankan dengan tujuan murni untuk mencerdaskan bangsa. Menurut Mohammad Ali (2009), penyelenggaraan pendidikan yang digalakkan oleh pemerintahan Orde Baru diorientasikan untuk mendukung sektor ekonomi yang memang menjadi fokus utama rezim kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu.

Target minimal pembangunan pendidikan di era Orde Baru adalah terbentuknya pengetahuan dan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan penggunaan bahasa Indonesia (Mohammad Ali, 2009: 16). Dengan kata lain, pendidikan pada masa Orde Baru bertujuan untuk menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berdayaguna dan pada akhirnya nanti mampu menggerakkan roda perekonomian negara.

B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Pendidikan pada masa kekuasaan Orde Baru menjadi salah satu kebijakan politik dan pemerintahan yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, pendidikan pada masa ini dijadikan sebagai salah satu sektor utama untuk menyokong pembangunan ekonomi Orde Baru.

Target utama pembangunan pendidikan nasional pada Repelita I (1969-1974) adalah pendidikan dasar 9 tahun yang semakin meluas dalam waktu 15 tahun, serta perbaikan kualitas, akses, dan relevansi pendidikan yang semakin terarah demi peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia (Mohammad Ali, 2009: 16). Kebijakan inilah yang tertuang dalam GBHN tahun 1973 seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Sedangkan pada Repelita II (1974 -1979), strategi kebijakan pendidikan nasional meliputi empat butir, yaitu: peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi pendidikan (Mohammad Yamin, 2009: 99). Konsep pendidikan nasional

ini bertahan cukup lama, bahkan masih diterapkan hingga akhir masa pemerintahan Orde Baru.

Produk pendidikan pada masa Orde Baru pernah identik dengan penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) serta mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Kedua produk ini disebut-sebut sebagai perwujudan bahwa pendidikan nasional pada era Orde Baru selalu berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945.

PMP adalah nama pengganti untuk mata pelajaran Kewarganegaraan yang telah diterapkan sebelum tahun 1976. Dalam pandangan Darmaningtyas (2004), digantinya nama pelajaran Kewarganegaraan menjadi PMP tersebut memiliki dampak politik yang cukup besar. Mata pelajaran Kewarganegaraan mengajarkan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga kewajiban negara terhadap rakyatnya (Darmaningtyas, 2004: 10). Dengan demikian, setiap peserta didik sudah diajarkan untuk bersikap kritis terhadap negara.

Bagi pemerintahan Orde Baru yang pada akhirnya dikenal sebagai rezim yang terkesan otoriter, pengajaran sikap kritis kepada peserta didik dikhawatirkan bisa menimbulkan efek yang tidak baik. Pasalnya, apabila setiap siswa lulusan sekolah memiliki sikap kritis terhadap pemerintah, maka akan memunculkan kesulitan tersendiri bagi kalangan penguasa.

Oleh karena itu, mata pelajaran Kewarganegaraan kemudian dihapuskan dan diganti dengan mata pelajaran PMP yang menekankan bahwa setiap siswa dan warga negara pada umumnya harus taat dan patuh terhadap negara tanpa dikenalkan dengan hak-haknya. Darmaningtyas (2004) pun menyimpulkan bahwa menjadi suatu hal yang wajar apabila kemudian produk yang lahir dari mata pelajaran SMP adalah orang-orang yang penurut, penakut, pengecut, tidak kritis, dan tidak berprinsip (Darmaningtyas, 2004: 11).

Bukan hanya soal PMP, penerapan penataran P4 juga menjadi sinyalemen bahwa pendidikan nasional di era Orde Baru terlalu banyak dicampuri dengan kepentingan politik penguasa. Kala itu, penataran P4 wajib diikuti oleh setiap

peserta didik, dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga jenjang perguruan tinggi, termasuk untuk para guru atau dosen. Sejak tahun 1984, penataran P4 menjadi hal yang harus diikuti oleh setiap siswa baru di semua sekolah di seluruh wilayah Indonesia (Darmaningtyas, 2004: 11).

Pemerintahan Orde Baru menegaskan bahwa P4 atau yang dikenal juga dengan nama Ekaprasetya Pancakarsa, adalah petunjuk operasional untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan. Rezim Soeharto saat itu mencanangkan tujuan dari penataran P4 adalah terwujudnya secara nyata sikap dan tingkah laku segenap aparatur pemerintah dan warga masyarakat yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Madiri Thamrin Sianipar, 1984: 60).

Penataran P4 menjadi unsur yang sangat penting dan menentukan bagi masa depan siswa dalam penyelenggaraan pendidikan di era Orde Baru. Franz Magnis-Suseno (2009), pernah berkata: "Di zaman Presiden Soeharto ada penataran P4. Salah satu ciri penataran itu adalah bahwa orang harus berada di tempat 10 menit sebelum acara dimulai. Semua harus diabsen dulu. Datang terlambat berarti dikeluarkan, padahal lulus penataran P4 penting bagi pegawai negeri dan banyak profesi lainnya." (Franz Magnis-Suseno, 2009).

Selain PMP dan penataran P4, ada juga upaya politisasi lainnya dalam proses pendidikan di zaman Orde Baru. Ketika Nugroho Notosusanto menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1983-1985), dimunculkanlah mata pelajaran Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) yang berlaku sejak Kurikulum 1984. PSPB menurut sebagian pengamat dinilai sebagai upaya hegemoni pendidikan yang lekat dengan nuansa politis karena hanya terfokus pada peranan Angkatan Darat dalam menghadapi PKI pada tahun 1965-1966 (Darmaningtyas, 2004 :13).

Darmaningtyas (2004) menilai bahwa penambahan mata pelajaran PSPB tersebut sebenarnya lebih dimaksudkan untuk menyenangkan kekuatan politik yang dominan pada saat itu, yakni ABRI (Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia), khususnya Angkatan Darat. Melalui mata pelajaran PSPB diharapkan secara evolutif para lulusan pendidikan formal memiliki apresiasi yang tinggi terhadap ABRI PMP, P4, ataupun PSPB bisa dikatakan merupakan upaya pemerintah Orde Baru untuk membentuk watak bangsa Indonesia (Darmaningtyas, 2004 :13).

Selain itu, salah satu kebijakan yang paling populer dalam penyelenggaraan pendidikan pada era Orde Baru adalah upaya penuntasan kemiskinan dan kebodohan melalui program Wajib Belajar 9 Tahun. Menurut A. Daliman (1995), program wajib belajar sebagai upaya untuk menuntaskan pendidikan dasar sebenarnya sudah mulai digagas sejak tahun 1950 meskipun belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya pergolakan politik yang terjadi secara terus-menerus (A. Daliman, 1995: 138).

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, pendidikan 9 tahun juga menjadi target utama dalam penyelenggaraan pendidikan untuk Repelita I. Namun, pada prakteknya, target pemenuhan pendidikan dasar selama 9 tahun ternyata masih cukup sulit untuk dijalankan sehingga pemerintah Orde Baru mereduksinya menjadi program Wajib Belajar 6 Tahun dengan target pengentasan pendidikan dasar hingga lulus Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau jenjang pendidikan lain yang sederajat.

Program Wajib Belajar 6 Tahun yang diresmikan pada tahun 1984 dicanangkan untuk meneguhkan dan mewujudkan komitmen pemerintah Orde Baru dalam upaya pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar. Program ini pun mencapai hasil yang diharapkan hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun sehingga program sebelumnya, yakni Wajib Belajar 9 Tahun, dirasa sudah bisa untuk diterapkan.

Pada tanggal 2 Mei 1994 bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, Presiden Soeharto secara resmi mencanangkan pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun (Mohammad Ali, 1997: 121). Sejak saat itulah, program pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun ditetapkan sebagai

gerakan nasional yang menjadi bagian dari pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun meliputi program Wajib Belajar 6 Tahun di tingkat SD/MI, dan dilanjutkan dengan program Wajib Belajar 3 tahun di tingkat SMP/MTs (Rahardjo Darmanto Djojodibroto, 2004: vii). Program Wajib Belajar 9 Tahun bertujuan untuk memberikan memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan oleh setiap orang untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Soedijarto (2008), kendati tidak sama persis dalam pelaksanaannya, program pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun juga diterapkan oleh negara-negara maju, seperti di Inggris dan Jerman (Soedijarto, 2008). Dua negara mapan di Eropa tersebut menempatkan jenjang pendidikan menengah sebagai tahapan untuk menyiapkan generasi muda yang secara akademik memenuhi syarat sebelum memasuki dunia kerja ataupun untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan dasar memang menjadi hak setiap manusia di negara manapun, seperti yang telah ditegaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal 26 Deklarasi Universal PBB tentang Hak Atas Pendidikan, seperti dikutip dari Shuttleworth (2008), mencakup tiga poin penting berikut ini:

1. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan. Pendidikan terendah harus diwajibkan, sedangkan pendidikan teknik dan kejuruan harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kecerdasan (Mary Bernice Shuttleworth, 2008: 27).
2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan yang mendasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan perdamaian.

3. Orangtua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anaknya. (Adnan Buyung Nasution, 1997: 118).

Pemerintah Orde Baru menerapkan program Wajib Belajar 9 Tahun. Direncanakan, program ini dapat dituntaskan dalam waktu 5 tahun sehingga pada tahun 1999 diharapkan masyarakat Indonesia yang mampu menyelesaikan pendidikan dasar hingga jenjang SMP mencapai 97 persen (Mohammad Ali, 2009: 17).

Pada kenyataannya, pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun ternyata mengalami kendala. Salah satu kesulitan yang utama adalah ketidakmampuan masyarakat dalam hal memenuhi biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang relatif tinggi menjadi faktor utama bagi masyarakat bawah sehingga mereka tidak dapat mengenyam pendidikan yang memadai. Selain itu, masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan justru membuat angka buta huruf dan kebodohan yang berimbas pada tingkat kemiskinan semakin meningkat.

H.A.R. Tilaar (2003) mengatakan, pemerintah harus sepenuhnya menanggung beban penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun (H. A. R. Tilaar, 2003: 201). Sejalan dengan itu, diharuskan adanya program peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun secara bertahap. Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun yang tuntas hanya dapat dilaksanakan apabila ditunjang dengan anggaran dana yang mencukupi dan negara harus menyediakannya seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

Kondisi ini diperparah dengan krisis moneter yang melanda perekonomian Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pada tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun berikutnya. Akibatnya, Indonesia mengalami krisis multidimensional yang pada akhirnya membuat Presiden Soeharto harus *lengser keprabon* pada Mei 1998 dan menandai berakhirnya era Orde Baru. Namun demikian,

pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun terus diupayakan oleh rezim pemerintahan berikutnya, bahkan hingga saat ini.

C. SISTEM PENDIDIKAN

Menurut Makmuri Sukarno (2008), sistem pendidikan pada era Orde Baru sebenarnya mengadopsi ajaran dari Ki Hadjar Dewantara (Makmuri Sukarno, 2008: 113). Pendiri Taman Siswa ini merumuskan Pendidikan Kemasyarakatan, Pendidikan Umum, dan Pendidikan Khusus. Pemerintah Orde Baru mengikuti rumusan pendidikan hasil pemikiran Ki Hadjar Dewantara ini dengan nama “Tiga Jalur Sistem Pendidikan Nasional” yang ditetapkan melalui Undang-Undang Tahun 1982.

Meskipun demikian, ada perbedaan jelas antara sistem pendidikan Taman Siswa yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara dengan konsep “Tiga Jalur Sistem Pendidikan Nasional” versi pemerintah Orde Baru. Jika Ki Hadjar Dewantara menempatkan Pendidikan Kemasyarakatan sebagai pilar utama dalam sistem pendidikan nasional pada saat itu, rezim Orde Baru justru memosisikannya sebagai elemen yang dianggap paling tidak penting. Pemerintah Orde Baru mereduksi Pendidikan Kemasyarakatan hanya menjadi sekadar pelengkap dalam sistem pendidikan nasional (Sarino Mangoenpranoto, 1984: 102).

Pemerintah Orde Baru lebih mengedepankan dua jalur lainnya dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, yaitu Pendidikan Umum dan Pendidikan Khusus. Jalur Pendidikan Umum merupakan jalur pendidikan formal yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar (dari SD hingga SMP atau yang sederajat), jenjang pendidikan menengah (dari SMP hingga SMA atau yang sederajat), dan jenjang pendidikan tinggi (universitas).

Sedangkan Pendidikan Khusus adalah jalur pendidikan yang dibentuk untuk menyiapkan peserta didik sebelum memasuki lapangan kerja. Jalur ini dikenal juga dengan nama pendidikan kejuruan dan dilaksanakan pada tingkat menengah pertama, tingkat menengah atas, hingga tingkat tinggi dengan

berbagai kemungkinan variasi dan orientasi. Pendidikan kejuruan diarahkan antara lain kepada bidang teknologi, industri, perdagangan, pertanian, kerumahtanggaan, pelayanan jasa, dan lain-lain.

Pada masa Orde Baru, upaya pembangunan sistem pendidikan nasional lebih difokuskan untuk memecahkan masalah makro, seperti pembangunan ekonomi, masalah kependudukan, dan struktural sosiologis. Dengan kata lain, pendidikan era Orde Baru dikonsepsi sebagai cara investasi *human capital* untuk mengikuti atau bahkan mendukung ideologi pembangunan (Pranarka, 1992: 65).

Sistem pendidikan Orde Baru juga lekat dengan militerisme. Bukan hanya dengan hegemoni melalui mata pelajaran dan kewajiban teknis sehari-hari dalam penyelenggaraan pendidikan, tapi juga melalui pemberian ruang yang memungkinkan bagi peserta didik untuk merasa “lebih dekat” dengan dunia kemiliteran. Penampakan yang paling mencolok dalam hal ini adalah gagasan dibentuknya Resimen Mahasiswa (Menwa) di jenjang perguruan tinggi yang merupakan manifestasi militerisme dalam sistem pendidikan nasional.

Tidak hanya itu, di jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun atas pun diberlakukan berbagai kebiasaan yang berbau militerisme, seperti kewajiban baris-berbaris hingga pemberian sanksi yang cenderung bersifat fisik terhadap peserta didik yang melakukan suatu pelanggaran.

Hegemoni militerisme dalam dunia pendidikan inilah yang pernah digugat oleh YB Mangunwijaya atau Romo Mangun. Menurut Romo Mangun, pendidikan sejati telah kehilangan maknanya pada masa Orde Baru, seperti yang dituliskannya berikut ini: Sudah selama 30 tahun lebih, 30 juta anak-anak kita dianiaya setiap hari oleh suatu sistem pengajaran dan pendidikan yang tidak menghargai anak sebagai anak. Mengapa? Bukankah sistem pengajaran dan pendidikan kita ber-Pancasila? Begitulah resminya. Tetapi dalam pelaksanaan operasionalnya, seluruh sistem Orde Baru, politis, ekonomis, sosial, budaya, jadi dalam sekolah pun, berkarya, filsafat, paradigma atau cara pikir, cipta, rasa, karsa, dan rekayasa

yang hakikatnya berjiwa militer.” (YB Mangunwijaya dalam Yosef Dedy Pradipto, 2007: 61).

Romo Mangun juga menilai bahwa apa yang terjadi dalam dunia pendidikan pada masa Orde Baru sudah menyimpang dari tujuan semula yang diharapkan, sebagaimana yang ditulisnya: “Kurikulum terselubung dari sistem sekolah sekarang, dari TK sampai Perguruan Tinggi, adalah sistem militer, sistem komando, sistem taat, hafalan kepada yang memberi instruksi, sesuai buku pintar (yang sering bodoh).” (YB Mangunwijaya, 1998: 27).

Sistem pendidikan di era Orde Baru cenderung bersifat terpusat atau sentralisasi karena ukuran yang dipakai untuk menentukan relevansi pendidikan pada masa itu adalah suatu ukuran abstrak yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan seragam. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan EBTANAS, UMPTN, dan sejenisnya, yang digunakan untuk menyeleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Artinya, pendidikan pada era Orde Baru lebih mementingkan target daripada memperhatikan proses dan kualitas pengajaran serta hasil didikan dari sistem yang telah diterapkan.

Padahal, menurut Isjoni Ishaq (2006), relevansi pendidikan ditentukan oleh kebutuhan daerah yang konkret dan tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia yang berbhinneka dan tersebar dalam suatu wilayah yang sangat luas dan beragam, tentunya tidak realistis untuk menentukan suatu standar relevansi dalam sistem pendidikan nasional (Isjoni Ishaq, 2006: 13). Lebih tegas lagi, I Sandyawan Sumardi (2005) menilai bahwa pendidikan pada masa Orde Baru belum atau tidak mampu menyentuh kebutuhan harkat hidup dan hak-hak asasi sebagian besar anak-anak dan remaja di tanah air (I Sandyawan Sumardi, 2005: 60).

D. PESERTA DIDIK

Setelah Soeharto turun dari kursi kepresidenan pada tahun 1998 dan Indonesia memasuki era reformasi, banyak sekali kritikan bahkan kecaman yang

ditujukan terhadap rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari 32 tahun, termasuk dalam bidang pendidikan. Meskipun tentu saja terdapat nilai-nilai positif dalam pelaksanaan pendidikan di era Orde Baru, namun tetap saja rezim pemerintahan Soeharto dinilai gagal mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penyelenggaraan pendidikan pada era Orde Baru diposisikan untuk menyokong pembangunan ekonomi. Inilah yang membuat banyak kalangan berpendapat bahwa peserta didik dalam pendidikan masa Orde Baru dibentuk untuk menjadi calon pekerja yang diharapkan dapat turut menggerakkan roda perekonomian negara setelah lulus sekolah nanti dan kelak akan berperan sebagai alat penguasa dalam menentukan arah kebijakan negara.

Hal ini juga ditegaskan oleh Ignas Kleden (2004) yang menilai bahwa orientasi pendidikan Orde Baru bukanlah terutama pada pengembangan pribadi dan kematangan setiap peserta didik, tetapi justru pada pasar tenaga kerja yang akan menampung siswa yang telah selesai dengan pendidikan formalnya. Dengan demikian, apa yang diajarkan dalam kelas dan sekolah harus berhubungan dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja sehingga sekolah dan pasar menjadi pasangan yang saling mengimbangi satu sama lain (Ignas Kleden, 2004: 145).

Para peserta didik dalam pendidikan di era Orde Baru bukan dididik untuk menjadi seorang pemikir, kreator, atau orang yang pada nantinya mampu menciptakan inovasi yang akan berguna bagi bangsa dan negaranya kelak. Bahkan, tidak jarang siswa dididik untuk menjadi kader politik mengingat hegemoni pemerintah yang sangat kuat pada saat itu (YB Mangunwijaya, 1999: 27).

Nuansa militerisme yang kental dalam sistem pendidikan Orde Baru juga membuat peserta didik menjadi manusia-manusia yang lemah mental, tidak berdaya kritis, dan selalu mematuhi perintah atasan. Guru selalu menjadi subyek

dan pusat kebenaran, sedangkan siswa hanya diposisikan sebagai obyek yang harus selalu mematuhi dan mengiyakan “kebenaran” yang dikatakan oleh para guru. Belum lagi dengan berbagai upaya indoktrinasi yang dilakukan dengan berbagai cara oleh pemerintah Orde Baru di ranah pendidikan.

Yosef Dedy Pradipto (2007) mengungkapkan bahwa pada umumnya, dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas, guru hanya berperan sebagai pawang yang menjejali anak didiknya dengan seabrek materi ajar. Proses belajar yang terjadi hanya berjalan searah tanpa dialog dan kesempatan bagi siswa untuk bertanya, apalagi menjawab dengan perspektif lain, apa yang dikatakan oleh guru. Siswa hanya mendengarkan guru berbicara seperti birokrat; guru menjadi komandan yang menyuruh anak buahnya di kelas; guru mengajar seperti pawang yang menjinakkan hewan yang dilatihnya (Yosef Dedy Pradipto, 2007: 62).

Guru bagai dikejar target untuk memberi hafalan dengan cara-cara indoktrinasi. Sedangkan siswa dipacu untuk menghafal semua materi yang diberikan yang justru bisa memunculkan persaingan di dalam kelas. Anak hanya belajar untuk mendapatkan ranking demi nama baik orang tua, terlebih kelak mereka akan memasuki dunia kerja. Kepentingan anak atau siswa menjadi semakin terabaikan karena mereka hanya belajar hanya untuk menyenangkan orangtua dan guru dengan memperoleh nilai baik, dan juga untuk memenuhi kebutuhan industri (Yosef Dedy Pradipto, 2007: 62).

Mengenai hal ini, YB Mangunwijaya (1999) melihat fungsi dan peran guru telah teredusir hanya sekadar sebagai penatar, instruktur, birokrat, komandan, atau pawang. Anak atau peserta didik tidak lagi dilihat lagi sebagai anak, melainkan sebagai kader mini politik atau sumber daya (YB Mangunwijaya, 1999: 27). Sekolah pun telah kehilangan arti sejatinya karena hanya menjadi kelas-kelas penataran. Sekolah menjadi ajang kompetensi, lomba ranking dan target prestasi seperti yang diinginkan oleh dunia bisnis pembelajaran yang tidak adil (Francis X. Wahono, 2001)

E. KURIKULUM PENDIDIKAN

Benny Susetyo (2005) berpendapat bahwa kurikulum lebih dari sekadar *text-book*, lebih dari *subject-matter*, lebih dari rangkaian pelajaran, bahkan lebih dari sekadar pelajaran kursus. Brown (dalam Benny Susetyo, 2005; 22) merumuskan kurikulum sebagai situasi dan kondisi untuk mengubah sikap peserta didik yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Kurikulum harus bersifat fleksibel dan elastis sehingga terbuka kesempatan untuk memberikan bahan pelajaran yang penting dan perlu bagi anak didik. Elastisitas kurikulum ini tentu saja disesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Adapun tujuan spesifik dari kurikulum adalah menumbuhkan rasa toleransi, kesanggupan untuk berpikir sederhana, dan mengikis prasangka dalam memberikan pertimbangan nilai atau *value judgments* (Benny Susetyo, 2005; 25).

Selain itu, kurikulum juga berfungsi untuk membantu kematangan pribadi peserta didik, membantu siswa agar berhasil menyesuaikan diri dengan masyarakat sekolahnya, serta membantu siswa agar menyadari kepentingan masyarakat dan menghayati masyarakatnya sendiri. Tujuan kurikulum lainnya adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak didik sehingga bisa memahami kompleksitas lingkungan sosial dan peradabannya, serta menanamkan nilai, sikap, dan kemampuan untuk belajar. (Benny Susetyo, 2005; 25).

Memang tidak mudah untuk menciptakan sistem pendidikan dengan kurikulum yang bebas dari pengaruh penguasa, sebab peran negara sangat sulit untuk dipisahkan dari proses pendidikan yang berlangsung di negara itu, bahkan seringkali pengaruh negara terlihat sangat menonjol. Apple (2013: 1996) menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya. Oleh sebab itu, dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan.

Masyarakat pada umumnya tidak menyadari bahwa di balik kurikulum pendidikan ternyata terselip kepentingan dari penguasa. Inilah yang kemudian disebut sebagai *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi. Hal ini tampak dalam sistem pendidikan era Orde Baru di mana proses pendidikan, kurikulum, metodologi, dan aspek-aspek dalam pendidikan lainnya yang merupakan pengejawantahan dari sistem kekuasaan. Dengan kata lain, pendidikan menjadi upaya pelestarian Orde Baru pada saat itu (H. A. R. Tilaar, 2003: 45).

Pendidikan pada era Orde Baru telah merumuskan kurikulum secara bertahap, mulai dari Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, hingga Kurikulum 1994. Masing-masing dari kurikulum ini memiliki karakteristik dan capaian yang hendak diwujudkan dalam pelaksanaannya.

1. Kurikulum 1968

Ini adalah produk kurikulum pertama Orde Baru yang sebenarnya hanya melanjutkan Kurikulum 1964 yang merupakan warisan Orde Lama. Perubahan yang dilakukan hanya berupa penggantian struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Namun, Orde Baru mengklaim bahwa Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Meskipun kelahirannya bersifat politis, namun ada hal yang cukup positif dari Kurikulum 1968. Kurikulum ini menjadi awal dimasukkannya konsep-konsep pedagogis meskipun tetap berada di dalam pengawasan pemerintah. Secara teknis, konsep pedagogis yang terdapat di Kurikulum 1968 masih banyak yang kurang dimengerti oleh pelaksananya, bahkan mungkin oleh penyusun kurikulum itu sendiri (Winarno Surakhmad & St Sularto, 2009: 68-69).

2. Kurikulum 1975

Kurikulum ini berupaya agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar MBO (*Management by Objective*). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirumuskan secara detail dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) atau yang kemudian dikenal dengan istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Hal yang paling menonjol dalam kurikulum ini adalah kewajiban bagi guru untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung.

Menurut Asvi Warman Adam (2010), dalam Kurikulum 1975, pendidikan sejarah bukan hanya dijiwai oleh moral Pancasila, namun juga nilai-nilai UUD 1945 bagi generasi muda (Asvi Warman Adam, 2010: 134). Namun, saat penggodokan kurikulum ini, beberapa pihak meminta agar Kurikulum 1975 juga memuat sejarah nasional, lagu-lagu perjuangan, kisah-kisah kepahlawanan, bahkan hingga pelajaran tentang pertahanan dan strategi nasional. Dalam pandangan Mc.Greggor (2008: 269) hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan agar peran politik orang-orang militer dapat diterima secara luas serta membuat masyarakat semakin memahami maksud pertahanan nasional dan Dwifungsi ABRI.

3. Kurikulum 1984

Sejumlah kalangan menilai Kurikulum 1984 adalah kurikulum yang instan karena keputusan pemberlakuannya sangat cepat dilakukan tidak lama setelah Nugroho Notosusanto menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Darmaningtyas, 2003: 77). Josephus Ignatius Gerardus Maria Drost (1998) melihat bahwa Kurikulum 1984 sebenarnya sudah cukup baik, namun masih memuat sejumlah kelemahan terutama dinilai terlalu berat, terlalu luas, dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak relevan (Josephus Ignatius Gerardus Maria Drost, 1998: 117).

Kurikulum 1984 mengedepankan *process skill approach* yang dianggap lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Pada Kurikulum 1984 inilah mata pelajaran PSPB mulai dimunculkan.

4. Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan perpaduan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Kurikulum 1994 dinilai oleh sebagian kalangan semakin menambah beban belajar siswa karena ada penambahan mata pelajaran yang cukup signifikan, termasuk muatan nasional hingga muatan lokal. Selain itu, berbagai kepentingan kelompok juga mendesak agar hal-hal tertentu dapat masuk dalam kurikulum. Akibatnya, Kurikulum 1994 menjadi kurikulum yang sangat padat.

Darmaningtyas (2004) menilai bahwa hal yang paling menonjol dari Kurikulum 1994 adalah adanya dominasi mata pelajaran matematika dan bahasa (meliputi bahasa Indonesia dan Inggris) dalam seluruh jenjang pendidikan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sangat minimnya pelajaran kesenian (Darmaningtyas, 2013). Mata pelajaran PSPB yang diberlakukan di kurikulum sebelumnya telah dihapus di Kurikulum 1984 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Daliman. Peta Sumber Daya Manusia di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menghadapi Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II): Suatu Analisis Struktural. Yogyakarta: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta, 1995.
- Adnan Buyung Nasution. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Apple, Michael W. *Cultural Politics and Education*. New York: Teachers College Press, 1996.
- Apple, Michael W.. *Education and Power*. New York: Routledge, 2013.
- Ary H. Gunawan. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Asvi Warman Adam. *Menguak Misteri Sejarah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Benny Susetyo. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Darmaningtyas. *Pendidikan yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galangpress Group, 2004.
- Dirto Hadisusanto. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta, 1995.
- Doni Koesoema. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Fasli Jalal & Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Francis X. Wahono. *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*. Yogyakarta: INSIST Press, Cindelaras, dan Pustaka Pelajar, 2001.
- Franz Magnis-Suseno. *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- H. A. R. Tilaar. *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: IndonesiaTera, 2003.
- I Sandyawan Sumardi. *Melawan Stigma Melalui Pendidikan Alternatif*. Jakarta: Grasindo, 2005.

- Ignas Kleden. *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*. Magelang: IndonesiaTera, 2004.
- Isjoni Ishaq. *Membangun Visi Bersama: Aspek-aspek Penting dalam Reformasi Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Josephus Ignatius Gerardus Maria Drost. *Sekolah: Mengajar atau Mendidik?*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Madiri Thamrin Sianipar. *Pendidikan Politik Bangsa*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984.
- Makmuri Sukarno, "Perguruan Taman Siswa: Kasus Pendidikan Berbasis Masyarakat Menghadapi Negara", dalam *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), No. 2, 2008.
- McGregor, Katharine E. *Ketika Sejarah Berseragam*. Yogyakarta: Penerbit Syarikat, 2008.
- Mohammad Ali, dkk. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bagian 4*. Bandung: Imtima, 2007.
- Mohammad Ali. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Mohammad Yamin. *Menggugat Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2009.
- Pranarka. *Gerak Perubahan Sejarah dan Arah Haluan Kita di Dalamnya*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Taman Siswa, 1992.
- Rahardjo Darmanto Djojodibroto. *Tradisi Kehidupan Akademik*. Yogyakarta: Galangpress, 2004.
- Sarino Mangoenpranoto. *Menuju Demokrasi Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1984.
- Shuttleworth, Mary Bernice. *Human Rights Education: A Phenomenological Explication*. Fielding Graduate University: ProQuest, 2008.
- Soedijarto. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset.

Winarno Surakhmad & St Sularto. *Pendidikan Nasional, Strategi, dan Tragedi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

YB Mangunwijaya. *Menjadi Generasi Pasca-Indonesia: Kegelisahan*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

YB Mangunwijaya. *Menuju Indonesia Serba Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Yosef Dedy Pradipto. *Belajar Sejati Versus Kurikulum Nasional*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

BAB VI

PENDIDIKAN INDONESIA MASA DEPAN

Pendidikan pada dasarnya bertujuan mulia yaitu memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia berarti membuat manusia menjadi berfungsi sepenuhnya agar sejahtera hidup berdampingan dengan masyarakatnya baik ditingkat lokal maupun global dan mampu merencanakan masa depan hidupnya yang cerah secara merdeka. Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia ternyata telah disadari betul oleh para *founding father* bangsa ini. Hal itu terlihat dari pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang salah satunya berbunyi "*mencerdaskan kehidupan bangsa*". Mencerdaskan kehidupan bangsa bermakna mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang siap dan mampu bersaing dengan masyarakat internasional di era global ini.

Perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional.

Memasuki abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Perasan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajaun teknologi dan

perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain.

Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain.

Apalagi, Indonesia tengah memasuki bonus demografi. Fenomena ini terjadi karena ada perubahan struktur demografi atau komposisi penduduk menurut umur yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030. Bonus demografi ditandai dengan banyaknya penduduk usia muda dan produktif. Menurut proyeksi penduduk tahun 2035 berbasis sensus 2010 diketahui masa maksimum bonus demografi ini terjadi pada 2028, 2029, 2030 dan 2031. Selama itu, persentase penduduk usia muda dan produktif mencapai 46.7 persen. Tentu saja ini merupakan suatu berkah. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Impasnya adalah meningkatkannya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun berkah ini bisa berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan kedatangannya. Kualitas penduduk Indonesia berdasarkan Human Development Index 2012 menduduki urutan 121 dari 187 negara yang ada di dunia. Ini masih memprihatinkan.

Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat

penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Pendidikan yang seharusnya menjadi pencerahan telah menjadi tempat yang menyeramkan dengan tingkat kompetisi peringkat yang tinggi dengan mengesampingkan pemberdayaan anak didik sebagai individu. Tradisi rangking yang ada dalam sistem sekolah negeri nyata-nyata malah menumbuhkan rasa individualis yang mengkhianati nilai kebersamaan dan gotong royong sebagai salah satu nilai yang pernah dimiliki bangsa ini.

Akibatnya kebanyakan siswa lulus hanya mendapatkan ijazah saja tak lebih dari itu. Padahal pada kenyataannya ijazah hanya berguna untuk proses administrasi saja dalam mencari pekerjaan atau mendirikan lapangan kerja. Selebihnya hal yang diperlukan adalah jiwa kepemimpinan, daya kreasi, kemampuan menciptakan visi dan misi dalam hidup, kemampuan bersosialisasi dan adaptasi. Hal itu selanjutnya disebut dengan karakter dan sistem pendidikan nasional dengan berbagai kurikulumnya yang berganti-ganti belum mampu melahirkan siswa dengan karakter tadi. Alih alih menjadi tempat untuk mengembangkan potensi diri sekolah malah menjadi tempat menyeramkan bak sumber penyakit seperti stress, cemas dengan laku atau tidaknya ijazah, mendapat peringkat atau tidak dan lain sebagainya.

Jika kita telah memahami apa dan bagaimana keadaan pendidikan di negeri ini maka kita tidak bisa diam saja dan membiarkan penyakit ini terus disebarkan turun temurun. Banyak pihak bisa disalahkan terkait sumbangannya pada kebobrokan dunia pendidikan Indonesia. Namun, demi mempertimbangkan nasib generasi penerus bangsa dan juga bangsa ini sendiri maka kita harus segera bangkit dari penyakit ini dan memulai penyembuhan mulai dari yang kita bisa semaksimal mungkin.

A. KURIKULUM

Kurikulum bagaikan paru-paru pendidikan, kalau baik paru-parunya baik pulalah tubuhnya. Kurikulum pendidikan di masa depan harus kurikulum yang “berwajah” Indonesia. Kurikulum yang berakar budaya bangsa. Namun kurikulum yang berakar pada budaya bangsa tidak berarti bahwa kurikulum harus bersifat eksklusif. Hal ini bertentangan dengan realitas globalisasi. Oleh karena itu, kurikulum yang berakar pada budaya bangsa harus pula memahami globalisasi yang dapat dikaji berdasarkan perspektif kurikuler dan perspektif reformasi. Pembaharuan kurikulum pendidikan nasional harus didasarkan pada paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan nasional yang tepat, sesuai dengan realitas masyarakat dan kultur bangsa sendiri. Penyelenggaraan pendidikan di masa depan harus semakin lebih mementingkan aspek moral atau karakter. Penekanan terhadap moral dipandang perlu karena dengan sikap kreatif dan profesional saja bangsa ini akan hancur, hal ini dapat dilihat pada keterpurukan moral para wakil rakyat yang korupsi sampai trilyunan rupiah.

B. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pemerintah harus menggratiskan biaya pendidikan di semua jenjang pendidikan (pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pemenuhan segala keperluan (sarana dan prasarana) yang menunjang terhadap keberlangsungan proses pendidikan. Menurut McKinsey Global Institute USA mengatakan, Indonesia berpotensi menjadi negara maju pada 2030 (Kompas.Com, 13/11/2012). Sebelumnya, masih menurut McKinsey Global Institute (2012), lembaga ini memproyeksikan Indonesia akan menjadi kekuatan nomor 7 di dunia pada tahun 2025 (Detik.com, 26/08/2013). Pemerintah melalui pihak terkait harus lebih tegas dalam menangani terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada, terutama terhadap pembiayaan pendidikan dan proses pendidikan baik mulai dari perencanaan, kegiatan pembelajaran, evaluasi dan tindak lanjutnya. Walaupun, sekarang anggaran pendidikan sudah 20% lebih tetapi

penggunaannya belum efektif dan efisien. Banyak ditemukan berbagai kebocoran diberbagai lini.

C. PENDIDIK

Peran guru tidak bisa lepas dari karakteristik pekerja profesional. Artinya, pekerjaan guru akan dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila seseorang telah melewati suatu proses pendidikan yang dirancang untuk itu. Sebagai suatu pekerjaan profesional, sudah barang tentu kemampuan guru harus secara terus-menerus ditingkatkan. Meski andai kata tidakpun guru tetap akan dapat melaksanakan tugas memenuhi standar minimal. Peningkatan mutu guru dengan mendasarkan pada kemauan dan usaha para guru sendiri. Artinya, guru tidak harus didikte dan diberi berbagai arahan dan instruksi. Yang penting adalah perlu disusun standar profesional guru 'yang akan dijadikan acuan pengembangan mutu guru dan pembinaan guru diarahkan pada sosok guru pada era globalisasi ini.

Sosok guru ini penting karena guru merupakan salah satu bentuk *soft profession* bukannya *hard profession* seperti dokter atau insinyur. Sudah barang tentu pendidikan dan pembinaan guru akan berbeda dengan dokter atau insinyur. Karena hakekat kerja dua bentuk profesi tersebut berbeda. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru.

Konsep guru mengajar diubah menjadi konsep belajar bersama. Dengan konsep ini guru menempatkan diri sebagai teman yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Siswa tidak perlu tunduk terpaksa pada kurikulum atau silabi yang diterapkan guru. Siswa bersama dengan guru menentukan bersama apa yang ingin dipelajari dan mempelajari pula kaitan antara materi yang dipelajari dengan realita sehari-hari. Dengan metode seperti

ini siswa terbukti lebih nyaman belajar dan menghasilkan berbagai macam prestasi nyata seperti novel, album lagu, lukisan, dan masih banyak lainnya. Namun, hal yang paling penting adalah dengan metode ini maka siswa menjadi manusia merdeka yang mampu merencanakan dan meraih apa yang diinginkan.

D. PESERTA DIDIK

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap masyarakat membutuhkan pendidikan, sampai kapanpun dan dimanapun ia berada. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang yang berujung pada keterpurukan. Dengan demikian Pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan generasi yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagai mana yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Permasalahan ketimpangan dalam ruang-ruang kelas yang berujud prestasi siswa. Memang, ketimpangan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan sosial ekonomi keluarga. Secara konkret pada level kelas harus dikembangkan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Cooperative Learning Model diharapkan akan dapat mempersempit ketimpangan prestasi siswa. Prestasi siswa memang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengajar guru semata. Kultur sekolah dipastikan ikut memegang peran penting.

E. KOMPETENSI LULUSAN

Pendidikan sebagai suatu proses tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengkaitkan proses pendidikan dengan masyarakatnya pada umumnya, dan dunia kerja pada

khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti bahwa prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan prestasi peserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, pendidikan yang bersifat *double tracks* menekankan bahwa untuk mengembangkan pengetahuan umum dan spesifik harus melalui kombinasi yang strukturnya terpadu antara tempat kerja, pelatihan dan pendidikan formal sistem persekolahan. Dengan *double tracks* ini sistem pendidikan akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan yang senantiasa berubah dengan cepat.

Berbagai problem yang muncul di masyarakat, khususnya ketimpangan antara kualitas pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja merupakan refleksi adanya kelemahan yang mendasar dalam dunia pendidikan kita. Setiap upaya untuk memperbaharui pendidikan akan sia-sia, kecuali menyentuh akar filosofis dan teori pendidikan. Yakni, pendidikan tidak bisa dilihat sebagai suatu dunia tersendiri, melainkan pendidikan harus dipandang dan diberlakukan sebagai bagian dari masyarakatnya. Oleh karena itu, proses pendidikan harus memiliki keterkaitan dan kesepadanan secara mendasar serta berkesinambungan dengan proses yang berlangsung di dunia kerja. Sementara itu, rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.

Pendidikan Indonesia masa depan harus dibawa dalam rangka mengoptimalkan kemampuan peserta didik untuk memiliki sifat kreatif, kritis dan tanggap terhadap permasalahan kehidupan. Hal ini sesuai dengan rumusan dari UNESCO sebagai lembaga yang mengurus masalah pendidikan di bawah naungan PBB telah merumuskan empat pilar pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa depan, pilar tersebut adalah pilar (1) *learning to Know* (belajar untuk mengetahui), (2) *learning to do*

(belajar untuk melakukan sesuatu) dalam hal ini kita dituntut untuk terampil dalam melakukan sesuatu, (3) learning to be (belajar untuk menjadi seseorang), dan (4) learning to live together (belajar untuk menjalani kehidupan bersama). (5) learn how to learn (belajar menggunakan metode yang tepat) dan yang terakhir learning through our life (belajar sepanjang hayat).

DAFTAR PUSTAKA

Made Pidarta. 2004. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mastuhu. 2003. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20. Tahun 2005. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.